



PEMERINTAH KABUPATEN  
MAHAKAM ULU



# *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu*



**LPPD TA. 2023**





**LPPD TA. 2023**



# PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

## INSPEKTORAT

Jalan Gunung Belareq Gang Dunhill RT. VII Kecamatan Long Bagun Kode Pos 75767  
UJOH BILANG

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.



Ujoh Bilang, 27 Maret 2024

INSPEKTUR,

Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, Ak, MM, CA, AAP, CFrA, CGCAE  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650722 198703 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji serta syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, walaupun bersamaan dengan perhelatan pesta Demokrasi di Indonesia Tahun 2024, namun penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat selesai tepat waktu.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu selama Tahun 2023. Laporan ini merupakan wujud keterbukaan informasi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Sangat disadari bahwa ada begitu banyak indikator kinerja yang disajikan dalam laporan ini belum mencapai nilai ideal, karena pembangunan di berbagai bidang (Infrastruktur dan SDM) dilakukan secara bertahap namun tetap berkesinambungan dan konsisten. Oleh karenanya, dengan penuh kerendahan hati kami terbuka untuk menerima setiap masukan, saran dan pandangan yang membangun serta bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah pada tahun-tahun ke depan.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Ujoh Bilang,   Maret 2024  
BUPATI MAHAKAM ULU,

  
**BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E.**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>01</b>
1.1 Latar Belakang	01
1.1.1 Penjelasan Umum	01
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	122
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	205
<b>BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>236</b>
2.1 Indikator Kinerja Makro	236
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	242
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	242
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	337
<b>BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b>	<b>465</b>
3.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Mahakam Ulu	465
3.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	468
3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	468
<b>BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>	<b>469</b>
4.1 Urusan Pendidikan	469
4.2 Urusan Kesehatan	481
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	502
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	510
4.5 Urusan Trantibum dan Linmas	519
4.6 Urusan Sosial	532
<b>BAB V. PENUTUP</b>	<b>545</b>

## DAFTAR TABEL

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
Tabel 1.1.	Luas Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dirinci Menurut Kecamatan	4
Tabel 1.2.	Luas Lereng Kabupaten Mahakam Ulu	6
Tabel 1.3.	Jumlah Penduduk Tahun 2020	7
Tabel 1.4.	Struktur Umur dan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.5.	Luas Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dirinci Menurut Kecamatan	8
Tabel 1.6.	Data Kampung/Desa Kabupaten Mahakam Ulu	9
Tabel 1.7.	Daftar Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	14
Tabel 1.8.	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib	17
Tabel 1.9.	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pilihan	18
Tabel 1.10.	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Fungsi Penunjang	19
Tabel 1.11.	Alokasi dan Realisasi Anggaran	64
Tabel 1.12.	Pokok-pokok Visi Kabupaten Mahakam Ulu	152
Tabel 1.13.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026	163
Tabel 1.14.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026	165
Tabel 1.15.	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kab. Mahakam Ulu Periode 2021-2026	180
Tabel 1.16.	Realisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023	202
<b>BAB II</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
Tabel 2.1	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mahakam Ulu	237
Tabel 2.2	Angka Kemiskinan	237
Tabel 2.3	Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten Mahakam Ulu	238
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu	238
Tabel 2.5	PDRB Per Kapita Kabupaten Mahakam Ulu	239
Tabel 2.6	Nilai PDRB Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2022-2023	240
Tabel 2.7	Nilai PDRB Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2022-2023	240
Tabel 2.8	Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)	242
Tabel 2.9	Pelaporan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023	242
<b>BAB IV</b>	<b>PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>	
Tabel 4.1	Target pencapaian SPM Urusan Pendidikan	470
Tabel 4.2	Indikator dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	475



	(SPM) Pada Urusan Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu	
Tabel 4.3	Permasalahan Urusan Pendidikan	479
Tabel 4.4	Target Pencapaian Indikator SPM	482
	Urusan Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023	
Tabel 4.5	Realisasi Capaian Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kab. Mahakam Ulu Tahun 2023	492
Tabel 4.6	Permasalahan Urusan Kesehatan	501
Tabel 4.7	Target Pencapaian Urusan Pekerjaan Umum	503
Tabel 4.8	Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	506
Tabel 4.9	Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum	508
Tabel 4.10	Target Pencapaian SPM urusan Perumahan Rakyat	510
Tabel 4.11	Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	514
Tabel 4.12	Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat	518
Tabel 4.13	Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	520
Tabel 4.14	Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	524
Tabel 4.15	Permasalahan Satpol PP	529
Tabel 4.16	Permasalahan Pemadam Kebakaran	530
Tabel 4.17	Permasalahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	531
Tabel 4.18	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota	532
Tabel 4.19	Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial	538
Tabel 4.20	Permasalahan Urusan Sosial	543

## **DAFTAR GAMBAR**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Gambar 1.1.	Wilayah Administrasi Kabupaten Mahakam Ulu	3
Gambar 1.2.	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mahakam Ulu	5
Gambar 1.3.	Keselarasn Visi Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Mahakam Ulu	155
Gambar 1.4.	Keselarasn RPJMD dengan SDG's Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten Mahakam Ulu	162
Gambar 1.5	2021-2026	174





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

#### 1.1.1 Penjelasan Umum

##### A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebutan Mahakam Ulu sebagai sebuah konstruksi sosial yang sedang diperjuangkan, memiliki akar sejarah panjang. Muncul pertama kali dalam kaitan penataan wilayah administratif oleh Hindia Belanda terhadap Kesultanan Kutai, yaitu menyusul berlakunya Decentralisatie Wet 1903, maka pada 1905 dalam Kesultanan Kutai dibentuk dua wilayah administratif yaitu Hulu Mahakam dengan pusat pemerintahan di Long Iram, dan daerah Vierkante Pall dengan pusat pemerintahan di Samarinda.

Tahun 1930, wilayah Kesultanan Kutai dipecah lagi menjadi 4 (empat) Onderafdeeling, yakni Zuid Kutai berkedudukan di Balikpapan, Oost Kutai berkedudukan di Samarinda, West Kutai berkedudukan di Tenggarong dan Boven Mahakam berkedudukan di Long Iram.

Di era kemerdekaan pada tahun 1946, wilayah Kesultanan Kutai dibagi dalam 2 (dua) Kepatihan yaitu Kutai Barat dan Kutai Tengah. Saat berlaku Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959, Kutai ditata menjadi Daerah Swatantra, yang meliputi Kotapraja Balikpapan, Daerah Tingkat II Kutai, dan Kotapraja Samarinda.

Pada era reformasi, saat berlaku Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Kartanegara dimekarkan menjadi 4 (empat) wilayah administratif yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang.

Wilayah eks-Onderafdeeling Boven Mahakam menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Barat. Wilayah eks-Onderafdeeling Boven Mahakam yang sempat terbagi dalam 2 (dua)



kecamatan, yaitu Long Iram dan Long Pahangai, belakangan dimekarkan menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai dan Long Apari.

Kabupaten Mahakam Ulu, adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 pada tanggal 11 Januari 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari, yang terbagi menjadi 50 (lima puluh) kampung. Kabupaten Mahakam Ulu berkedudukan di Kecamatan Long Bagun sebagai pusat pemerintahan dan memiliki Kecamatan Long Apari yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

## **B. Data Geografis Wilayah**

Secara geopolitik, Kabupaten Mahakam Ulu terletak di sebelah Barat Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, sangat berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan Nasional, dengan pembangunan di wilayah perbatasan. Potensi kawasan Kabupaten Mahakam Ulu bervariasi dalam berbagai sektor-sektor perkebunan berupa karet, kelapa sawit, kakao, rotan dan kopi. Sektor kehutanan berupa kayu, sarang burung walet dan gaharu. Sektor pertanian diantaranya sawah dan ladang masyarakat. Sektor peternakan seperti babi, sapi dan ikan keramba. Serta sektor pertambangan berupa batubara, emas, biji besi, uranium, minyak bumi, bahan galian. Untuk sektor perdagangan, wilayah Kabupaten Mahakam Ulu berada pada posisi strategis kegiatan perdagangan antar daerah seperti perdagangan dengan Desa Mahak Baru di Kabupaten Malinau, dengan Negara Serawak di Malaysia, serta dengan Desa Topus, Puruq Cahu, Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum isu strategis yang sangat relevan di Kabupaten Mahakam Ulu





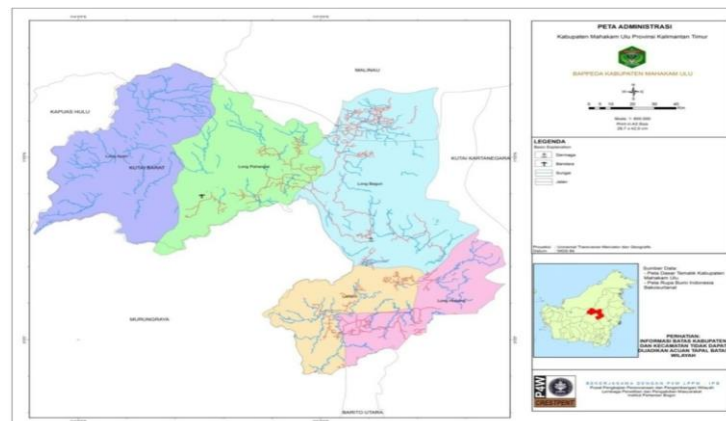
adalah masalah perbatasan Negara dan peningkatan fokus pembangunan daerah.

### 1. Batas Administrasi Daerah

Secara geografis Kabupaten Mahakam Ulu terletak antara 113°48'49'' sampai 115°45'49'' Bujur Timur dan antara 1°31'05'' Lintang Utara dan 0°9'00'' Lintang Selatan (Mahakam Ulu Dalam Angka, 2014). Batas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara: Kampung Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh dan Kampung Long Sungai Barang Kecamatan Kayan Selatan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, serta negara bagian Sarawak di Malaysia;
- b) Sebelah Timur: Kampung Muara Tuboq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c) Sebelah Selatan: Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram dan Kampung Tutung Kecamatan Linggang Bigung di Kabupaten Kutai Barat, serta Kampung Tumbang Topus Kecamatan Uut Murung dan Kampung Liang Nyering Kecamatan Sumber Barito di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- d) Sebelah Barat: Kampung Kariho Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Ulu Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 1.1  
Wilayah Administrasi Kabupaten Mahakam Ulu



Sumber: Bappelitbangda Kab. Mahakam Ulu



## 2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 adalah  $\pm 15.315 \text{ km}^2$ , atau 7,26% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Sementara, berdasarkan hitungan peta digital (Sistem Informasi Geografis), luas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu adalah  $+ 18.869 \text{ km}^2$ .

Kabupaten Mahakam Ulu terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung, serta 50 (lima puluh) desa/kampung. Kabupaten Mahakam Ulu beribukota di Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun.

Tabel 1.1  
Luas Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dirinci Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah Km2
(1)	(2)	(3)
1. Laham	Laham	901,80
2. Long Hubung	Long Hubung	530,90
3. Long Bagun	Ujoh Bilang	4.971,20
4. Long Pahangai	Long Pahangai	3.420,40
5. Long Apari	Tiong Ohang	5.490,70
<b>Jumlah/Total :</b>		<b>15.315,00</b>

Sumber : Bappelitbangda Kab. Mahakam Ulu

Berdasarkan data tersebut Kecamatan Long Apari merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas dengan luas  $5.490,70 \text{ km}^2$ , sedangkan Kecamatan Long Hubung



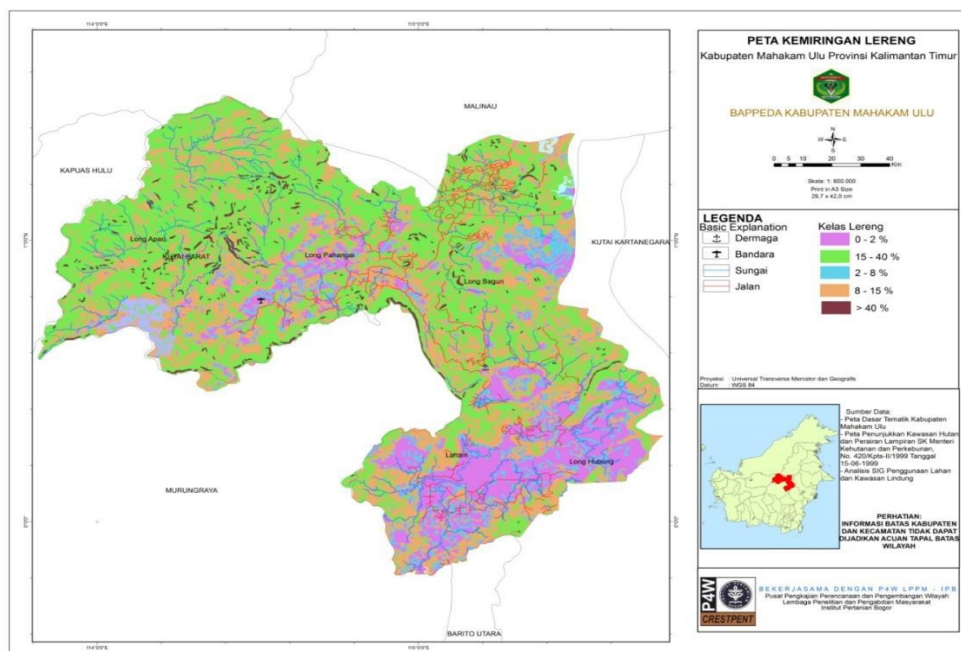


merupakan kecamatan dengan wilayah yang terkecil dengan luas 530,90 km<sup>2</sup>.

### 3. Topografis

Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu didominasi topografi bergelombang dari kemiringan landai hingga curam, dengan ketinggian berkisar 0-1.500 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan kemiringan antara 0-60%. Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai pegunungan di wilayah perbatasan yang membujur dari Utara ke Selatan di bagian Barat Laut berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter dpl dengan kemiringan 30%. Pegunungan ini terjadi karena peristiwa geologi berupa lipatan dan sisipan sehingga bentuknya berjalur-jalur sejajar dengan garis pantai. Dengan kondisi fisiografi dan topografi yang demikian, maka pemukiman penduduk lebih banyak dijumpai di wilayah sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai Mahakam dengan kondisi yang lebih datar.

Gambar 1.2.  
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mahakam Ulu



Sumber : Bappelitbangda Kab. Mahakam Ulu



Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai berada pada ketinggian lebih dari 100 m dpl, sedangkan wilayah kecamatan lainnya sebagian besar terletak di bawah ketinggian 100 m dpl. Daerah-daerah yang terjal sebagian besar terletak di wilayah bagian Utara yang meliputi wilayah Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai. Dengan kondisi topografi yang demikian, diharapkan wilayah di bagian utara menjadi pelindung bagi kawasan di selatan yang kondisi pembangunannya lebih berkembang.

Tabel 1.2  
Luas Kelas Lereng Kabupaten Mahakam Ulu

No.	Kelas Lereng	Luas (Ha)
1	0 - 2 %	184.282
2	2 - 8 %	51.417
3	8 - 15 %	593.467
4	15 - 40 %	671.830
5	> 40 %	30.504
<b>Total</b>		1.531.500

Sumber: Bappelitbangda Kab. Mahakam Ulu

### C. Jumlah Penduduk

Dari segi demografi pada tahun 2023 jumlah penduduk Mahakam Ulu mencapai 38.498 jiwa berdasarkan data Kependudukan Kabupaten Mahakam Ulu. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 37.318 Jiwa. Peningkatan jumlah penduduk sebanyak Namun pertumbuhan



penduduk tersebut tidak sebanding dengan wilayah Mahakam Ulu yang begitu luas dan besar.

Tabel 1.3  
Jumlah Penduduk Tahun 2023

No. Kec	Nama Kec.	Laki-laki	Perempuan	L+P
1	Long Bagun	8.786	7.503	16.289
2	Long Hubung	4.801	4.284	9.085
3	Laham	1.696	1.429	3.125
4	Long Apari	2.446	2.200	4.646
5	Long Pahangai	2.824	2.529	5.353
	Jumlah	20.553	17.945	38.498

Sumber: <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/2023>

Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu dari Tahun ke Tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk secara alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu pada Tahun 2023 sebanyak 38.498 jiwa, mengalami penambahan 1.180 jiwa atau meningkat sebesar 3 persen (%) jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana jumlah penduduk Mahakam Ulu berjumlah 37.318 jiwa.

Adapun komposisi jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu menurut jenis kelamin dan struktur umur pada Tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.4  
Struktur Umur dan Jenis Kelamin

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	1.357	1.316	2.673
2	5-9	1.705	1.676	3.381
3	10-14	1.707	1.531	3.238





No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4	15-19	1.575	1.522	3.097
5	20-24	1.834	1.631	3.465
6	25-29	1.840	1.697	3.537
7	30-34	1.754	1.407	3.161
8	35-39	1.522	1.225	2.747
9	40-44	1.580	1.290	2.870
10	45-49	1.360	1.097	2.457
11	50-54	1.153	835	1.988
12	55-59	895	721	1.616
13	60-64	645	534	1.179
14	65-69	394	391	785
15	70-74	273	233	506
16	>75	326	292	618
<b>JUMLAH</b>		<b>19.920</b>	<b>17.398</b>	<b>37.318</b>

Sumber: Disdukcapil Kab. Mahakam Ulu

#### D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Mahakam Ulu terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung, serta 50 (lima puluh) kampung). Kabupaten Mahakam Ulu beribukota di Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun.

Tabel 1.5  
Luas Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dirinci Menurut Kecamatan



Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah Km2
(1)	(2)	(3)
1. Laham	Laham	901,80
2. Long Hubung	Long Hubung	530,90
3. Long Bagun	Ujoh Bilang	4.971,20
4. Long Pahangai	Long Pahangai	3.420,40
5. Long Apari	Tiong Ohang	5.490,70
<b>Jumlah/Total :</b>		<b>15.315,00</b>

Sumber : Bappelitbangda Kab. Mahakam Ulu

Sedangkan, jumlah desa/kampung di Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari 50 (lima puluh) kampung, adapun pembagian kampung menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6  
Data Kampung / Desa  
Kabupaten Mahakam Ulu

NO	KECAMATAN/KODE WILAYAH	URUTAN	KAMPUNG/DESA
1	2	3	4
1	Long Apari (64.11.04)	1	Long Penaneh 1
		2	Long Kerioq
		3	Long Penaneh 2
		4	Tiong Ohang
		5	Long Penaneh 3
		6	Tiong Bu'u
		7	Noha Boan
		8	Noha Tifab
		9	Noha Silat



1	2	3	4
		10	Long Apari
2	Long Pahangai (64.11.05)	1	Delang Krohong
		2	Long Pakaq
		3	Long Lunuk
		4	Long Isun
		5	Naha Aruq
		6	Datah Naha
		7	Lirung Ubing
		8	Long Pahangai 1
		9	Long Pahangai 2
		10	Long Tuyuq
		11	Liu Mulang
		12	Long Pakaq Baru
		13	Long Lunuk Baru
3	Long Bagun (64.11.01)	1	Long Hurai
		2	Long Merah
		3	Rukun Damai
		4	Mamahaq Besar
		5	Mamahak Ulu
		6	Long Melaham
		7	Ujoh Bilang
		8	Batu Majang
		9	Long Bagun Ilir
		10	Long Bagun Ulu
		11	Batoq Kelo



4	Laham (64.11.03)	1	Laham
		2	Long Gelawang
		3	Muara Ratah
		4	Danum Paroy
		5	Nyaribungan
5	Long Hubung (64.11.02)	1	Long Hubung
		2	Mamahaq Teboq
		3	Lutan
		4	Matalibaq
		5	Datah Bilang Ilir
		6	Datah Bilang Ulu
		7	Tri PariqMakmur
		8	Wana Pariq
1	2	3	4
		9	Datah Bilang Baru
		10	Surau
		11	Long Hubung Ulu
<b>JUMLAH</b>		<b>50</b>	

Sumber : DPMK Kab. Mahakam Ulu

## E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

### 1. Jumlah Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks otonomi daerah secara substantif diaktualisasikan dalam bentuk pelaksanaan azas desentralisasi melalui pembagian dan





distribusi urusan pemerintahan yang disesuaikan dengan wewenang, peran dan fungsi masing-masing tingkatan pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Perspektif pembagian urusan pemerintahan tersebut, secara konseptual menggunakan 3 (tiga) prinsip dasar yaitu: efisiensi, ekstemalitas, dan akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan bentuk dan jenis urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:



1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Perindustrian
6. Transmigrasi

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, rincian urusan tersebut diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan Perangkat Daerah berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) Organisasi Perangkat



Daerah. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diselenggarakan dengan berasaskan :

1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
2. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah
3. Efisiensi
4. Efektivitas
5. Pembagian habis tugas
6. Rentang kendali
7. Tata kerja yang jelas
8. Fleksibilitas

Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

## 2. Unit Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7  
Daftar Organisasi Perangkat Daerah  
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023

No	Instansi	Keterangan
1	Sekretariat Daerah :	
	a) Bagian Pemerintahan	
	b) Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	c) Bagian Hukum	
	d) Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
	e) Bagian Administrasi Pembangunan	
	f) Bagian Pengadaan Barang & Jasa	
	g) Bagian Umum	



No	Instansi	Keterangan
	h) Bagian Organisasi	
	i) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
2	Sekretariat DPRD	
3	Inspektorat	
4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	a) UPTD Dispen Kecamatan Long Apari	
	b) UPTD Dispen Kecamatan Long Pahangai	
	c) UPTD Dispen Kecamatan Long Bagun	
	d) UPTD Dispen Kecamatan Laham	
	e) UPTD Dispen Kecamatan Long Hubung	
5	Dinas Kesehatan	
	a) Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu	
	b) Rumah Sakit Datah Dave	
	c) Puskesmas Tiong Ohang	
	d) Puskesmas Long Pahangai	
	e) Puskesmas Ujoh Bilang	
	f) Puskesmas Laham	
	g) Puskesmas Long Hubung	
6	Dinas Pekerjaan Umum	
	a) UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	
	b) UPTD Air Minum	
7	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	
8	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
9	Dinas Perhubungan	





No	Instansi	Keterangan
10	Dinas Lingkungan Hidup	
11	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu	
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	
13	Dinas Komunikasi & Informatika, Statistik & Persandian	
14	Dinas Pariwisata & Pemuda Olahraga	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung	
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah	
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
18	Badan Pendapatan Daerah	
19	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	
20	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
22	Badan Pengelola Perbatasan	
23	Satuan Polisi Pamong Praja	
24	Kecamatan Long Apari	
25	Kecamatan Long Hubung	
26	Kecamatan Long Bagun	
27	Kecamatan Laham	
28	Kecamatan Long Pahangai	

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kab. Mahakam Ulu

Daftar susunan organisasi masing-masing perangkat daerah Pelaksana Urusan Wajib dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.8  
Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib

No	Urusan Wajib	Nama Perangkat Daerah
1	2	3
	<b>Pelayanan Dasar:</b>	
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	<b>Non Pelayanan Dasar:</b>	
7	Tenaga Kerja	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Pertanahan	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
11	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung



No	Urusan Wajib	Nama Perangkat Daerah
1	2	3
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Perhubungan	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
17	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam)
18	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
19	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
21	Persandian	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
22	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Perpustakaan	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
24	Kearsipan	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Daftar susunan organisasi masing-masing perangkat daerah Pelaksana Urusan Pilihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9  
Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pilihan



No	Urusan Pilihan	Nama Perangkat Daerah
1	2	3
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Perdagangan	Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam)
5	Perindustrian	Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam)
6	Transmigrasi	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Daftar susunan organisasi masing-masing perangkat daerah Pelaksana Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10  
Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penunjang

No	Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Nama Perangkat Daerah
1	2	3
1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
2	Keuangan	1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3	Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



No	Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Nama Perangkat Daerah
1	2	3
5	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
6	Pengawasan	Inspektorat
7	Fungsi Penunjang Lainnya	1. Sekretariat DPRD 2. Sekretariat Daerah 3. Kecamatan Long Apari 4. Kecamatan Long Pahangai 5. Kecamatan Long Bagun 6. Kecamatan Laham 7. Kecamatan Long Hubung

### 3. Pegawai Pemerintah

#### 1) Urusan Pendidikan

##### a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1			-	-	1	
Eselon 3	14	-	-	-	-	-	-	-	14			-	-	14	0	
Eselon 4	8	-	-	-	4	-	-		2	-				6	1	
Staf PNS	0	-	-	-	-	-	-	2	5				5	3	1	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>1</b>		<b>-</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	

##### b. Sekolah – sekolah :

##### (1) SDN 01 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	





Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	7	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	1	5	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

(2) SDN 02 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	5	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	3	1	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

(3) SDN 03 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	6	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	3	3	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>



SDN 04 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	5	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	1	3	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

(4) SDN 05 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	4	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	3	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

(5) SDN 06 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Staf PNS	4	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	3	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

(6) SDN 07 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

(7) SDN 08 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	4	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

(8) SDN 09 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV



Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	3
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>3</b>

(9) SD 10 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>4</b>	-

(10) SDN 11 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	-



(11) SDN 12 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

(12) SDN 01 Long Pahangai

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	5	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

(13) SDN 02 Long Pahangai

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Staf PNS	7	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	3	4	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-</b>

(14) SDN 03 Long Pahangai

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

(15) SDN 04 Long Pahangai

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	9	-	-	-	3	-	1	-	5	-	-	-	1	8	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

(16) SDN 05 Long Pahangai

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV



Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	6	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	2	4	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>-</b>

(17) SDN 06 Long Pahangai

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	2	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

(18) SDN 07 Long Pahangai

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	6	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	4	2	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>



(19) SDN 08 Long Pahangai

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	6	-	-	-	3	-	1	-	2	-	-	-	3	2	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

(20) SDN 01 Long Apari

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

(21) SD 02 Long Apari

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	6	-	-	-	3	-	1	-	2	-	-	-	3	3	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

(22) SDN 03 Long Apari

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	4	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	3	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

(23) SDN 04 Long Apari

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	4	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	3	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

(24) SDN 05 Long Apari



NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

(25) SDN 01 Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

(26) SDN 02 Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	8	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	8	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>Total</b>	<b>9</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>7</b>	-	-	-	-	<b>8</b>	-
--------------	----------	---	---	---	---	---	----------	---	----------	---	---	---	---	----------	---

(27) SDN 03 Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	6	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	1	4	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

(28) SDN 04 Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	5	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	2	1	2
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

(29) SDN 05 Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	-

(30) SDN 06 Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	-

(31) SDN 07 Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	6	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	2	4	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>5</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>4</b>	-

(32) SDN 08 Long Hubung



NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	-

(33) SDN 10 Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	4	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	2	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>3</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	-

(34) SDN 01 Laham

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>Total</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>4</b>	-
--------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	---

(35) SDN 02 Laham

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	2	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

(36) SDN 03 Laham

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-

(37) SDN 04 Laham

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-

(38) SMP 01 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	13	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	13	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>13</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>12</b>	-	-	-	-	<b>13</b>	-

(39) SMP 02 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>10</b>	-	-	-	-	<b>10</b>	-

(40) SMP 03 Long Bagun



NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	10	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	1	9	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>9</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>9</b>	-

(41) SMP 04 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	7	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>8</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8</b>	-	-	-	-	<b>7</b>	<b>1</b>

(42) SMP 05 Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-



TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>12</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12</b>	-	-	-	-	<b>12</b>

(43) SMP 01 Long Pahangai

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	11	-	-	-	1	-	-	-	9	1	-	-	1	9	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>9</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

(44) SMP 02 Long Pahangai

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>9</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>9</b>	-	-	-	-	<b>9</b>	-

(45) SMP 01 Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV





Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	11	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	10	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	<b>10</b>	<b>1</b>

(46) SMP 02 Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	12	-	-	-	-	1	-	-	11	-	-	-	1	11	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>12</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>11</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>11</b>	-

(47) SMP 03 Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5</b>	-	-	-	-	<b>5</b>	-



(48) SMP 04 Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>11</b>	-	-	-	-	<b>11</b>	-

(49) SMP 01 Laham

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>8</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8</b>	-	-	-	-	<b>8</b>	-

(50) SMP 02 Laham

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Staf PNS	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>11</b>	-	-	-	-	<b>11</b>	-

(51) SMP 01 Long Apari

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT				
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>10</b>	-	-	-	-	-	<b>10</b>	-

(52) TK Negeri Pembina Kecamatan Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT				
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-



(53) UPTD Kecamatan Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
Staf PNS	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

(54) UPTD Kecamatan Long Pahangai

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Staf PNS	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

(55) UPTD Kecamatan Laham

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Staf PNS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1



TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>3</b>

(56) UPTD Kecamatan Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Staf PNS	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>

(57) UPTD Kecamatan Long Apari

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Staf PNS	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>



## 2) Urusan Kesehatan

### a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 3	6	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	6
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	30	-	-	-	1	-	-	11	17	2	-	-	-	30	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>6</b>

### b. Puskesmas-puskesmas :

#### (1) PKM Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	37	-	-	-	1	-	-	25	11	-	-	-	14	23	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>-</b>

#### (2) PKM Long Pahangai

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	32	-	-	-	4	-	-	20	7	1	-	-	16	16	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>32</b>	-	-	-	<b>4</b>	-	-	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	-	-	<b>16</b>	<b>16</b>	-

(3) PKM Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	28	-	-	-	2	-	-	20	4	2	-	-	15	13	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>28</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	<b>20</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>5</b>	<b>13</b>	-

(4) PKM Long Apari

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Staf PNS	24	-	-	-	-	-	-	20	4	-	-	-	18	6	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>25</b>	-	-	-	-	-	-	<b>21</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>9</b>	<b>7</b>	-





(5) PKM Laham

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	19	-	-	-	-	-	-	16	2	1	-	-	9	10	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>-</b>

c. Rumah Sakit

(1) Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	43	-	-	-	-	-	-	28	14	1	-	-	22	21	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>-</b>

(2) Rumah Sakit Pratama Nawacita Datar Davai

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Staf PNS	43	-	-	-	-	-	-	-	26	17	-	-	-	23	20	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>43</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>26</b>	<b>17</b>	-	-	-	<b>23</b>	<b>20</b>	-

### 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Staf PNS	9	-	-	-	-	-	-	2	6	1	-	-	2	7	-	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>11</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	-	-	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	

### 4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Staf PNS	7	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	1	6	-	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>8</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>7</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>7</b>	-	



5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	2
Eselon 4	6	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	6	-
Staf PNS	6	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	4	2	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

6) Urusan Sosial

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 3	6	-	-	-	-	-	-	2	4	2	-	-	-	5	1
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	10	-	-	-	1	-	-	4	5	-	-	-	6	4	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

7) Urusan Ketenagakerjaan

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-



Staf PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-

### 8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	10	-	-	-	1	-	-	4	5	-	-	-	2	8	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>8</b>	<b>1</b>

### 9) Urusan Pangan

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	5	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	3	2
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	28	-	-	-	8	-	-	1	19	-	-	-	7	21	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>33</b>	-	-	-	<b>8</b>	-	-	-	<b>21</b>	<b>3</b>	-	-	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>2</b>

### 10) Urusan Pertanahan

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
-----------------	-------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--



	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-

### 11) Urusan Lingkungan Hidup

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 3	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2
Eselon 4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
Staf PNS	12	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	1	11	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>18</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>3</b>

### 12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1
Eselon 4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
Staf PNS	8	-	-	-	-	1	-	-	6	1	-	-	1	7	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>11</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>



13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Eselon 3	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	1
Eselon 4	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-
Staf PNS	9	-	1	-	1	-	-	1	6	-	-	-	2	7	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	-	-	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>

15) Urusan Perhubungan

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1
Eselon 4	7	-	-	-	2	-	-	2	2	1	-	-	-	7	-
Staf PNS	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-



TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>13</b>	-	-	-	<b>5</b>	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-	-	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18) Urusan Penanaman Modal

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV



Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Eselon 3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	
Eselon 4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
Staf PNS	5	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	1	4	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>9</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>7</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Eselon 4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Staf PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	-

20) Urusan Statistik

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Eselon 4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Staf PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	-





21) Urusan Persandian

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-

22) Urusan Kebudayaan

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	-

23) Urusan Perpustakaan

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24) Urusan Kearsipan

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Staf PNS	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	

25) Urusan Perikanan

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Staf PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	

26) Urusan Pariwisata

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>3</b>	<b>1</b>

27) Urusan Pertanian

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Staf PNS	13	-	-	-	4	-	-	-	9	-	-	-	4	9	-	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>14</b>	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	<b>9</b>	<b>1</b>	-	-	<b>4</b>	<b>10</b>	-	

28) Urusan Perdagangan

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Staf PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

29) Urusan Perindustrian



NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 30) Urusan Transmigrasi

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-

### 31) Fungsi Penunjang Lainnya :

#### a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 3	4	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	3	1
Eselon 4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-



Staf PNS	9	-	-	-	2	-	-	1	3	3	-	-	1	8	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	-	-	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>2</b>

**b. Badan Pendapatan Daerah**

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 3	4	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2	2
Eselon 4	5	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	2	-
Staf PNS	8	-	-	-	3	-	-	2	2	1	-	-	2	6	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>18</b>	-	-	-	<b>3</b>	-	-	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	-	-	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

**c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 3	5	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	4	1
Eselon 4	6	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	6	-
Staf PNS	12	-	-	-	3	-	-	-	6	3	-	-	3	9	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>24</b>	-	-	-	<b>3</b>	-	-	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	-	-	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>1</b>

**d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV



Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1
Eselon 4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
Staf PNS	16	-	-	-	2	-	-	-	13	1	-	-	2	14	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>3</b>

**e. Inspektorat**

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eselon 3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Staf PNS	21	-	-	-	1	-	-	2	9	9	-	-	3	18	-	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	

**f. Sekretariat Daerah**

**(1) Bagian Pemerintahan**

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Staf PNS	6	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	6	-	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



<b>Total</b>	<b>7</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>6</b>	<b>1</b>
--------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	----------	---	---	---	----------	----------

(2) **Kesejahteraan Rakyat**

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT				
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Eselon 4	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	
Staf PNS	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>5</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>3</b>	<b>2</b>	

(3) **Bagian Ekonomi dan Pembangunan**

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	5	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	1	4	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

(4) **Bagian Hukum**

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1



Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	5	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	4	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

(5) **Bagian Humas dan Protokol**

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
Eselon 4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Staf PNS	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>5</b>	<b>4</b>

(6) **Bagian Organisasi dan Tata Laksana**

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Eselon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf PNS	4	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	4	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>4</b>	<b>1</b>

(7) **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**





NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Eselon 4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Staf PNS	5	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	4	-	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	

(8) Bagian Pengelola Perbatasan Negara

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Eselon 3	4	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	3	
Eselon 4	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	
Staf PNS	4	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	

g. Sekretariat DPRD

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eselon 3	4	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4	
Eselon 4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
Staf PNS	10	-	-	-	3	-	-	-	6	1	-	-	3	7	-	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



<b>Total</b>	<b>15</b>	-	-	-	<b>3</b>	-	-	-	<b>9</b>	<b>3</b>	-	-	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
--------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	---	----------	----------	---	---	----------	----------	----------

**h. Kecamatan-kecamatan :**

1. Kecamatan Long Apari

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Eselon 4	7	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	7	-	
Staf PNS	4	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>12</b>	-	-	-	<b>5</b>	-	-	-	<b>6</b>	<b>1</b>	-	-	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	

2. Kecamatan Long Pahangai

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
Eselon 4	5	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	5	-	
Staf PNS	20	-	-	-	19	-	-	-	1	-	-	-	14	6	-	
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>26</b>	-	-	-	<b>21</b>	-	-	-	<b>5</b>	-	-	-	<b>14</b>	<b>12</b>	-	

3. Kecamatan Long Bagun

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Eselon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 4	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
Staf PNS	7	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	1	6
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	<b>6</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>9</b>

#### 4. Kecamatan Laham

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Eselon 4	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1
Staf PNS	7	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	5	2	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11</b>	-	-	-	<b>5</b>	-	-	-	<b>6</b>	-	-	-	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

#### 5. Kecamatan Long Hubung

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Eselon 4	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	-
Staf PNS	11	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	4	7	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>15</b>	-	-	-	<b>9</b>	-	-	<b>1</b>	<b>5</b>	-	-	-	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>



### F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Adapun alokasi dan realisasi anggaran yang dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.11

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Per  
Urusan Pemerintahan Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
5	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.159.291.622.652,00</b>	<b>1.716.184.315.493,57</b>	<b>79,48</b>
5.1	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>	1.229.337.483.331	993.218.778.844,57	<b>80,79</b>
5.1.01	Pendidikan	202.441.998.640	167.957.414.064,00	82,97
5.1.02	Kesehatan	156.419.155.128	137.865.455.754,57	88,14
5.1.03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	801.969.438.850	635.891.427.422,00	79,29
5.1.04	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	6.410.868.600	4.527.987.950,00	70,63
5.1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	44.764.311.034	37.905.585.306,00	84,68
5.1.06	Sosial	17.331.711.079	9.070.908.348,00	52,34
5.2	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>	167.209.056.630	141.667.822.675,00	84,72
5.2.07	Tenaga Kerja			
5.2.08	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.356.665.900	1.656.546.682,00	70,29



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
5.2.09	Pangan	1.581.936.900	1.406.025.180,00	88,88
5.2.11	Lingkungan Hidup	18.143.037.774	16.041.615.410,00	88,42
5.2.12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.485.663.510	9.800.450.953,00	93,47
5.2.13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	24.748.217.855	22.375.105.173,00	90,41
5.2.14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.882.287.000	3.727.370.764,00	76,34
5.2.15	Perhubungan	37.253.643.792	28.133.119.399,00	75,52
5.2.16	Komunikasi & Informatika	42.292.177.406	38.435.335.285,00	90,88
5.2.18	Penanaman Modal	11.474.363.505	8.778.219.705,00	76,50
5.2.19	Kepemudaan Dan Olahraga	7.560.357.588	5.647.916.430,00	74,70
5.2.20	Bidang Statistik	1.114.880.000	1.040.221.299,00	93,30
5.2.21	Bidang Persandian	1.021.754.000	1.016.026.086,00	99,44
5.2.22	Bidang Kebudayaan	4.294.071.400	3.609.870.309,00	84,07
5.2.23	Perpustakaan			
	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>	61.350.573.031	41.879.449.475,00	68,26
5.3.25	Kelautan Dan Perikanan	1.902.736.500	1.208.075.161,00	63,49
5.3.26	Pariwisata	16.271.662.385	8.222.484.954,00	50,53
5.3.27	Pertanian	43.176.174.146	32.448.889.360,00	75,15
5.3.28	Kehutanan			
5.3.29	Energi Dan Sumber Daya Mineral			



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
5.3.31	Perindustrian			
<b>5.4</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>	214.441.903.347	171.847.870.920,00	80,14
5.4.01	Sekretariat Daerah	160.763.316.816	124.550.809.037,00	77,47
5.4.02	Sekretariat DPRD	53.678.586.531	47.297.061.883,00	88,11
<b>5.5</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	172.892.952.814	134.394.203.075,00	77,73
5.5.01	Perencanaan	40.079.639.133	28.635.123.339,00	71,45
5.5.02	Keuangan	95.187.007.659	71.986.412.208,00	75,63
	Bappenda	11.881.259.995	10.498.732.351,00	88,36
	BPKAD	83.305.747.664	61.487.679.857,00	73,81
5.5.03	Kepegawaian	18.329.583.363	16.166.541.345,00	88,20
5.5.04	Pendidikan Dan Pelatihan	1.072.320.200	1.037.042.129,00	96,71
5.5.05	Penelitian Dan Pengembangan	10.440.940.600	9.014.615.255,00	86,34
5.5.06	Pengelolaan Perbatasan Daerah	7.783.461.859	7.554.468.799,00	97,06
<b>5.6</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>	15.548.465.721	11.331.697.013,00	72,88
5.6.01	Inspektorat	15.548.465.721	11.331.697.013,00	72,88
5.7	Unsur Kewilayahan	30.411.786.890	27.120.573.767,00	89,18
5.7.1	Kecamatan Long Apari	6.144.520.896	5.406.594.667,00	87,99
5.7.2	Kecamatan Long Pahangai	6.956.262.282	6.685.031.677,00	96,10
5.7.3	Kecamatan Long Bagun	5.706.495.021	4.351.968.647,00	76,26
5.7.4	Kecamatan Laham	5.924.855.409	5.324.794.328,00	89,87
	Kecamatan Long Hubung	5.679.653.282	5.352.184.448,00	94,23
<b>5.8</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>	31.018.378.304	29.289.633.988,00	94,43
5.8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	31.018.378.304	29.289.633.988,00	94,43

Sumber : BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu (data tarikan sementara/un-audited)



Adapun program kegiatan yang terdapat pada masing-masing urusan di perangkat daerah adalah sebagai berikut:

## **Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**

### **1. Pendidikan**

#### **a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**b. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU\
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD





- Pengadaan Perlengkapan PAUD
- Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- Pengelolaan Dana BOP PAUD
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

**c. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

**d. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**



- Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota

## **2. Kesehatan**

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Peningkatan Pelayanan BLUD
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 

## **2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Pengembangan Rumah Sakit
- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
- Pengadaan Obat, Vaksin
- Pengadaan Bahan Habis Pakai
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan



- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional



- Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- Operasional Pelayanan Puskesmas
- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

### **3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### **4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**

- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

### **3. Pekerjaan Umum, Penataan Ruang**

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN



- Tambahannya Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Tambahannya Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penataan Organisasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- 

**2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

**3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
- 

**4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota





- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

●

**5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**

- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

**6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

**7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**

- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- Penataan Bangunan dan Lingkungan

**8. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Pembangunan Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan

**9. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**



- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

**5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penataan Organisasi
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah



## **2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
- 

## **3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**



- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- Investigasi Kejadian Kebakaran
- Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

#### **4. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota



- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

## **6. Sosial**

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material



- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penataan Organisasi
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

## **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

- Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
- Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

## **3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat Bantu
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,



Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

**4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

**5. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

**6. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**





- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **7. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

#### **8. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



- Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **9. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### **10. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **7) Urusan Tenaga Kerja**

-

#### **8) Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Program PengarusUtamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan



- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- 2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Perlindungan Khusus Anak
  - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

## 9) Urusan Pangan

1. **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**
  - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2. **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**
  - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
  - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
  - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal



- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- 

### **3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**

- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- 

### **4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

## **10) Urusan Pertanahan**

### **1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

- Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

### **2. Program Penatagunaan Tanah**



- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

## 11) Urusan Lingkungan Hidup

### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**

- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

## **3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

## **4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota



- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- 5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**
- Penyimpanan Sementara Limbah B3
  - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
  - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
- 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**
- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
  - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**



- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

#### **8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

- Pengelolaan Sampah
- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

#### **9. Program Pengelolaan Persampahan**

- Pengelolaan Sampah
- Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

### **12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN





- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penataan Organisasi
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

## 2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk



- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- Penataan Pendaftaran Penduduk
- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
- Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

### **3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL**

- Pelayanan Pencatatan Sipil
- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
- Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
- Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

### **4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

- Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
- Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

### **13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat



- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENATAAN DESA

- Penyelenggaraan Penataan Desa
- Fasilitasi Tata Wilayah Desa
- Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

## 3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

## 4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa



- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

#### **14) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga



## 15) Urusan Perhubungan

### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
- Penataan Organisasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- 

## **2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

- Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

## **3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**

- Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

### **16) Urusan Komunikasi dan Informatika**

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**



- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**

- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota





- Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

#### **4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- Membangun Metadata Statistik Sektoral

#### **5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**17) Urusan Koperasi dan UKM**

-

**18) Urusan Penanaman Modal**

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

## **3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota



- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

#### **4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

#### **5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

#### **6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



## 19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

### 1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

- Penyiapan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

●

### 2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- Standardisasi Organisasi Keolahragaan
- Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

●

### 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

## 20) Urusan Statistik



**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

**21) Urusan Persandian**

**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**22) Urusan Kebudayaan**

**1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**

- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- 

**2. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

- Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

**23) Urusan Perpustakaan**

-

**24) Urusan Kearsipan**



**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

**25) Urusan Perikanan**

**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

**2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**

- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan kecil

**26) Urusan Pariwisata**

**1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**

- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
- Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera



- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

## **2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**

- Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata

### **27) Urusan Pertanian**

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD





- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. PPROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
  - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
  - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
  -
- 3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**
- Pengembangan Prasarana Pertanian
  - Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
  - Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum
- 4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**
- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
  - Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
  - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner



- 5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**
    - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
    - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 6. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**
    - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 7. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**
    - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- 
- 28) Urusan Kehutanan**
    -
  - 29) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**
    -
  - 30) Urusan Perdagangan**
    -
  - 31) Urusan Perindustrian**
    -
  - 32) Urusan Transmigrasi**
    -
  - 33) Urusan Fungsi Penunjang**
    - a. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)**



**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

**3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
  - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
  - Pelaksanaan Konsultasi Publik
  - Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
  - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
  - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
  - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
  - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 8. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**



- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

**9. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

**10. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian



## **11. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

### **b. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)**

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
  - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

### **c. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)**

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**



- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**8. Penataan Organisasi**

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

**9. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengelolaan Data Kepegawaian
- Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

**10. Mutasi dan Promosi ASN**

- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

**11. Pengembangan Kompetensi ASN**

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN





- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
- Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional

## **12. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
- Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

### **d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)**

#### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD



3. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
  - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

**10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah



- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 12. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 13. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**
- Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
  - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 14. Pengelolaan Barang Milik Daerah**
- Penyusunan Standar Harga
  - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
  - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah
  - Inventarisasi Barang Milik Daerah
  - Pengamanan Barang Milik Daerah
  - Penilaian Barang Milik Daerah
  - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
  - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
  - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah



e. **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)**

1.1.2 **Perencanaan Pembangunan Daerah**

A. **Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah**

2. **Permasalahan Umum**

Setiap daerah pasti menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah bersifat dinamis, baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal terlebih pada Kabupaten baru seperti Mahakam Ulu ini yang baru berusia 8 (delapan) tahun sejak ditetapkan pembentukannya pada 11 Januari 2013 melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Terdapat 6 (enam) permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum maksimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan	Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur jalan	Kondisi Geografis Kabupaten Mahakam Ulu membuat kesulitan dalam pembukaan lahan untuk membuka akses desa-desa yang masih terisolasi



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	teknologi informasi		Kemampuan sumber daya yang sangat terbatas, terutama sumber daya keuangan menjadikan program peningkatan kualitas jalan Kabupaten menjadi lambat.	
			Kurangnya ketersediaan alat pendukung pelaksanaan pekerjaan dan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang memadai untuk pelaksanaan pekerjaan percepatan perbaikan infrastruktur jalan.	
		Belum maksimalnya pemenuhan listrik yang stabil selama 24 jam		Peta persebaran populasi penduduk yang berjauhan jarak satu dengan lainnya, sehingga penyediaan listrik PLN membutuhkan biaya yang besar
				Kurangnya kapasitas pembangkit tenaga listrik yang ada
				Tingginya biaya untuk menggunakan alternatif tenaga listrik lainnya
		Belum tersedianya jaringan air bersih ke rumah warga		Faktor geografis menyebabkan terhambatnya pembuatan jaringan air bersih
				Belum adanya PDAM/sejenisnya yang dapat menyuplai air bersih ke seluruh wilayah Mahakam Ulu.
				Kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu menyebabkan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih rendanya Aksesibilitas telekomunikasi dan internet	<p>tidak meratanya kemampuan aksesibilitas desa-desa untuk mengakses internet</p> <p>Operator seluler yang berorientasi bisnis membutuhkan kepastian dari sisi bisnis untuk masuk ke Mahakam Ulu</p> <p>Belum stabilnya listrik dari PLN, mengakibatkan tower sinyal yang ada tidak bisa bekerja dengan maksimal</p>
2	Rendahnya Pertumbuhan ekonomi, di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sebesar -0,67 (Sumber: BPS Prov. Kaltim)	Pertumbuhan ekonomi yang rentan, nilai tambah yang rendah dan ekonomi biaya tinggi ( <i>high cost economy</i> )	<p>Terbatasnya aksesibilitas ke dan dari Mahakam Ulu sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi (<i>high cost economy</i>)</p> <p>Perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (74,40%) dengan tingkat nilai tambah yang relatif rendah.</p> <p>Harga komoditas perkebunan dan pertambangan yang cenderung tidak stabil dan sangat tergantung pada permintaan ekspor.</p> <p>Pembangunan yang tidak merata menyebabkan perputaran ekonomi berada dalam wilayah yang sudah dibangun saja</p> <p>Pekerjaan masyarakat Mahakam Ulu lebih banyak di</p>





No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			sektor pertanian yang hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah, bukan untuk diperjualbelikan
3	Masih tingginya Angka kemiskinan, per tahun 2020 sebesar 11,44% (Sumber: BPS Prov. Kaltim)	Kurangnya sumber-sumber penghasil ekonomi masyarakat	<p>Rata-rata pengeluaran penduduk miskin jauh dari garis kemiskinan dan ada ketimpangan tinggi pengeluaran diantara penduduk miskin. Hal ini terlihat dari Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan yang tinggi pada tahun 2020.</p> <p>Ekonomi biaya tinggi yang disebabkan oleh tingginya biaya transpor ke dan dari Mahakam Ulu, sehingga harga barang di Mahulu menjadi mahal dan barang dari Mahulu relatif rendah (<i>bargaining position</i> yang rendah);</p> <p>Masih terbatasnya sarana dan prasarana publik</p> <p>Belum optimalnya pengembangan usaha pada sektor produktif</p>
		Bidang pertanian yang menjadi sektor primer perekonomian mahakam ulu, belum bisa memberikan kesejahteraan kepada para petani dan masyarakat lebih luas	<p>Pertanian dilakukan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah sehingga hasilnya minim untuk perdagangan</p> <p>Pola bercocok tanam yang cenderung masih tradisional (berpindah-pindah) dan tergantung pada hasil hutan;</p>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Walaupun Presentase pengangguran terendah se Kalimantan Timur (3,48% per tahun 2020), masih ada 525 penduduk usia angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan dari Jumlah Penduduk sebanyak 35.010 per tahun 2020 (sumber: Buku Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Angka 2021)	Kurangnya balai pelatihan untuk melatih para pencari kerja guna meningkatkan SDM Terbatasnya Lapangan pekerjaan
4	Masih Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai IPM pada tahun 2020 menempati peringkat terendah se Kalimantan Timur; 67,09 (Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur)	Rendahnya angka rata-rata lama sekolah  Persentase guru bersertifikasi  Rendahnya umur harapan hidup	Faktor ekonomi masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan sehingga anak usia sekolah harus ikut membantu orangtua bekerja setiap harinya di jam sekolah  Kondisi geografis Mahakam ulu menjadi kendala masyarakat mengakses pendidikan  Kurang nya guru yang memiliki sertifikat pendidikan  Kurangnya prasarana dan sarana kesehatan  Terbatasnya fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan yang berkualitas  Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih
5	Masih Rendahnya Indeks	Belum optimalnya pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan	Minimnya penyediaan dan publikasi data dan informasi sektoral yang dapat digunakan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kepuasan Masyarakat	daerah yang bersih dan akuntabel dalam mewujudkan Reformasi birokrasi	untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi.  Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur terutama aparatur dalam pelayanan publik
6	Ancaman terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup	Sebagian besar masyarakat menjadikan sungai tempat pembuangan limbah (sampah dan MCK)	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan tempat pembuangan sampah dan MCK dikarenakan kebiasaan membuang limbah kesungai yang sudah terjadi turun temurun
		Pencemaran sungai dari aktivitas penambangan emas rakyat yang tidak terkontrol/tidak terbina	Kurangnya Koordinasi dan pengawasan dalam penegakan hukum bagi penambang ilegal yang merusak lingkungan  Kurangnya penyuluhan dan pendekatan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan teknologi terhadap penambang emas

Sumber : Analisis Tim Pokja RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026

### 3. Permasalahan Khusus

#### a. Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

##### 1) Urusan Pendidikan

- Cakupan dan kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum optimal;
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan masih rendah;



- Kompetensi dan kuantitas tenaga pendidik masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi; Faktor ekonomi masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan, sehingga anak usia sekolah harus ikut membantu orangtua bekerja setiap harinya di jam sekolah;
- Jangkauan wilayah penduduk dan lokasi sekolah yang berjauhan dan beberapa wilayah tidak terdapat transportasi darat;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
- Tingginya biaya transportasi (akses dari rumah menuju sekolah);
- Jangkauan sarana pendidikan yang masih terbatas;
- Ketersediaan akses masyarakat terhadap jenjang pendidikan tinggi, masih belum memadai;
- Kemampuan penyediaan kualifikasi pendidikan terhadap kebutuhan keilmuan tertentu di daerah belum optimal.

## 2) **Urusan Kesehatan**

- Kurangnya jumlah dan mutu SDM kesehatan;
- Lemahnya manajemen dan kontrol dalam Sistem Pelayanan Kesehatan;
- Distribusi obat yang masih terkendala dengan situasi geografis karena belum ada akses darat;
- Belum terakreditasinya puskesmas secara menyeluruh;
- Penyediaan obat-obatan yang masih kurang optimal bahkan sering terjadi kekosongan obat;
- Penyakit-penyakit berbasis lingkungan seperti penyakit Demam Berdarah (DBD), Diare, Malaria, Tuberkulosis, ISPA dan Hepatitis belum



mengalami penurunan dan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun.

### 3) Rumah Sakit Umum Daerah

- Status Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu saat ini klasifikasi tipe Pratama sesuai PMK 24 tahun 2014 sehingga jenis pelayanan yang diberikan masih terbatas karena dianggap setara dengan puskesmas;
- Masih rendahnya Jasa Pelayanan yang diterima oleh tenaga medis dengan spesialisik khusus dikarenakan salah satunya Jasa Pelayanan BPJS dalam bentuk kapitasi bukan pengklaiman INACBGs. Hal ini membuat kurangnya minat tenaga dokter spesialis untuk melamar ke RSP. GSM;
- Penggajian dokter spesialis yang belum sesuai standar IDI tahun 2013 juga menyebabkan kurangnya minat tenaga dokter spesialis untuk melamar ke RSP. GSM;
- Bangunan fisik RS. Pratama Gerbang Sehat Mahulu dibangun tidak mengikuti standarisasi khusus bangunan rumah sakit berdasarkan PMK RI Nomor 24 Tahun 2016;
- Sarana dan prasarana penunjang serta ijin operasional ruang Radiologi yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat dioptimalkan;
- Belum tersedianya tenaga ahli, khususnya tenaga dengan kompetensi khusus seperti ATEM (Ahli Tehnik Elektro Medik);
- Belum tersedianya ruangan khusus untuk pemularasan jenazah, ruang CSSD, ruang



pemulihan post tindakan operasi, ruang isolasi khusus dan lain-lain;

- Adanya ketidaksesuaian antara klasifikasi tipe RS dengan formasi kepegawaian yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah, sehingga membuat rancu dalam penggunaan tenaga yang ada dengan regulasi yang berlaku. Contoh terkait pelayanan Rehabilitasi Medik dengan tenaga fisioterapis, berdasarkan PMK yang ada belum menjadi pelayanan yang prioritas sehingga menjadi salah satu penghambat dalam pemenuhan sarana prasarana untuk pelayanan rehabilitasi medik;
- Pemanfaatan ruang perawatan digunakan sebagai gedung perkantoran, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya tempat untuk kegiatan manajemen dan administrasi rumah sakit;
- Tidak tersedianya sumber air bersih di lingkungan rumah sakit;
- Sistem pengelolaan limbah medis yang belum memadai, hal ini disebabkan karena : tidak adanya pihak ke III dalam pengelolaan limbah dan belum ada regulasi terkait ijin penggunaan alat *incenerator* di RS belum jelas serta belum dilakukannya survei dampak lingkungan oleh lintas terkait;
- Anggaran RS. Pratama Gerbang Sehat Mahulu sampai dengan saat ini masih menempel pada OPD Induk (Dinas Kesehatan, P2KB) Kabupaten Mahakam Ulu;
- Lahan RS. Pratama Gerbang Sehat Mahulu banyak dipatok oleh masyarakat tanpa pemberitahuan.



#### **4) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- Belum tersedianya akses jalan dan jembatan yang memadai untuk menghubungkan antar wilayah.
- Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat sangat tinggi. Baru terdapat 2 (dua) kampung dengan aliran listrik stabil 24 jam, selebihnya masih 12 (dua belas) jam.
- Kurangnya ketersediaan alat pendukung pelaksanaan pekerjaan dan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang memadai untuk pelaksanaan pekerjaan percepatan perbaikan infrastruktur jalan.
- Masih lemahnya pengendalian internal sehingga kualitas pengerjaan juga menjadi persoalan yang perlu dicermati. Kondisi alam/cuaca yang tidak menentu menyebabkan arus suplai bahan baku untuk infrastuktur terganggu.
- Kondisi tanah yang tidak stabil menjadikan nilai guna infrastruktur jalan seringkali dibawah target yang diharapkan.
- Kurangnya anggaran jika di bandingkan dengan panjangnya perbaikan jalan dan jembatan di seluruh pelosok Mahakam Ulu.
- Peta persebaran populasi penduduk yang berjauhan jarak satu dengan lainnya menyebabkan penyediaan listrik PLN membutuhkan cost yang besar untuk menghubungkan listrik.

#### **5) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**



- Minimnya penyediaan sumber air bersih bagi Rumah Tangga;
- Belum tersedianya jaringan air bersih ke rumah-rumah warga;
- Pengembangan perumahan dan permukiman serta permukiman kumuh;
- Masih rendahnya utilitas prasarana sarana umum;
- Masih rendahnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

**6) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

- Peran serta dan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan termasuk lembaga adat guna terselenggaranya Ketenteraman dan ketertiban umum, proteksi kebakaran dan pencegahan bencana daerah di Kabupaten Mahakam Ulu;
- Terbatasnya sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas personil SAR, Pemadam Kebakaran, dan Pol PP;
- Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mentaati hukum masih relatif rendah, sehingga pelanggaran hukum dan tindakan main hakim sendiri serta kerusuhan cenderung meningkat;
- Penyediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan pembinaan Ketenteraman dan ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- Sarana dan prasarana dalam melakukan pengamanan, baik pengamanan kegiatan pejabat Negara maupun pengamanan tempat-tempat penting saat ini sangatlah tidak memadai.





## 7) Urusan Sosial

- Masih terdapat penduduk miskin dan kurang mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kab. Mahakam Ulu yang belum Mendapat Bantuan PKH dan pangan;
- Adanya Penduduk Miskin dan kurang mampu yang masih belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum mendapatkan bantuan;
- Adanya Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu yang mengalami Gangguan Psiko sosial dan terlantar yang membutuhkan penanganan kesehatan maupun penanganan sosial yang berkelanjutan;
- Adanya penduduk dari Daerah luar Kabupaten Mahakam Ulu yang mengalami masalah sosial dan terlantar sehingga perlu dikembalikan ke daerah asalnya;
- Adanya penduduk miskin dan kurang mampu Kabupaten Mahakam Ulu yang belum mendapat kan Bantuan iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari Pusat Maupun Provinsi Kalimantan Timur;
- Adanya veteran asal Kabupaten mahakam Ulu yang belum mendapatkan tali asih dari Pemda Mahakam Ulu;
- Masih terdapat Penyandang Disabilitas ringan yang membutuhkan pendampingan keterampilan kerja;
- Adanya Pemuda putus sekolah dan wanita rawan sosial ekonomi yang membutuhkan keterampilan kerja;



- Rendahnya pengetahuan dan pengalaman kerja bagi TKSK dan TKSM dalam mengolah data DTKS dan PMKS serta dalam melakukan pendampingan terkait PMKS;
- Masih adanya anak-anak tidak mampu, korban kekerasan, korban narkoba, korban pelecehan seksual yang memerlukan pendampingan ke Panti Sosial;
- Masih ada Penyandang Disabilitas, PMKS dan lanjut usia di Kabupaten Mahakam Ulu yang belum terdata.

#### **8) Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

- Belum terbangunnya Balai Latihan Kerja yang dilengkapi dengan fasilitas guna menyiapkan tenaga kerja mahakam ulu yang handal dan sesuai dengan kebutuhan pasar;
- Belum disusunnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang dapat menjadi dasar dalam pemberian upah;
- Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal;
- Sinkronisasi pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja belum selaras;
- Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;



- Lemahnya perbaikan perekonomian daerah untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

#### **9) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- Kurangnya pemahaman tentang strategi pengarusutamaan gender (PUG);
- Rendahnya pendapatan pekerja perempuan;
- Rendahnya tingkat pendidikan perempuan bekerja;
- Rendahnya pembangunan yang mengakomodir hak hak anak dan disabilitas.

#### **10) Urusan Pangan**

- Masih lemahnya PKS dan Penyuluh di tingkat Dinas dan Balai Penyuluhan Pertanian sehingga belum mampu mengubah mindset petani;
- Masih lemahnya system data dan perencanaan yang berdampak pada pengajuan dana pusat yang mengacu kepada Tata Ruang Wilayah dan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- Terbatasnya Lahan sawah yang memiliki irigasi setengah teknis dan teknis;
- Terbatasnya akses transportasi Jalan dan Jembatan yang berdampak pada ongkos angkut barang pertanian.

#### **11) Urusan Lingkungan Hidup**

- Ancaman terjadinya penurunan kualitas dan fungsi jasa lingkungan serta keanekaragaman hayati akibat aktivitas yang berpotensi terhadap terjadinya perusakan lingkungan;



- Pencemaran sungai dari aktivitas penambangan emas rakyat yang tidak terkontrol/tidak terbina;
- Sebagian besar masyarakat menjadikan sungai tempat pembuangan limbah (sampah dan MCK);
- Pemanfaatan jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara lestari.

#### **12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- Sarana dan prasarana gedung kantor dan perlengkapannya yang masih belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan yang sempurna, baik dari segi jumlah maupun kualitas;
- Jumlah pegawai yang masih sangat kurang;
- Keterampilan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu yang masih kurang, baik dalam penguasaan program maupun teknis;
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

#### **13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- Belum optimalnya pembinaan SDM pengelola pemerintah kampung;
- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Belum optimalnya administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan kampung.

#### **14) Urusan Perhubungan**



- Rendahnya tingkat keselamatan pada transportasi darat dan sungai;
- Minimnya fasilitas keselamatan transportasi;
- Minimnya infrastruktur lalin darat;
- Minimnya SDM khusus perhubungan.

#### **15) Urusan Komunikasi dan Informatika**

- Belum diterapkannya sistem Pemerintahan yang berbasiskan Elektronik (*E-Government*) dengan baik, sesuai dengan *Master Plan* Pembangunan *E-Government* yang telah ada;
- Kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu menyebabkan tidak meratanya kemampuan aksesibilitas desa-desa untuk mengakses internet;
- Informasi pembangunan daerah belum menyebar secara menyeluruh kepada masyarakat;
- Kurangnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi dengan baik;
- Kualitas sinyal yang kerap kali menjadi keluhan masyarakat serta lamanya perbaikan saat terjadi kerusakan ataupun gangguan sinyal;
- Ketersediaan operator seluler/vendor masih terbatas.

#### **16) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- Belum adanya kelembagaan UMKM;
- Belum adanya kelembagaan ekonomi dan keuangan yang memadai untuk membantu pengembangan kegiatan ekonomi di daerah;



- Orientasi bisnis masih ke sektor pertanian, sehingga belum terbuka pola pikir pengembangan ekonomi kreatif;
- Rendahnya minat berwirausaha masyarakat;
- Kurangnya pemahaman SDM tentang profesi pelaku ekraf, apresiasi pasar dan apresiasi terhadap budaya;
- Kurangnya kesediaan teknologi pendukung, material, SDM, Kemudahan Akses Pasar, dan Peran Komunitas;
- Kurangnya kreatifitas SDM dalam 16 sub sektor Ekraf;
- Belum terjalin kerjasama secara kontinyu antar pelaku ekraf dengan pemerintah maupun swasta;
- Penyerapan produk atas permintaan pasar masih minim;
- Promosi produk ekonomi kreatif yang masih belum optimal.

#### **17) Urusan Penanaman Modal**

- Jumlah aparat yang menguasai teknis perizinan relatif masih sangat sedikit;
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;
- Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan arti penting perizinan;
- Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat terbatas disebabkan akses dan promosi belum optimal;



- Kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar yang masih minim.

### **18) Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

- Kurangnya pembinaan pelatih dan peningkatan prestasi atlet yang berkesinambungan;
- Kurangnya fasilitas olahraga yang memadai;
- Kurangnya mutu tatakelola kelembagaan kepemudaan dan tenaga keolahragaan;
- Minimnya kompetisi olahraga tingkat daerah/kabupaten;
- Minimnya data lapangan mengenai sarana olahraga di seluruh wilayah kabupaten;
- Tidak dimilikinya data potensi atlet / bibit atlet;
- Kurangnya pemassalan olahraga ditengah masyarakat;
- Kurangnya pembinaan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi masyarakat;
- Kurangnya koordinasi antar program kepemudaan dan keolahragaan antara Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kabupaten;
- Minimnya SDM pada lembaga pemerintah yang membidangi Pemuda dan Olahraga.

### **19) Urusan Statistik**

- Kurang aktualnya data dan informasi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

### **20) Urusan Kebudayaan**

- Kurangnya dokumentasi terkait kebudayaan asli Mahakam Ulu;



- Masih minimnya penyelenggaraan event kebudayaan bertaraf nasional maupun internasional;
- Kurangnya dukungan (baik materil maupun non materil) terhadap pemerhati budaya, baik perseorangan maupun kelompok/lembaga.

### **21) Urusan Perpustakaan dan Kearsipan**

- Pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
- Lemahnya perbaikan kearsipan daerah.

### **22) Urusan Pariwisata**

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan daya tarik wisata pariwisata Kabupaten;
- Belum optimalnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- Belum baiknya pengelolaan destinasi pariwisata secara menyeluruh;
- Belum ada penetapan destinasi unggulan kabupaten;
- Kordinasi dan konsultasi terkait dengan pemasaran destinasi pariwisata belum optimal;
- Peningkatan kapasitas SDM pemasaran pariwisata belum sesuai;
- Masih minimnya pembinaan terhadap kelompok sadar wisata di tingkat kecamatan;
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pembuatan perizinan;





- Masih minimnya pengetahuan dan minat para pelaku usaha mengenai management usaha pariwisata;
- Minimnya minat dan pengetahuan para pelaku usaha mengenai asosiasi usaha pariwisata dan Informasi Jumlah Usaha;
- Masih minimnya pengetahuan mengenai sapa pesona dan sadar wisata dari para pelaku usaha jasa pariwisata;
- Belum ada pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi usaha jasa pariwisata;
- Belum ada pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan industri pariwisata.

### **23) Urusan Pertanian**

- Masih minimnya hasil produksi tanaman pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola modernisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- Masyarakat masih menganut sistem pertanian tradisional;
- Manajemen pengelolaan yang masih rendah pada usaha tanaman pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan;
- Rendahnya jumlah partisipan dalam usaha tanaman pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- Mahalnya biaya distribusi hasil pada usaha tanaman pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;



- Masih minimnya penganekaragaman bahan pangan di Mahakam Ulu;
- Rendahnya kualitas SDM petani yang cenderung didominasi pendidikan SMP;
- Pemasaran produk pertanian yang masih kurang;
- Minimnya peran subsektor di luar kehutanan.

#### **24) Urusan Transmigrasi**

- Kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum kuat dan belum maksimal;
- Perlunya penyiapan transmigran secara lahir batin, advokasi/pendampingan serta perlindungan;

#### **25) Urusan Kehutanan**

- Terus menurunnya kondisi hutan di Kabupaten Mahakam Ulu;
- Ancaman kebakaran hutan dan lahan, karena adanya kegiatan pembukaan lahan dan perladangan masyarakat dengan teknik tebas bakar;

#### **26) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

- Kegiatan *Good Mining Practice* (GMP) belum berjalan dengan baik;
- Informasi dan data detail potensi EBT masih sangat terbatas;
- Masih kurangnya suplai listrik.

#### **27) Urusan Penunjang Daerah**

- Terbatasnya sarana/prasarana untuk penyelenggaraan pemerintahan di semua level



(pemerintah kabupaten sampai pemerintah desa) yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik;

- Belum adanya peraturan daerah untuk implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- Belum optimalnya penerapan sistem evaluasi kinerja yang didukung dengan sistem insentif dan sanksi guna mendorong kinerja aparatur pemerintah yang efektif;
- Belum maksimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan;
- Terbatasnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap prosedur dalam pembentukan maupun perubahan OPD sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama tentang kewenangan dalam pemberi rekomendasi;
- Belum optimalnya kinerja pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang dikeluhkan masyarakat;
- Masih terpusatnya pelayanan pemerintah di ibu kota Kabupaten;
- Belum tersosialisasinya standar prosedur, standar waktu dan standar biaya dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten;
- Sistem Komunikasi dan Koordinasi dalam pelaksanaan kerja belum tercipta dengan baik;
- Keharmonisan antar umat beragama dan kerukunan hidup beragama masih perlu dijaga. advokasi/pendampingan serta perlindungan.



- Perlunya mendorong perilaku masyarakat untuk lebih saling menghormati/toleran antar pemeluk agama;
- Keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa masih perlu ditingkatkan;
- Pemahaman dan pengamalan ajaran belum maksimal;
- Perlunya peningkatan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ajaran agama;
- Meningkatkan sarana/prasarana keagamaan;
- Bercampurnya kepentingan politis dengan teknis terkadang dapat menghambat perencanaan dan teknis administrasi;
- Lemahnya monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan;
- Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai untuk menunjang kegiatan DPRD;
- Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang belum memadai;
- Kurangnya profesionalisme di tingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi;
- Kurang tertib penyampaian materi-materi Raperda dari eksekutif/legislatif untuk dibahas bersama, sehingga waktu pembahasan oleh DPRD/Pemerintah tidak maksimal;
- Kurang disiplinnya pimpinan dan anggota DPRD dalam menyelesaikan tugas dan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.



## 28) Urusan Pendukung Daerah

- Kurangnya koordinasi OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- Terlalu kuatnya intervensi hak budget DPRD;
- Terjadinya dominasi kebijakan kepala daerah atas kondisi masyarakat;
- Masih kurangnya kualitas SDM perencana di OPD;
- Belum optimalnya pemahaman aparat perencana terhadap nomenklatur penyusunan dokumen;
- Kurang berperan aktifnya OPD dalam monev perencanaan pembangunan;
- Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- Belum optimalnya pencapaian hasil evaluasi pembangunan daerah;
- Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Bappelitbangda dan OPD;
- Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas;
- Pengembangan *Hardware* dan *Software* tentang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah, kualitas jaringan komputer yang tersambung (*online*) dengan OPD Lingkup Kabupaten Mahakam Ulu masih perlu adanya peningkatan;
- Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya yang menunjang kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar, mendaftarkan dan merubah data PBB;



- Sumber sumber pendapatan yang belum tergali secara optimal;
- Masih terbatasnya SDM yang ada dalam mendukung kelembagaan;
- Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah khususnya yang menjadi kewenangan beberapa OPD Teknis;
- Terbatasnya kapasitas SDM dalam hal jumlah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi yang diisyaratkan;
- Masih kurangnya kualitas SDM guna memenuhi sumber daya aparatur yang profesional;
- Belum maksimalnya penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan analisis jabatannya;
- Masih ada OPD yang belum memahami mekanisme penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar;
- Belum tersusunnya studi/Penelahaan/penelitian sesuai kebutuhan perencanaan;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil Penelahaan sebagai dasar dalam implementasi kebijakan;
- Terbatasnya sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam pengawasan perbatasan, sehingga sering terjadi pencurian oleh Warga Negara Asing sumber daya alam Indonesia seperti kayu, Ikan dan yang lainnya;
- Bandara perintis di sekitar daerah perbatas perlu ditingkatkan guna mengangkut logistic bagi para penjaga perbatasan.
- Pos Lintas Batas Negara (PLBN) belum ada digaris batas dengan Negara Malaysia, sedangkan



Pasukan Pengamanan Perbatasan (Pamtas) adanya di Kampung Long Apari yang jaraknya  $\pm$  173 Km dengan garis batas Negara;

- Perbatasan dengan Warga Negara Tetangga (Malaysia), baik kunjungan kekerabatan atau hubungan ekonomi dan bisnis, sehingga dkuatirkan lama kelamaan tereduksi semangat Nasionalismenya yang disebabkan faktor ekonomi;
- Masih minimnya penyediaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan diantaranya jalan, jembatan, dermaga, telekomunikasi, listrik, air bersih dan pelabuhan udara;
- Masih minimnya infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kurangnya aparat/petugas dan peralatan operasional petugas/aparatur pemerintahan di kawasan perbatasan;
- Kurangnya sumber daya Aparatur Pemerintahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintahan Kampung. Hal ini berpengaruh pada tidak maksimalnya pelayanan khususnya kepada masyarakat di kawasan perbatasan;
- Minimnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang menyebabkan lambannya percepatan pembangunan kawasan perbatasan;
- Minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat di kawasan perbatasan, yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan sarana prasarana pendidikan yang tersedia;



- Rendahnya derajat kesehatan masyarakat di kawasan perbatasan, yang dikarenakan minimnya tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan yang tersedia;
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi Warga Negara Tetangga;
- Minimnya pemahaman masyarakat kawasan perbatasan mengenai batas Negara, sehingga potensi pelanggaran dan pengamanan batas Negara relatif rendah;
- Potensi sumber daya alam kawasan perbatasan sangat banyak, baik disektor pertanian, perkebunan, pertambangan maupun wisata alam dan wisata budaya, namun sampai saat ini potensi tersebut belum tergali dan dikembangkan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat kawasan perbatasan;
- Akses untuk menuju kawasan perbatasan dari Ibukota Kabupaten untuk saat ini hanya bisa melalui transportasi alur sungai dengan resiko melewati beberapa riam (Jeram), sedangkan alur transportasi darat hanya bisa dilewati pada musim kemarau. Sementara untuk menuju garis batas Negara dari Ibu Kota Kecamatan (Tiong Ohang) hanya bisa melewati alur sungai dengan kendaraan kecil (Ketinting) kemudian dilanjutkan dengan jalan kaki;
- Belum ada jalan darat yang menghubungkan antara kampung ke kampung dan antara kampung





paling ujung (Long Apari) dengan garis batas Negara;

- Peraturan hukum yang berlaku dalam penanganan pengelolaan kawasan perbatasan khususnya pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Wilayah Negara belum dilengkapi dengan turunan produk Peraturan Pemerintah (PP) yang khusus mengatur tentang wilayah perbatasan;
- Bagian Pengelola Perbatasan status kelembagaannya masih eselon 3, sehingga sangat sulit melaksanakan fungsi koordinasi ke Pemerintah Pusat, Provinsi maupun SKPD terkait di Kabupaten karena terbentur dengan status kelembagaan;
- Bagian Pengelola Perbatasan yang status kelembagaannya eselon 3, mempunyai sumber daya manusia yang sangat terbatas, baik kuantitatif maupun kualitatif;
- Rendahnya kemampuan kelembagaan pemerintah dalam melibatkan masyarakat kawasan perbatasan untuk berperan aktif dalam membangun kawasan perbatasan;
- Pembiayaan termasuk masalah yang penting bila dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengelola Perbatasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di maksud, memerlukan biaya yang cukup dan memadai, meliputi Biaya pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, Biaya pengelolaan potensi kawasan perbatasan, Biaya pemantauan, pengamanan dan penertiban kawasan perbatasan, Biaya untuk koordinasi, sosialisasi,



pembinaan, monitoring dan evaluasi, Biaya program pelaksanaan administrasi kesekretariatan.

### **29) Urusan Pengawasan**

- Masih terbatasnya kuantitas APIP untuk melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- Penyusunan program kerja pengawasan tahunan belum mengacu pada prinsip risk management/audit berbasis risiko;
- Aparatur pengawasan yang tersedia sebagian besar latar belakang pendidikan formalnya bukan berasal jurusan akuntansi dan/atau teknik sehingga perlu didiklatkan secara berkesinambungan;
- Tingkat kapabilitas APIP belum menuju level 3;
- Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan cenderung terbit tidak tepat waktu disebabkan banyaknya cakupan kegiatan *assurance* (audit, reviu, evaluasi, pemantauan dll) yang harus dilaksanakan sedangkan jumlah aparatur pengawasan terbatas.

### **30) Urusan Kewilayahan**

- Relokasi kampung di wilayah perbatasan;
- Perlu adanya penelahaan mengenai kebutuhan hidup masyarakat terutama di daerah perbatasan;
- Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di kampung;
- Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (Rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;



- Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten;
- Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- Administrasi pengelolaan keuangan desa yang masih belum baik;
- Belum memadainya akses informasi dan komunikasi di beberapa kampung dalam wilayah Kecamatan Long Pahangai;
- Pengelolaan Dana Kampung dan Dana Desa yang belum memadai dan masih terlambatnya proses perencanaan dan pelaporan;
- Masih terdapat akses transportasi yang belum memadai antar kampung dan antar kecamatan terutama akses jalan darat.
- Pengelolaan Dana Kampung dan Dana Desa yang belum memadai dan masih terlambatnya proses perencanaan dan pelaporan;
- Masih terdapat akses transportasi yang belum memadai antar kampung dan antar kecamatan terutama akses jalan darat.

### **31) Urusan Pemerintahan Umum**

- Masih kurangnya optimalnya penyelenggaraan pendidikan politik, baik di lingkup pemerintah daerah maupun dilingkup masyarakat;
- Kurangnya pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- Kurangnya pemeliharaan dan pemberdayaan FKUB;



- Perlu adanya peningkatan kesadaran bela negara di daerah, terlebih Kab. Mahakam Ulu berada di kawasan perbatasan dengan negara lain.
- Kewaspadaan dini masyarakat di daerah masih sangat rendah;
- Penanganan konflik sosial masih belum maksimal dan teroganisir dengan baik;
- Stabilisasi harga pangan di daerah belum tercapai;
- Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba / BNK masih kurang, padahal Mahakam Ulu merupakan pintu gerbang masuk Indonesia dari arah utara.

## B. Visi dan Misi Kepala Daerah

### 1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu periode 2021-2026 adalah:

***“Membangun Mahulu Untuk Semua,  
Sejahtera, Berkeadilan”***

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam misi pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.12

Pokok-Pokok Visi Kabupaten Mahakam Ulu

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1	<b>Mahulu Untuk Semua</b>	<b>Mahulu</b> adalah kabupaten Mahakam Ulu, sebuah wilayah administratif dan geografis setingkat kabupaten yang



No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. " <b>Untuk Semua</b> " mengandung arti bahwa seluruh atau segenap masyarakat Mahakam Ulu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan tanpa diskriminasi, baik wilayah, agama, ras, etnis, kondisi fisik dan gender.
2	<b>SEJAHTERA</b>	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Dalam buku Indonesia Macroeconomic Outlook (2009) oleh Universitas Indonesia, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Sejahtera dalam makna terdalamnya adalah bahwa masyarakat Mahakam Ulu melalui proses pembangunan dapat menikmati kehidupan yang layak, aman dan manusiawi. Kehidupan yang layak, aman dan manusiawi berarti bahwa setiap warga dapat terpenuhi hak untuk sehat dan berpendidikan yang layak, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial, mendapatkan jaminan rasa aman dan menjadi bagian dari komunitas yang sehat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai warga Mahakam Ulu. Untuk merealisasikan visi ini, maka tata kelola pemerintahan di Mahakam Ulu



No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		akan diabdikan tidak saja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup sosial warga, sehingga warga Mahakam Ulu memiliki etos hidup yang optimis dan memiliki harapan yang baik bagi masa depan diri, keluarga, komunitas maupun Kabupaten Mahakam Ulu.
3	<b>BERKEADILAN</b>	<p>Pembangunan Mahakam Ulu 2021-2026 mengedepankan pada konsep pembangunan berkeadilan. Pembangunan akan lebih fokus pada program-program dalam rangka memperkecil ketidakmerataan/ketimpangan kesejahteraan. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada daerah ibu kota pemerintahan saja, akan tetapi pemerataan pembangunan juga akan dilakukan pada seluruh wilayah penyangga Kabupaten Mahakam Ulu serta daerah terluar (perbatasan) sesuai dengan konsep pembangunan pada RTRW. Mahakam Ulu memandang paradigma pertumbuhan ekonomi di masa depan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus memperhatikan pembangunan yang inklusif. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi kepada pertumbuhan, telah menghasilkan eksklusif sosial dan tiga krisis besar, berupa: ketimpangan sosial, kemiskinan dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu paradigma pembangunan baru yang lebih bersifat inklusif. <i>World Economic Forum</i> (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi</p>



No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		<p>akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, selanjutnya Bappenas mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.</p> <p>Pembangunan yang merata diyakini merupakan solusi yang paling tepat dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu. Diharapkan dengan konsep pembangunan yang berkeadilan, seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dapat ikut berpartisipasi dalam memajukan perekonomian Mahakam Ulu.</p>

Sumber: RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu

Visi Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 menitikberatkan pada pembangunan yang adil dan merata sehingga kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua masyarakat Mahakam Ulu. Visi Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 sudah selaras dengan visi RPJMN 2020-2024 dan visi Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

Gambar 1.3

Keselarasn Visi Pembangunan Nasional, Provinsi dan  
Kabupaten Mahakam Ulu



Sumber : RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu

Visi Mahakam Ulu yang menitik beratkan pada poin “sejahtera” dan “berkeadilan” telah selaras dengan visi Provinsi dan Nasional point “berdaulat”, yang mempunyai makna memiliki kemantapan dalam ekonomi dan kecukupan kebutuhan dasar bagi semua masyarakat Mahakam Ulu.

## 2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mahakam Ulu 2021- 2026 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan misi Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut:

### ***a. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan***

Misi ini menitik beratkan pada penyediaan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, bisa dinikmati semua kalangan, namun dalam pembangunannya tetap





memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan adil memiliki makna pembangunan ke depan harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sehingga diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat non ekonomis, yaitu untuk meningkatkan integritas pertahanan dan keamanan nasional dikarenakan Mahakam Ulu sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang, dapat dikelola secara transparan dan partisipatif, serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.

***b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal***

Misi ini akan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan perekonomian, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan kualitas taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten



Mahakam Ulu, maka Pemerintah Daerah bersama masyarakat harus mampu memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Mahakam Ulu secara bijak dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menggali potensi-potensi kemandirian melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi usaha kecil menengah dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pengembangan usaha kecil berbasis rumah tangga (*home industry*), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan pedagang musiman, serta penguatan daya saing para pedagang keliling. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga harus menjamin adanya keadilan dalam menjalankan usaha ekonomi, baik terhadap pelaku industri berskala besar maupun kecil. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan dapat terus mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industri kecil menengah berbasis kerakyatan.

Dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan, keberadaan UMKM dan koperasi diharapkan berkontribusi besar terhadap perekonomian Mahakam Ulu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan UMKM dan koperasi diharapkan menjadi cikal bakal tumbuhnya iklim usaha melalui akses permodalan yang mudah, sehingga jumlah wirausaha di Mahakam Ulu



meningkat dan pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat potensi budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Mahakam Ulu sebagai salah satu daerah tujuan wisata, yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Mahakam Ulu dengan mengusung konsep *Ecotourism* berbasis budaya yang merupakan konsep pariwisata berwawasan lingkungan dengan mengedepankan kebudayaan dan kearifanan lokal akan mencoba menjadikan pariwisata sebagai salah satu unsur pendorong ekonomi masyarakat. Diharapkan dengan berkembangnya pariwisata, akan bermunculan industri-industri kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata yang bersinergi dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata.

**c. *Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi***

Misi ini memprioritaskan pada terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Mahakam Ulu melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Melalui misi ini, diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.

Dengan demikian, akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan mampu bersaing dalam menghadapi



globalisasi. Cakupan peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga pendidikan non formal, termasuk pembinaan iman dan takwa bagi masyarakat untuk menanggulangi penyakit masyarakat (narkoba, minuman keras, pornografi, pornoaksi, tindak pidana dan lain-lain). Lebih lanjut, misi ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil, yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat.

Untuk dapat disebut sebagai daerah yang bermartabat, harus diwujudkan Kabupaten Mahakam Ulu yang aman, tertib, bersih, dan asri, di mana masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

***d. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel***

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah akan melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.



Misi ini juga akan mendorong Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan selalu melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 16 (enam belas) sasaran serta terdapat 18 (delapan belas) indikator dan target pembangunan per tahun yang diletakkan beriringan pada setiap tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun 6 (enam) tujuan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar;
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;



3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Keenam tujuan pembangunan Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2021-2026 ini selaras dengan 17 (tujuh belas) tujuan Pembangunan Berkelanjutan global atau yang dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan semangat global dalam pengentasan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keselarasan antara RPJMD dengan tujuan SGDs dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel di bawah ini:

Gambar 1.4  
Keselarasan RPJMD dengan SDG's

NO	TUJUAN RPJMD	TUJUAN SDG's			
1	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	 Air Bersih dan Sanitasi Layak	 Energi Bersih dan terjangkau	 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	 Berkurangnya Kesenjangan
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	 Penanganan Perubahan Iklim	 Ekosistem Daratan	 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	 Ekosistem Lautan
3	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	 Tanpa Kelaparan	 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	 Kemitraan untuk mencapai Tujuan
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	 Tanpa Kemiskinan	 Kesetaraan Gender		
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	 Kehidupan sehat dan Sejahtera	 Pendidikan Berkualitas		
6	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh			

Sumber: rumusan tim RPJMD Mahulu



Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.13

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Tabel Indikator	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal			Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	17,53	18,38	19,27	20,21	21,19	22,22	23,30	23,30	
Meningkatnya investasi daerah				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)	2.814,921	2.899,368	2.986,349	3.075,939	3.168,217	3.263,263	3.361,161	3.361,161		
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				PDRB Per Kapita meningkat dari 104,60 Menjadi 116,60 Di Akhir Periode	Berkurangnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,44	11,36	10,02	9,90	9,83	9,76	9,68	9,68
					Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,49	4,05	4,60	3,50	3,33	3,16	3,01	3,01
3	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdayasaing tinggi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia Meningkat dari 67,09 Menjadi 71,82 Diakhir Periode	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	7,97	8,27	8,46	8,66	8,87	9,07	9,29	9,29	
					Harapan Lama Sekolah	12,51	12,74	12,85	12,97	13,10	13,22	13,34	13,34	
				Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,10	72,20	72,30	72,40	72,50	72,60	72,70	72,80	
4	Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi Meningkat dari C Menjadi B Diakhir Periode	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tidak ada data	65,51	70,51	70,51	72,25	75,50	75,50	75,70	
				Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Jumlah Desa Maju	6	7	8	8	8	8	9	9	
					Jumlah Desa Tertinggal	15	14	13	12	11	10	9	9	
4	6	6	16	20										





#### 4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Perumusan strategi dalam perencanaan pembangunan menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Secara umum, strategi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.14

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026



<b>Visi:</b> <b>“Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera, Berkeadilan”</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIAJAKNARAH KEBIJAKAN
<b>Misi 1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>			
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	Pembangunan aksesibilitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan kawasan cepat tumbuh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana transportasi guna memenuhi kebutuhan transportasi pada jalan poros yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan dan jalan antar kampung</li> <li>2. Singkronisasi kebijakan sektor transportasi, pengembangan wilayah dan pembangunan perekonomian.</li> <li>3. Perencanaan transportasi antar wilayah guna mengurangi kesenjangan aksesibilitas, secara terpadu, terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik kecamatan.</li> </ol>
	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih	Peningkatan sarana dan prasarana serta distribusi jaringan air baku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperluas akses air bersih bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk pengolahan air minum di setiap kampung, membangun dan mengembangkan “PAM Desa”.</li> <li>2. Mengembangkan dan membangun teknologi tepat guna untuk pengolahan air bersih yang layak minum.</li> <li>3. Membangun SPAM dan instalasi air bersih di ibukota kabupaten dan sekitarnya.</li> <li>4. Membangun PDAM Mahakam Ulu.</li> <li>5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan air bersih</li> <li>6. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Hubung</li> <li>7. Pembangunan sistem pembuangan air limbah rumah tangga yang dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan perdesaan</li> </ol>
	Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Peningkatan akses ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan jenis pembangkit tenaga listrik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah</li> <li>2. Meningkatkan durasi aliran listrik minimal 12 jam dalam sehari di setiap kampung</li> <li>3. Pembangunan tower baru untuk memperluas jaringan aliran listrik</li> <li>4. Koordinasi dengan PLN untuk perluasan jaringan dan peningkatan kapasitas listrik</li> </ol>

<b>Visi:</b> <b>“Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera, Berkeadilan”</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIAJAKNARAH KEBIJAKAN</b>
	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak provider jaringan telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi fasilitas jaringan internet di sekolah-sekolah.</li> <li>2. Perluasan fasilitas jaringan internet di kantor-kantor pemerintahan kecamatan dan kampung</li> </ol>
	Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Memberikan stimulus/bantuan rumah layak huni kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan rumah tidak layak huni</li> <li>2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan</li> <li>3. Pemberian bantuan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu</li> </ol>
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Pendayagunaan sumber daya alam (SDA) sebagai pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, bertanggungjawab dan sesuai serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan ( <i>sustainable development</i> ).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Kabupaten</li> <li>2. Peningkatan sarana prasarana MCK</li> <li>3. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha yang berpotensi merusak lahan, air dan udara</li> <li>4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap hal-hal yang berpotensi merusak lahan, air dan udara</li> <li>5. Pengendalian penebangan hutan di hulu sungai</li> <li>6. Pencegahan kebakaran hutan</li> <li>7. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi</li> <li>8. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik</li> <li>9. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai</li> </ol>
<b>Misi 2: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal</b>			
Mewujudkan Pertumbuhan	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan	Meningkatkan produktivitas usaha sektor pertanian,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bantuan alsinta, saprodi dan modal usaha;</li> <li>2. Pembagian lahan pertanian kepada kelompok tani</li> <li>3. Pengembangan kawasan pertanian;</li> </ol>

<b>Visi:</b> <b>“Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera, Berkeadilan”</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIAJAKNARAH KEBIJAKAN</b>
Ekonomi yang Berkualitas	pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	perkebunan, peternakan dan perikanan	4. Peningkatan kualitas SDM 5. Revitalisasi kelompok tani 6. Optimalisasi peran dan fungsi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) 7. Menjalin kemitraan dengan perusahaan besar dan BUMN untuk menampung hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor pertanian, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan	
	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Meningkatkan peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam dalam mendukung perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat	1. Peningkatan kualitas SDM dan minat pelaku usaha; 2. Identifikasi potensi peluang usaha UMKM dan ekonomi kreatif dan BUMKam; 3. Bantuan peralatan dan modal usaha; 4. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk melalui pemanfaatan IT; 5. Menjalin kerjasama dengan perusahaan menengah dan besar di luar Mahakam Ulu
	Meningkatnya investasi daerah	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan daya saing investasi dengan daerah lain	1. Peningkatan kualitas SDM aparatur; 2. Optimalisasi peran lembaga pelayanan investasi satu atap; 3. Promosi peluang dan potensi investasi daerah; 4. Pengembangan infrastruktur pendukung; 5. Kemudahan dalam berinvestasi; 6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah provinsi dan pusat maupun dengan investor.
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Berkurangnya angka kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi melalui pemberian bantuan tunai langsung khususnya bagi kelompok masyarakat tidak mampu dan warga terdampak COVID-19, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, dan bantuan perumahan;

<b>Visi:</b> <b>“Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera, Berkeadilan”</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIAJAKNARAH KEBIJAKAN
		produktivitas kelompok miskin dan rentan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin berupa Pemberian Bantuan Stimulan (Sapronak, Saprodi, Alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju</li> <li>3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi warga miskin dan warga terkena dampak COVID-19;</li> <li>4. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain ada program pengembangan industri kreatif, pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan BUMKampung, dan pengembangan kewirausahaan;</li> <li>5. Pendataan dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antar berbagai pihak yang berperan .</li> </ol>
	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat lokal dalam upaya mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada upaya menciptakan lapangan kerja atau program pada karya, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha;</li> <li>2. Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis, optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif;</li> <li>3. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal;</li> <li>4. Mendorong berkembangnya usaha dan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal bagi masyarakat lokal.</li> </ol>
<b>Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdayasaing tinggi</b>			

<b>Visi:</b> <b>"Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera, Berkeadilan"</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIAJAKNARAH KEBIJAKAN</b>
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat Mahulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, penyediaan beasiswa dan biaya personil peserta didik yang tidak mampu, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa serta Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik yang lebih kondusif.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan, baik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, maupun Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.</li> <li>3. Pengembangan unsur muatan lokal (mulok) dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal dalam upaya membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.</li> </ol>
	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan;</li> <li>2. Peningkatan sarana dan parasarana kesehatan, khususnya Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu;</li> <li>3. Peningkatan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pelayanan RS Pertama Gerbang Mahulu dan upaya penanggulangan penyakit-penyakit berbasis lingkungan seperti penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, malaria, tuberkulosis, ISPA dan hepatitis;</li> <li>4. Perbaikan manajemen dalam penyediaan dan pendistribusian obat/farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman;</li> <li>5. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;</li> <li>6. Meningkatkan status akreditasi seluruh Puskesmas;</li> <li>7. Perbaikan sistem renumerasi bagi dokter spesialis.</li> </ol>
<b>Misi 4: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel</b>			



<b>Visi:</b> <b>“Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera, Berkeadilan”</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIAJAKNARAH KEBIJAKAN</b>
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Mewujudkan birokrasi dengan pelayanan publik berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas personil penyelenggara pelayanan publik</li> <li>3. Pembentukan saluran pengaduan, operasional desk pengaduan dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat melalui pemanfaatan IT, media sosial dan media siaran dalam upaya penerapan paradigma pelayanan publik yang fokus pada pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (<i>customer-driven government</i>).</li> <li>4. Pengembangan prosedur pelayanan yang mudah, cepat dan transparan</li> <li>5. Pengembangan kebijakan yang mendukung Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan (STPP)</li> <li>6. Optimalisasi penerapan sistem evaluasi kinerja yang didukung dengan sistem insentif dan sanksi guna mendorong kinerja aparatur pemerintah yang efektif;</li> <li>7. Peningkatan sosialisasi terhadap standar prosedur, standar waktu dan standar biaya dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten;</li> <li>8. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian pembangunan dan keuangan daerah</li> <li>9. Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga APIP</li> </ol>
	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah</li> <li>2. Peningkatan kualitas SDM aparatur perencana, pendapatan, keuangan dan aset daerah</li> <li>3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung</li> <li>4. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sistem perencanaan dan keuangan daerah</li> <li>5. Intensifikasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> <li>6. Penguatan database aset daerah</li> <li>7. Sosialisasi peraturan perpajakan</li> <li>8. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sistem perencanaan dan keuangan daerah</li> <li>9. Penyusunan pedoman teknis perencanaan dan keuangan daerah</li> <li>10. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah</li> <li>11. Optimalisasi upaya pendataan, penilaian, pencatatan dan pengelolaan aset daerah dengan pemanfaatan IT</li> </ol>

<b>Visi:</b> <b>"Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera, Berkeadilan"</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIAJAKNARAH KEBIJAKAN</b>
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan Kampung yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kampung</li> <li>2. Pembinaan aparatur pemerintah kampung dalam perencanaan, dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan Kampung</li> <li>3. Fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan kampung</li> <li>4. Penataan batas wilayah kampung</li> <li>5. Mendorong kerjasama antar kampung</li> <li>6. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat</li> </ol>

Sumber : Analisis TIM Pokja Penyusunan RPJMD 2021-2026





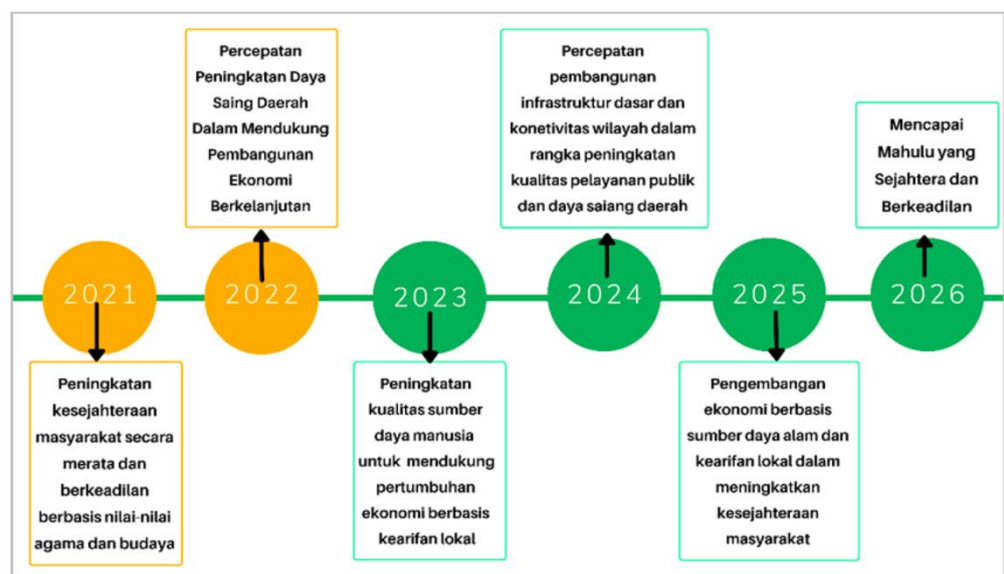
Pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap tujuan dan sasaran utama pembangunan daerah. Dengan mempedomani tujuan, sasaran dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan di atas, maka prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar;
2. Peningkatan ketahanan sumberdaya air, energi dan daya dukung lingkungan hidup;
3. Peningkatan sumber daya pertanian dan perkebunan sehingga dapat mendorong meningkatnya produksi Hasil Pertanian dan Perkebunan
4. Peningkatan Usaha Ekonomi Rakyat
5. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa arah kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembangunan tahunan (*milestone*) Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026.

Mengacu pada strategi pembangunan di atas, serta dengan melihat 5 (lima) Sasaran Prioritas Nasional dan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat dirumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dalam bentuk tema/tahapan pembangunan sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.5  
Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten Mahakam Ulu  
2021-2026



Sumber : Analisis TIM Pokja Penyusunan RPJMD 2021-2026

Selanjutnya dari tema pembangunan tahunan Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2021-2026 tersebut dirumuskan Fokus Prioritas Pembangunan dengan memperhatikan isu strategis dan permasalahan dengan urgensitas tinggi. Oleh karena itu, setiap tema RKPD memiliki fokus sebagaimana yang dijabarkan di bawah ini:

1. **Tema RKPD Tahun 2021: “Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan budaya”**, dengan fokus pembangunan berupa:

- a. Percepatan pemerataan pelayanan pendidikan dan Kesehatan;
  - b. Pengembangan pendidikan kejuruan dan pelatihan ketenagakerjaan;
  - c. Peningkatan produktivitas pertanian, perdagangan dan jasa;
  - d. Percepatan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
  - e. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah,
- 2. Tema RKPD Tahun 2022: “Percepatan Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”**, dengan fokus pembangunan berupa:
- a. Peningkatan Produksi Pertanian melalui Melalui intensifikasi, diversifikasi produk dan manajemen pemasaran, serta peningkatan fungsi jaringan irigasi;
  - b. Pengembangan Komoditas tanaman pangan berupa padi ladang, dan komoditas tanaman perkebunan berupa kakao, karet dan kelapa sawit;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan;
  - d. Pengembangan listrik, pembangunan rumah layak huni dan penyediaan air bersih dan sanitasi layak.
- 3. Tema RKPD Tahun 2023: “Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal”**, dengan fokus pembangunan berupa:
- a. Peningkatan kualitas dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
  - c. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja

- d. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)
- e. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT
- f. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
- g. Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh
- h. Pengembangan perpustakaan berbasis IT
- i. Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis
- j. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- k. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen lembaga kesehatan maupun fasilitasnya
- l. Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular
- m. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat

**4. Tema RKPD Tahun 2024: “Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah”, dengan fokus pembangunan berupa:**

- a. Pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, sungai dan udara antar daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya
- b. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya
- c. Pembangunan infrastruktur pengolahan dan distribusi air bersih

- d. Percepatan pengembangan permukiman
- e. Pemerataan jaringan telekomunikasi sampai ke tingkat kampung
- f. Peningkatan jalan poros yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan dan jalan antar kampung
- g. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana perhubungan
- h. Peningkatan sarana prasarana MCK
- i. Peningkatan Kualitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- j. Peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan aparatur pengelola keuangan daerah
- k. Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur pemerintahan kampung
- l. Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa
- m. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT
- n. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman

**5. Tema RKPD Tahun 2025: “*Pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*”, dengan fokus pembangunan berupa:**

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian di kawasan budidaya pertanian
- b. Pengintegrasian sistem agribisnis dari hulu, on-farm, hilir dan supporting system
- c. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani
- d. Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian

- e. Peningkatan ketersediaan, keragaman dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
- f. Membangun pusat pariwisata berbasis budaya, kearifan lokal dan alam di setiap kampung
- g. Peningkatan iklim investasi yang kondusif
- h. Membangun kemitraan antara pengusaha besar dengan usaha masyarakat
- i. Eksplorasi potensi sumberdaya alam lokal untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang bernilai tinggi
- j. Pengembangan produk unggulan yang bernilai tinggi
- k. Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan Badan Usaha Milik Kampung
- l. Penyiapan pelatihan angkatan kerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa
- m. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah
- n. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani
- o. Tanaman Pangan dan Hortikultura
- p. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir

**6. Tema RKPD Tahun 2026: “Mencapai Mahulu yang Sejahtera dan Berkeadilan”**, dengan fokus pembangunan berupa:

- a. Pemerataan kualitas SDM di semua bidang
- b. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Dasar
- c. Pemerataan Konektivitas telekomunikasi
- d. Memperkuat pasar-pasar dalam memasarkan hasil produk masyarakat
- e. Menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat

- f. Meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan lingkungan
- g. Mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani
- h. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam upaya menciptakan keamanan pangan

### **C. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Untuk melaksanakan arah kebijakan dari masing-masing strategi tersebut dirumuskan program prioritas disertai pagu indikatif sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.14 berikut ini



Tabel 1.15  
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kab. Mahakam Ulu Periode 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/im pact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Misi 1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan					54.623.023.239		60.304.480.000		64.559.980.000		59.435.480.000		59.571.880.000		197.238.980.000		495.733.823.239			
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar		Indeks Gini	0,259	0,2515	52.347.835.299	0,244	57.554.480.000	0,2365	60.609.980.000	0,229	55.485.480.000	0,2215	55.621.880.000	0,214	193.288.980.000	0,214	474.908.635.299			
Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	27.45%	5%	36.675.500.000	5%	37.036.000.000	5%	37.396.500.000	5%	37.757.000.000	5%	38.117.500.000	5%	175.472.500.000	0,30	362.455.000.000			
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0%	5%		5%		5%		5%		25%		25%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
				Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	27.45%	5%	35.954.500.000	5%	35.954.500.000	5%	35.954.500.000	5%	35.954.500.000	5%	35.954.500.000	25%	164.972.500.000		25%	344.745.000.000
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0	0		0		0		0		5%		5%		Dinas Perhubungan		
				Rasio ijin trayek	0	0		0		0		0		0		5%			5%	
				Jumlah uji kir angkutan Umum	0	0	721.000.000	0	1.081.500.000	0	1.442.000.000	0	1.802.500.000	0	2.163.000.000	5%	10.500.000.000		5%	17.710.000.000
				Pemasangan Rambu-rambu	10	10		15		20		25		30		35			35	
				Jumlah orang/ barang yang terangkut	0	0		0		0		0		0		10%			10%	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program/ Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/im pact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		angkutan umum																		
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	0	0		0		0		0		0		10%		10%				
2	15	4	Program Pengelolaan Penerbangan	Jumlah orang/barang yang melalui bandara	5054	5500	22.000.000.000	5700	28.000.000.000	5900	33.000.000.000	6000	35.500.000.000	6500	43.500.000.000	7000	8.100.000.000	7000	170.100.000.000	Dinas Perhubungan
				Jumlah arus penumpang bandara	3 x 1 minggu	3 x 1 minggu		3 x 1 minggu		3 x 1 minggu		4 x 1 minggu		4 x 1 minggu		5 x 1 minggu		5 x 1 minggu		
Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih				Persentase Capaian Akses Air Minum Layak	24,00%	25,00%	10.753.095.299	26,00%	10.000.000.000	27%	10.000.000.000	28%	10.000.000.000	29%	10.000.000.000	30%	10.000.000.000	30%	60.753.095.299	
1	03	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak	24,00%	25,00%		26,00%		27,00%		28,00%		29,00%		30,00%		30,00%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	2	8,00%	10.753.095.299	10,00	10.000.000.000	20,00	10.000.000.000	25,00	10.000.000.000	30,00	10.000.000.000	33,00	10.000.000.000	33,00	60.753.095.299	
Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik				Presentase KK yang dialiri listrik (%)	95,78	95,83	1.600.000.000	95,88	1.600.000.000	95,93	1.550.000.000	96,01	1.550.000.000	96,08	1.550.000.000	96,16	1.550.000.000	96,16	9.400.000.000	
1	04	3	Program Kawasan Pemukiman	Persentase pemukiman yang tertata	10,00%	15,00%	1.000.000.000	20,00%	1.000.000.000	25,00%	950.000.000	30,00%	950.000.000	40,00%	950.000.000	50,00%	950.000.000	50,00%	5.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan
				Persentase lingkungan pemukiman kumuh	5,00%	10,00%		12%		14,00%		15%		16%		17%		17%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
																			Kawasan Pemukiman	
1	04	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	15,43%	5%	600.000.000,00	5%	600.000.000,00	5%	600.000.000,00	5%	600.000.000,00	10%	600.000.000,00	10%	600.000.000,00	55%	3.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet			Cakupan Layanan Telekomunikasi	84	89	500.000.000	89	4.780.000.000	94	7.525.000.000	94	2.040.000.000	100	1.815.900.000	100	2.128.000.000	100	18.788.900.000		
2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0	0	500.000.000	1	1.320.000.000	1	2.045.000.000	1	1.260.000.000	1	1.035.900.000	1	1.348.000.000	5	7.508.900.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
				Cakupan Layanan Telekomunikasi	84	89		89		94	94	94	100	100	100	100				
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	110	0	-	2	3.460.000.000	3	5.480.000.000	0	780.000.000	0	780.000.000	0	780.000.000	5	11.280.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
				Jumlah Sarana Information Center	0	0		2		3	3	1	1	1	1	8				
Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni			Rasio rumah layak huni	15,43%	1%	2.819.240.000	2%	4.138.480.000	2%	4.138.480.000	2%	4.138.480.000	2%	4.138.480.000	2%	4.138.480.000	26%	23.511.640.000		
1	04	2	Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	15,43%	16,43%	2.819.240.000	18,43%	4.138.480.000	20,43%	4.138.480.000	22,43%	4.138.480.000	24,43%	4.138.480.000	26,43%	4.138.480.000	26,43%	23.511.640.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
				Cakupan ketersediaan	15,43%	20,43%		25,43%		30,43%	35,43%	40,43%	50,43%	50,43%						

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RP/JMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
																			Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	<b>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	80,12	83,77	<b>2.275.187.940</b>	83,86	<b>2.750.000.000</b>	83,94	<b>3.950.000.000</b>	84,02	<b>3.950.000.000</b>	84,10	<b>3.950.000.000</b>	84,18	<b>3.950.000.000</b>	84,18	<b>20.825.187.940</b>		
	<b>Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara</b>	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	77,9	64,61	<b>2.275.187.940,00</b>	64,71	<b>2.750.000.000</b>	64,81	<b>3.950.000.000</b>	64,91	<b>3.950.000.000</b>	65,01	<b>3.950.000.000</b>	65,11	<b>3.950.000.000</b>	65,11	<b>20.825.187.940,00</b>		
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		82,78	92,79	92,90		93,01		93,12		93,23		93,34		93,34					
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan		79	100	100		100		100		100		100		100					
2	11	3																	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	77,9	64,61	750.000.000	64,71	750.000.000	64,81	750.000.000	64,91	750.000.000	65,01	750.000.000	65,11	750.000.000	65,11	4.500.000.000		
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		82,78	92,79	92,90		93,01		93,12		93,23		93,34		93,34					
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan		79	100	100		100		100		100		100		100					
2	11	5																	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan		50%	110.187.940	60%	500.000.000	70%	500.000.000	75%	500.000.000	80%	500.000.000	85%	500.000.000	85%	2.610.187.940		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/im pact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
2	11	1	Program Pengelolaan Persampahan	an Sementara Limbah B3																Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase jumlah sampah yang tertangani	20%		30%		40%		50%		60%		75%		85%				
				Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R		1.415.000.000	50%		50%		60%		70%		80%		100%				
<b>MISI 2: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal</b>						44.042.711.300															
<b>Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</b>							0,66		1,57		2,49		3,40		4,32		5,23		5,23		
				Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,26	38.931.954.800		50.230.000.000		60.693.000.000		62.607.800.000		65.138.080.000		66.553.388.000		344.154.222.800			
<b>Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>																					
				Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)	75,18	26.000.000.000		30.750.000.000		30.600.000.000		30.200.000.000		30.250.000.000		30.350.000.000		178.150.000.000			
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3,08%			3,55%		3,60%		3,65%		3,70%		3,75%		3,75%			
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1,50%	14.250.000.000		1,70%		1,80%		1,90%		2,00%		2,10%		2,10%			
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3,20%			3,40%		3,50%		3,60%		3,70%		3,80%		3,80%			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,20%	1,30%		1,40%		1,50%		1,60%		1,70%		1,80%		1,80%					
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan (Ha)	300 Ha	600 Ha		600 Ha		600 Ha		600 Ha		600 Ha		600 Ha		600 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Hortikultura (Ha)	100 Ha	50 Ha		100 Ha		100 Ha		100 Ha		100 Ha		100 Ha		100 Ha			100 Ha	
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Perkebunan (Ha)	2.300 Ha	500 Ha	5.500.000.000	750 Ha	9.000.000.000	750 Ha	9.000.000.000	750 Ha	9.000.000.000	750 Ha	9.000.000.000	750 Ha	9.000.000.000	750 Ha		9.000.000.000	750 Ha	50.500.000.000
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalian Umum (Ha)	50 Ha	250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha			250 Ha	
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	4.250.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	4.250.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	4.350.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	4.450.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	4.500.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	4.600.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	26.400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan	320 Lembaga	400 Lembaga		450 Lembaga		500 Lembaga		550 Lembaga		600 Lembaga		650 Lembaga		650 Lembaga			650 Lembaga	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/im pact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penangg ung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			dan Desa yang difasilitasi																	
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)	35,48 Ton	315 Ton	500.000.000	330 Ton	750.000.000	345 Ton	1.000.000.000	350 Ton	500.000.000	365 Ton	500.000.000	380 Ton	500.000.000	380 Ton	3.750.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)	11,67 Ton	135 Ton	1.000.000.000	150 Ton	1.500.000.000	165 Ton	1.000.000.000	180 Ton	1.000.000.000	195 Ton	1.000.000.000	110 Ton	1.000.000.000	110 Ton	6.500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	90,4	91,6	500.000.000	92,8	500.000.000	94	500.000.000	95,2	500.000.000	96,2	500.000.000	97,98	500.000.000	98,98	3.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam</b>				<b>Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)</b>	<b>17,53</b>	<b>18,38</b>	<b>11.625.000.000</b>	<b>19,27</b>	<b>17.630.000.000</b>	<b>20,21</b>	<b>27.773.000.000</b>	<b>21,19</b>	<b>30.077.800.000</b>	<b>22,22</b>	<b>32.553.080.000</b>	<b>23,30</b>	<b>33.858.388.000</b>	<b>23,30</b>	<b>153.517.268.000</b>	
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang dibina	2%	2%	200.000.000	5%	300.000.000	7%	450.000.000	8%	500.000.000	10%	750.000.000	14%	850.000.000	14%	3.050.000.000	Bagian Ekonomi dan Pembangunan
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0 Pelaku Usaha	25	-	25	250.000.000	30	375.000.000	30	425.000.000	50	500.000.000	50	750.000.000	50	2.300.000.000	Bagian Ekonomi dan Pembangunan
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	Jumlah Destinasi/ Fasilitas/ dokumen	4	6	2.150.000.000	16	4.750.000.000	29	13.050.000.000	29	14.150.000.000	29	15.100.000.000	29	14.650.000.000	29	63.850.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/im pact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Usaha Pariwisata	20	30	40	50	60	70	75									dan Olahraga	
			Jumlah Kelompok Sadar Wisata	6	8	10	13	15	18	20										
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan Mancanegara	5	10	10	30	50	70									Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah wisatawan Nusantara	2500	2700	850.000.000	3000	1.850.000.000	3200	2.000.000.000	3400	2.000.000.000	3600	2.000.000.000	4000	2.000.000.000	4000	10.700.000.000	
				Lama Menginap	4	4		4		4		4		4		4		4		
				PAD Sektor Pariwisata				1%		2%		3%		3%		4%		4%		
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	25	30	500.000.000	35	1.800.000.000	40	2.350.000.000	45	2.500.000.000	50	2.650.000.000	55	2.900.000.000	55	12.700.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	15,6	21,6		28	34	40										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	25,6	33,6	7.925.000.000	42	8.680.000.000	50	9.548.000.000	58	10.502.800.000	66	11.553.080.000	74	12.708.388.000	82	60.917.268.000	
				Persentase LSM aktif	15,6%	18,6%		21,6%		24,6%		27,6%		30,6%		33,6%		33,6%		
				Persentase LPM Berprestasi	0,0%	4,0%		6,0%		8,0%		10,0%		12,0%		14,0%		14,0%		
				Persentase PKK aktif	51,2%	60,0%		63,0%		66,0%		69,0%		72,0%		75,0%		75,0%		
				Persentase Posyandu aktif	48,3%	50,0%		52,0%		54,0%		56,0%		58,0%		60,0%		60,0%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/im pact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	24,0%	26,0%	28,0%	30,0%	32,0%	34,0%	36,0%	36,0%									
Meningkatnya investasi daerah		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PM A) (Dalam Miliar)	2.814,921	2.899,368	1.306.954.800	2.986,349	1.850.000.000	3.075,939	2.320.000.000	3.168,217	2.330.000.000	3.263,263	2.335.000.000	3.361,161	2.345.000.000	3.361,161	12.486.954.800			
2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PM A)	36 Proyek	42 Proyek	350.000.000	48 Proyek	350.000.000	55 Proyek	350.000.000	63 Proyek	350.000.000	73 Proyek	350.000.000	84 Proyek	350.000.000	84 Proyek	2.100.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PM A) (Dalam Miliar)	2.814,921	2.899,368	956.954.800	2.986,349	1.500.000.000	3.075,939	1.970.000.000	3.168,217	1.980.000.000	3.263,263	1.985.000.000	3.361,161	1.995.000.000	3.361,161	10.386.954.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		PDRB Per Kapita (Juta Rp)	104,6	106,6	5.110.756.500	108,6	6.933.020.001	110,6	7.136.422.000	112,6	7.442.664.000	114,6	7.752.030.000	116,6	7.989.833.300	116,6	42.364.725.801			
Berkurangnya angka kemiskinan		Angka Kemiskinan	11,44	11,36	4.985.756.500	10,02	5.658.020.000	9,90	5.686.422.000	9,83	5.717.664.000	9,76	5.752.030.000	9,68	5.839.833.300	9,68	33.639.725.800			
1	06	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	68.84%	68,84%	1.002.316.500	72%	1.624.000.000	72%	1.624.000.000	72%	1.624.000.000	72%	1.624.000.000	72%	9.122.316.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	60.00%	60,00%		72%		72%		72%		72%		72%				



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
1	06	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi	33.33%	33.33%	325.240.000	66,67	350.000.000	66,67	350.000.000	66,67	350.000.000	83,33	350.000.000	100	400.000.000	100	2.125.240.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	06	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	20	3.400.000.000	20	3.400.000.000	20	3.400.000.000	20	3.400.000.000	20	3.400.000.000	20	3.400.000.000	100	20.400.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	14	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	150 KK dalam kelompok Poktan di 10 Kampung KB	250 KK dalam kelompok Poktan di 10 Kampung KB	258.200.000	300 KK dalam kelompok Poktan di 10 Kampung KB	284.020.000	350 KK dalam kelompok Poktan di 10 Kampung KB	312.422.000	400 KK dalam kelompok Poktan di 10 Kampung KB	343.664.000	450 KK dalam kelompok Poktan di 10 Kampung KB	378.030.000	500 KK dalam kelompok Poktan di 10 Kampung KB	415.833.300	500 KK dalam kelompok Poktan di 10 Kampung KB	1.992.169.300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
<b>Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>				<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>3,49</b>	<b>4,05</b>	<b>125.000.000</b>	<b>4,60</b>	<b>1.275.000.001</b>	<b>3,50</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>3,33</b>	<b>1.725.000.000</b>	<b>3,16</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>3,01</b>	<b>2.150.000.000</b>	<b>3,01</b>	<b>8.725.000.001</b>		
2	07	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	5 orang	0		10 orang		10 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	0	-	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	0		10 orang		10 orang		10 orang		15 orang		15 orang		15 orang			
		Rasio lulusan S1/S2/S3	0%	0%		40%		50%		60%		70%		80%		80%			
2	07	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0%	0%		65%		70%		75%		80%		85%		85%		
			Tingkat partisipasi angkatan kerja	0%	0%	125.000.000	65%	550.000.000	70%	700.000.000	75%	850.000.000	80%	1.000.000.000	85%	1.125.000.000	85%	4.350.000.000	85%
			Tingkat pengangguran terbuka	0%	3,49%		4,05%		4,60%		3,50%		3,33%		3,01%		3,01%		
<b>Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdayasaing tinggi</b>					77.613.235.359		95.375.697.559		97.910.993.343		99.555.827.814		101.644.138.049		55.460.680.483		527.560.572.608		
<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>		<b>Indek Pembangunan Manusia</b>	<b>67,09</b>	<b>68,35</b>	<b>77.613.235.359</b>	<b>69,60</b>	<b>95.375.697.559</b>	<b>70,29</b>	<b>97.910.993.343</b>	<b>70,80</b>	<b>99.555.827.814</b>	<b>71,30</b>	<b>101.644.138.049</b>	<b>71,82</b>	<b>55.460.680.483</b>	<b>71,82</b>	<b>527.560.572.608</b>		
<b>Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat</b>		<b>Angka rata-rata lama sekolah</b>	<b>7,97</b>	<b>8,27</b>	<b>69.421.895.200</b>	<b>8,46</b>	<b>87.178.118.900</b>	<b>8,66</b>	<b>89.686.118.900</b>	<b>8,87</b>	<b>91.066.118.900</b>	<b>9,07</b>	<b>92.846.118.900</b>	<b>9,29</b>	<b>46.301.118.900</b>	<b>9,29</b>	<b>476.499.489.700</b>		
		<b>Harapan Lama Sekolah</b>	<b>12,51</b>	<b>12,74</b>		<b>12,85</b>		<b>12,97</b>		<b>13,10</b>		<b>13,22</b>		<b>13,34</b>		<b>13,34</b>			
1	01	2	Program Pengelolaan Pendidikan		30		40		50		60		70		80		80		
			Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana	7%	9%	28.575.000.000	11%	45.777.000.000	14%	47.385.000.000	16%	48.215.000.000	17%	49.495.000.000	19%	2.400.000.000	19%	221.847.000.000	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/im pact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Pendidikan PAUD																	
		Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	5%	8%		10%		13%		15%		18%		21%		21%			
		Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP	27%	27%		33%		40%		47%		53%		60%		60%			
		Angka partisipasi kasar SD/MI	109,52	108,00		107,00		106,00		105,00				102,00		102,00			
		Angka Partisipasi Murni SD/MI	98,47	99,00		99,30		99,50		99,70		99,90		100,00		100,00			
		Angka partisipasi sekolah SD/MI ( 7 - 12 )		96,00		97,00		97,50		99,00		100,00		100,00		100,00			
		Angka Kelulusan SD	99%	99%		99%		99%		99%		99%		100%		100%			
		Angka partisipasi kasar SMP	109,52	108,00		107,00		106,00		105,00				102,00		102,00			
		Angka Partisipasi Murni SMP	98,47	99,00		99,30		99,50		99,70		99,90		100,00		100,00			
		Angka partisipasi sekolah SMP		96,00		97,00		97,50		99,00		100,00		100,00		100,00			
		Angka Kelulusan SMP	99%	99%		99%		99%		99%		99%		100%		100%			
		Jumlah Lembaga PKBM yang dibina	1	2		5		5		5		5		5		27			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/im pact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Jumlah Lembaga LKP yang dibina	0	1		3	3		3		3		3		16			
			Jumlah Lembaga SKB yang dibina	0	1		3	3		3		3		3		16			
			Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal	75%	100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%			
			Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal	50%	60%		70%	75%		80%		90%		100%		100%			
1	01	4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	0	25		30	35		40		45		50		225			
			Rasio guru/murid sekolah	280	420		420	560		560		560		560		3080			
			Rasio guru/murid per kelas rata-rata	140	140	2.846.895.200	140	3.401.118.900	4.101.118.900	420	4.451.118.900	420	4.751.118.900	420	5.101.118.900	1680	24.652.489.700		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Bersertifikasi SD & SMP	69	50		50	50		50		50		21		340			
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	709	100		100	100		100		100		100		600			
			Jumlah Penerima Beasiswa Kerjasama	800	800	38.000.000.000	800	38.000.000.000	38.200.000.000	800	38.400.000.000	800	38.600.000.000	800	38.800.000.000	4800	230.000.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Kelulusan		20		20	20		20		20		20		120			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		Jumlah Fasilitas Tempat tinggal bagi putra & putri asal kabupaten mahakam ulu yang menempuh pendidikan		5		5		6		7		8		9		9				
		Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Sekolah SMA/K Negeri dan Swasta	9	9		9		9		9		9		9		9				
Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat		Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,10	72,20	8.191.340.159	72,30	8.197.578.659	72,40	8.224.874.443	72,50	8.489.708.914	72,60	8.798.019.149	72,70	9.159.561.583	72,80	51.061.082.908			
1	02	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup	72,10	72,20		72,30		72,40		72,50		72,60		72,70		72,70	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Persentase balita gizi buruk	0,30	0,25		0,20		0,15		0,10		0,5		0		0		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	19,12	9		8		7		6		5		4		4		
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	570	3	1.482.037.500	2	1.691.600.300	2	1.676.579.950	1	1.840.556.848	1	2.032.130.775	0	2.248.676.444	0		10.971.581.817
				Rasio posyandu per satuan balita	1: 50 balita	1: 50 balita		1: 50 balita		1: 50 balita		1: 50 balita		1: 50 balita		1: 50 balita		1: 50 balita		
				Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per	1,17	1,20		1,23		1,23		1,23		1,23		1,23		1,23		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program/ Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		saluran penduduk																	
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,07	0,07			0,07			0,07			0,07			0,07			0,07
		Prevalensi stunting	27%	25%			22%			10%			14%			12%			10%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	61 Org/ rujukan	95			61			70			50			40			40
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTB	65%	69%			90%			91%			92%			93%			94%
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,65	0,62			0,59			0,56			0,53			0,50			0,47
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	39 kasus	39 kasus			40 Kasus			41 Kasus			41 Kasus			41 Kasus			42 Kasus
		Angka kejadian Malaria	14	6			5			0			0			0			0
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2	2			2			2			2			1			1
		Persentase anak usia 1 tahun yang imunisasi campak	97 persen	97,00			97,00			97,00			97,00			96,00			96,00

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	02	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	34.515.459.354	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		
				Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman	0 Persen	20 Persen	30 Persen	40 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen		
1	02	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72 persen	73 persen	74 persen	75 persen	76 persen	77 persen	78 persen	79 persen	80 persen	81 persen	82 persen	83 persen	5.279.041.737	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	3.2 persen (630 RT)	700 RT	750	800	850	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200		
				Cakupan Desa/Kelurahan mengalami	21 KLB	21 kib	22 KLB	23 KLB	24KLB	25KLB	26 KLB	26 KLB	26 KLB	26 KLB	26 KLB	26 KLB		
1	02	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	51	75%	50%	30%	25%	20%	15%	15%	15%	15%	15%	295.000.000	RSUD	
				Cakupan penemuan dan penanganan	37													

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program/ Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		n penderita penyakit TBC BTA																		
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	255 (Pemeriksaan)														255 (Pemeriksaan)			
Misi 4: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel					2.078.216.984.620		1.391.521.775.741		1.404.530.868.440		1.423.982.812.599		1.445.606.928.185		1.471.782.621.827		9.207.441.991.413			
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	2.078.216.984.620	CC	1.391.521.775.741	B	1.404.530.868.440	B	1.423.982.812.599	B	1.445.606.928.185	B	1.471.782.621.827	B	9.207.441.991.413			
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat	Tidak ada data	65,51	6.876.668.600	70,51	7.572.424.370	70,51	8.067.981.713	72,25	8.587.580.199	70,50	9.007.845.772	70,50	9.597.798.607	70,50	48.710.299.261			
5	3	2	Program Kepegawalan Daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	70,00%	72,50%	4.313.892.800	75,00%	4.615.865.296	77,50%	4.938.975.667	80,00%	5.264.704.177	82,50%	5.604.633.470	85,00%	6.050.457.613	85,00%	30.858.529.423	Badan Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan
5	04	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	75,00%	76,50%	1.312.775.600	78,00%	1.561.559.074	79,50%	1.629.005.846	81,00%	1.677.876.022	82,50%	1.726.212.302	84,00%	1.797.340.794	84,00%	9.726.769.636	Badan Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	65,51	250.000.000	70,51	275.000.000	70,51	300.000.000	72,25	325.000.000	75,50	325.000.000	75,50	350.000.000	75,70	1.825.000.000	Kecamatan Long Bagun	
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	65,51	250.000.000	70,51	275.000.000	70,51	300.000.000	72,25	325.000.000	75,50	325.000.000	75,50	350.000.000	75,70	1.825.000.000	Kecamatan Apari	



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
7	01	2	PELAYANAN PUBLIK	Publik Inklusif Kecamatan															
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Inklusif Kecamatan	65,51	250.000.000	70,51	275.000.000	70,51	300.000.000	72,25	325.000.000	75,50	325.000.000	75,50	350.000.000	75,70	1.825.000.000	Kecamatan Laham
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Inklusif Kecamatan	65,51	250.000.000	70,51	275.000.000	70,51	300.000.000	72,25	325.000.000	75,50	325.000.000	75,50	350.000.000	75,70	1.825.000.000	Kecamatan Long Hubung
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Inklusif Kecamatan	65,51	250.000.000	70,51	275.000.000	70,51	300.000.000	72,25	325.000.000	75,50	325.000.000	75,50	350.000.000	75,70	1.825.000.000	Kecamatan Long Pahangai
Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah				Opini BPK (WTP)	WTP	WTP	2.975.665.316.828	WTP	1.388.919.351.371	WTP	1.400.747.386.727	WTP	1.419.915.682.400	WTP	1.441.379.977.413	WTP	1.467.250.317.720	WTP	9.184.777.131.652
5	01	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase penyediaan data-informasi tepat waktu	100%	100%	11.325.000.000	100%	10.202.265.200	100%	7.135.855.000	100%	7.135.855.000	100%	7.135.855.000	100%	7.135.855.000	100%	50.070.665.200
				Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		dengan RPJMD																		
		persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5	01	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	2.500.000.000	100%		100%		
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	7.200.000.000	100%	8.200.000.000	100%	8.200.000.000	100%	8.700.000.000	100%	2.700.000.000	100%	8.200.000.000	100%	40.500.000.000	
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	3.000.000.000	100%		100%		
5	02	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
				Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	21%	10%	2.046.693.861.350	10%	1.358.803.975.901	10%	1.374.003.975.901	10%	1.392.163.975.901	10%	1.413.977.250.901	10%	1.439.319.716.401	10%	9.025.032.756.356	
				Penetapan APBD	1.522.641.755.020	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Persentase SILPA terhadap APBD	0,93%	1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/implikasi/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
6	01	3	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	Level 2 (Plus)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektoral
			Level Kapabilitas AP/ Kabupaten Mahakam Ulu	Level 2 (Plus)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
			Jumlah Desa Maju	6	7	-	8	-	8	-	8	-	8	-	9	-	9	-	
			Jumlah Desa Tertinggal	15	14	4.325.000.000	13	4.070.000.000	12	4.284.500.000	11	4.520.450.000	10	4.778.995.000	9	5.065.494.500	9	27.045.439.500	
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Mandiri	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah Desa Maju	6	7	-	8	-	8	-	8	-	8	-	9	-	9	-	
			Jumlah Desa Berkembang	27	29	2.750.000.000	29	2.495.000.000	30	2.709.500.000	31	2.945.450.000	32	3.204.995.000	32	3.490.494.500	32	17.595.439.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Jumlah Desa Tertinggal	15	14	-	13	-	12	-	11	-	10	-	9	-	9	-	
			Jumlah Desa Sangat Tertinggal	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Long Bagun
						65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		390.000.000	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Apari
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Laham
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Longhubung
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Long Pahangai

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Long Bagun
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Apari
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Laham
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Long hubung
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Long Pahangai
TOTAL ANGGARAN PENCAPAIAN MISI KEPALA DAERAH					2.254.495.934.518	1.604.364.973.301	1.634.831.263.763	1.653.024.564.413	1.679.713.056.234	1.799.025.503.611	10.617.255.335.860									

Sumber : Analisis TIM Pokja Penyusunan RPJMD 2021-2026



**D. Capaian Indikator Kinerja Misi Daerah Yang Ditetapkan Dalam RKPD Tahun 2023**

Kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diuraikan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023. Tema RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 adalah “Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal”. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.16**  
**Realisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023**

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Tahun 2023	Capaian 2023
MISI 1 : MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK YANG BERKUALITAS, ADIL, BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
Tujuan 1: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,237	0,330
Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	5	244,71%
Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak (%)	27,00	204,41%
Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Presentase KK yang dialiri listrik (%)	95,93	48,94%
Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	94	99,75
Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni (%)	20,43	0%
Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,94	83,19
Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	64,81	61,28
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	93,01	94,43

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Tahun 2023	Capaian 2023
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100	100
MISI 2 : MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI SUMBERDAYA ALAM, MEMBERDAYAKAN USAHA EKONOMI KECIL MENENGAH YANG BERBASIS KERAKYATAN, DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA TERMASUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS PARIWISATA DAN KEARIFAN LOKAL			
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,49	2,80
Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)	75,65	
Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	20,21	
Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)	3.075,939	531.009.140
Tujuan 4: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PDRB per Kapita (Juta Rp)	110,6	99,61
Berkurangnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	10,50	11,38
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,90	2,09
MISI 3 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN BERDAYA SAING TINGGI			
Tujuan 5: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,70	69,59
Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	8,66	8,49
	Harapan Lama Sekolah	12,97	12,63
Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,40	72,46
MISI 4 : MENCIPTAKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL			

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Tahun 2023	Capaian 2023
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B	CC
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,51	77,42
Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	Dalam Proses
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Jumlah Desa Maju	8	17
	Jumlah Desa Tertinggal	12	0

*Sumber: Bappeda Kab. Mahakam Ulu, 2023*





### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

#### 1. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Indikasi keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik harus tergambar dalam sebuah laporan yang memuat informasi pencapaian kinerja yang terukur dan sesuai standar yang berlaku, atas dasar pertimbangan serta alasan tersebut Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memutuskan untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang juga termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penerapan SPM juga bertujuan untuk melihat sudah sejauh mana target atau capaian dari penyelenggaraan urusan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana dalam satu Tahun Anggaran sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat, dimana keberhasilan dari suatu pelayanan diukur dalam bentuk indikator mutu dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pelayanan Dasar merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah karena pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib, yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dituangkan dalam SPM.

Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Berangkat dari hal tersebut SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar



adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu konkrit, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai jangka waktu pencapaian.

## **2. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Adapun dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota

### 3. Kebijakan Umum

Program prioritas urusan wajib pelayanan dasar yang tidak termasuk dalam program prioritas visi dan misi daerah namun wajib dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD. Program prioritas ini meliputi program kegiatan pada urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.

Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan urusan serta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab melaksanakan masing-masing program pembangunan jangka menengah Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026, Adapun tema RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023



adalah “Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal”.

Tema tersebut merupakan arah kebijakan pembangunan tahunan yang dirumuskan pada RPJMD dan merupakan strategi tahun ketiga untuk mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 yaitu “Membangun Mahulu Untuk Semua, Sejahtera, Berkeadilan”. Tema RKPD Tahun 2023 merupakan arah kebijakan pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari tema tahun sebelumnya, dimana kinerja perekonomian belum mampu berperan dalam mensejahterahkan masyarakat, oleh karena itu focus pembangunan masih terus diarahkan pada peningkatan potensi daerah untuk penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing sumber daya manusia.

Dalam pelaksanaan peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

#### **Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**

##### **A. Urusan Pendidikan**

Bidang Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan

##### **Program Kegiatan Urusan Pendidikan**

Program dan kegiatan wajib yang merupakan pendukung program kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan, antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
  - Penambahan Ruang Kelas Baru
  - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
  - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
  - Pembangunan Perpustakaan Sekolah
  - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
  - Pengadaan Mebel Sekolah
  - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
  - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
  - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
  - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
  - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
  - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
  - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
  - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
  - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
  - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik



- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- Pengadaan Perlengkapan PAUD
- Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- Pengelolaan Dana BOP PAUD
- Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan



- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
  - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
  - Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
  - Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
5. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
- Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
  - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
  - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
6. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA





- Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
  - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
  - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
8. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
- Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
9. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
- Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
  - Penetapan Cagar Budaya
  - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
  - Pelindungan Cagar Budaya
  - Pemanfaatan Cagar Budaya
10. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
- Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
  - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
11. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
- Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga

## **B. Urusan Kesehatan**

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **Program Kegiatan Urusan Kesehatan**

Program dan kegiatan wajib yang merupakan pendukung program kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan, antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai



- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - Peningkatan Pelayanan BLUD
  - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  - Pengembangan Rumah Sakit
  - Pengembangan Puskesmas



- Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
- Pengadaan Obat, Vaksin
- Pengadaan Bahan Habis Pakai
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA



- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
  - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
  - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
  - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
  - Operasional Pelayanan Rumah Sakit
  - Operasional Pelayanan Puskesmas
  - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
  - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
  - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
  - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
  - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
  - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
  - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
  - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
  - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
  - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan



- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
  - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
  - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
5. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
- Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
  - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
  - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota



- Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
  - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
  - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
  - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
  - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
6. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
- Tingkat Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
  - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
  - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
  - Pengendalian Program KKBPK
  - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
  - Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
  - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
  - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya



- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
  - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
  - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
  - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
  - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
- Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberda
  - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)





- Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
- Advokasi dan Promosi IPK

### C. Urusan Pekerjaan Umum

Bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### **Program Kegiatan Pekerjaan Umum**

Program dan kegiatan wajib yang merupakan pendukung program kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum, antara lain :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD



- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Penataan Organisasi
  - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- 2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- 3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**
- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota



- Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
- 4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
  - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
  - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- 7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
  - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
  - Penataan Bangunan dan Lingkungan
- 8. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
  - Proporsi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
  - Pembangunan Jalan
  - Pemeliharaan Rutin Jalan
- 9. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
  - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
  - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi



- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

#### **10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

- Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
- Sistem Informasi Penataan Ruang
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

#### **D. Urusan Perumahan Rakyat**

Bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

#### **Program Kegiatan Perumahan Rakyat**



Program dan kegiatan wajib yang merupakan pendukung program kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat, antara lain:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
  - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
  - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
  - Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
  - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
  - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
  - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  - Tingkat Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

#### **E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**



Bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Trantibum dan Linmas.

**Program dan kegiatan wajib** yang merupakan pendukung program kegiatan tugas pokok dan fungsi Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain

### **SATPOL PP DAN DAMKAR**

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penataan Organisasi
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

## 2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS





3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Investigasi Kejadian Kebakaran
- Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

## 2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota



- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

### 3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

#### F. Urusan Sosial

Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Program Kegiatan Sosial

**Program dan kegiatan wajib** yang merupakan pendukung program kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam pelaksanaan Pemenuhan SPM Urusan Sosial, antara lain:

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penataan Organisasi
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

## 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- Terpenuhinya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

## 3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL



- Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

#### 4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- Tingkat Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

#### 5. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- Nilai Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

#### 6. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota



- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### **7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **8. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

- Angka Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## **BAB II**

### **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **2.1 Indikator Kinerja Makro**

Indikator kinerja Makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial, indikator kinerja makro tersebut terdiri dari:

##### **a. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Kemajuan hasil pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks Pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Perkembangan angka IPM tiap tahun di Mahakam Ulu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 IPM Mahakam Ulu tercatat sebesar 67,09 dan terus menunjukkan tren meningkat hingga pada tahun 2023 IPM Mahakam Ulu naik menjadi 69,95. Meskipun nilai IPM Mahakam Ulu masih termasuk dalam kategori Sedang ( $60 < IPM < 70$ ), namun percepatan dan atau pertumbuhan nilai IPM Mahakam Ulu dari tahun 2020 hingga 2023 tergolong bergerak dengan cepat/ tinggi dan apabila tren ini terus berlanjut hingga tahun berikutnya, Kabupaten Mahakam Ulu akan dapat meraih kategori tinggi untuk nilai IPM. Komponen penyusun IPM Mahakam Ulu sebagian besar menunjukkan peningkatan. Umur harapan hidup penduduk pada Tahun 2024 mencapai usia 72,46 tahun, lebih tinggi 0,11 dari tahun sebelumnya. Indikator pendidikan yang diwakili oleh angka harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan sebesar 0,01 menjadi 12,63 tahun, di tahun 2023. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata lama sekolah, meningkat dari 0,52 tahun pada tahun





2020 menjadi 8,49 tahun di tahun 2023. Perkembangan capaian Pembangunan manusia Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1  
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mahakam Ulu

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2022	68,75
2023	69,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mahakam Ulu 2023

### b. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah Penduduk miskin di Mahakam Ulu pada Tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2022 sebanyak 3,10 ribu orang. Sedangkan Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2023 sebanyak 3.06 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Tahun 2022 tercatat sebesar 11,55 persen, sedangkan persentase penduduk miskin pada Tahun 2023 sebesar 11,38 persen turun 0,17 persen, walaupun masih belum memenuhi target sebesar 10,50 persen, namun setidaknya mengalami penurunan dibandingkan capaian Tahun 2022. Seperti disajikan pada tabel 2.2

Tabel 2.2  
Angka Kemiskinan

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2022	11,55	3,10
2023	11,38	3,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mahakam Ulu 2023

### c. Angka Pengangguran

Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Tingkat



Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mahakam Ulu pada Tahun 2023 sebesar 2,09 persen, turun 0,35 persen dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 yaitu sebesar 2,44 persen. Dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten Mahakam Ulu

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
2022	2,44
2023	2,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mahakam Ulu 2023

#### d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/ daerah. Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu sepanjang Tahun 2023 tumbuh sebesar 2,80 persen, angka ini lebih tinggi dibanding capaian pada Tahun 2022 yang tumbuh sebesar 0,91 persen, karena Tahun 2022 merupakan Tahun awal pemulihan ekonomi Nasional paska pandemi Covid-19. Seperti yang terlihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2022	0,91
2023	2,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mahakam Ulu 2023



### e. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu Negara/ wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk Negara/wilayah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Kinerja ekonomi masih menunjukkan perbaikan dan mengalami percepatan jika dibandingkan Tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu ini mencapai 2,80 persen, pertumbuhan tersebut berdampak pada nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku kembali meningkat mencapai Rp.99,61 juta pada Tahun 2023, sedangkan PDRB per kapita Tahun 2022 sebesar Rp.93,02 juta, atau mengalami peningkatan sebesar Rp.6,59 juta. Capaian Pendapatan Perkapita Kabupaten Mahakam Ulu dapat disajikan pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5

PDRB Per Kapita Kabupaten Mahakam Ulu

Tahun	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
2022	93,02
2023	99,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mahakam Ulu 2023

Informasi untuk PDRB Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2022-2023 dan PDRB Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2022-2023 dapat dilihat secara rinci pada Tabel di Bawah ini.

Tabel 2.6

Nilai PDRB Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2022-2023

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun	
		2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.362.151,33	2.507.639,28
B	Pertambangan dan penggalian	199.479,06	213.711,57



C	Industri Pengolahan	15.778,67	16.384,89
D	Pengadaan listrik dan gas	942,09	1.175,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	1.126,49	1.288,18
F	Konstruksi	213.223,80	251.091,98
G	Perdagangan Besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	159.932,81	174.655,75
H	Transportasi dan pergudangan	135.800,68	156.589,14
I	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	4.140,17	4.590,67
J	Informasi dan komunikasi	7.832,26	8.626,04
K	Jasa Keuangan	3.801,75	4.498,35
L	Real estate	5.345,39	5.478,05
M,N	Jasa Perusahaan	939,90	1.011,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	46.106,67	48.721,61
P	Jasa Pendidikan	6.341,45	6.814,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.548,54	4.879,42
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1.802,23	2.010,75
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>3.169.293,29</b>	<b>3.409.167,05</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mahakam Ulu 2023

Tabel 2.7  
Nilai PDRB Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2022-2023

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun	
		2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.346.639,84	1.367.480,83
B	Pertambangan dan penggalian	119.370,57	124.172,35
C	Industri Pengolahan	10.639,52	10.742,65



D	Pengadaan listrik dan gas	667,69	811,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	773,60	811,81
F	Konstruksi	117.072,10	132.630,19
G	Perdagangan Besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	86.212,66	90.694,84
H	Transportasi dan pergudangan	74.183,12	77.944,98
I	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	2.338,15	2.501,43
J	Informasi dan komunikasi	6.709,81	7.299,43
K	Jasa Keuangan	1.494,82	1.820,70
L	Real estate	3.712,53	3.739,27
M,N	Jasa Perusahaan	592,70	605,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23.059,26	23.314,18
P	Jasa Pendidikan	3.323,58	3.505,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.676,97	2.818,68
R,S, T,U	Jasa Lainnya	994,23	1.062,39
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>1.802.461,14</b>	<b>1.852.956,21</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mahakam Ulu 2023

#### f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Menurut inequality.org (2016), ketimpangan pendapatan mengacu pada sejauh mana pendapatan didistribusikan secara merata diantara populasi. Ketimpangan pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang kaya dan yang tidak kaya. Berikut penyajian data dari masing-masing indicator beserta komponennya. Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Mahakam Ulu yang diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,330. Angka ini meningkat 0,042 poin jika



dibandingkan dengan Gini Ratio pada Tahun 2022 yaitu sebesar 0,288 poin. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) Kabupaten Mahakam Ulu dapat terlihat pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.8

Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Tahun	Gini Ratio/ Ketimpangan Pendapatan
2022	0,288
2023	0,330

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mahakam Ulu 2023

## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundangundangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Capaian kinerja kunci keluaran (IKK Output) Kabupaten Mahakam Ulu dalam Tahun 2023 tersaji pada tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.9

Pelaporan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi</li> <li>2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</li> <li>3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan</li> <li>4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD</li> <li>5. Jumlah pendidik pada PAUD</li> <li>6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini</li> <li>7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang</li> </ol>	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 1179. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 1336	88,24850 3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi</li> <li>2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</li> <li>3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</li> <li>4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan</li> <li>5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan</li> <li>6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar</li> <li>7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar</li> <li>9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</li> <li>11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar</li> <li>13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</li> <li>15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah</li> </ol>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 3968. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 4187	94,76952 5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-------	---	------------	---	---	--	---------------	---------------------------------------





			<p>diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> <p>16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p> <p>19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p> <p>&amp;nbsp;</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	<p>1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 17. Jumlah kepala sekolah</p>	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 1811. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 1986	91,188318	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-------	---	------------	---	---	---	-----------	---------------------------------



			<p>pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah<sup>18</sup>. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat<sup>19</sup>. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi</li> <li>2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</li> <li>3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan</li> <li>4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan</li> <li>5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan</li> <li>6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)</li> <li>7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</li> <li>8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1</li> </ol> <p>&amp;nbsp;</p>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang &nbsp;berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 180. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 297	60,60606 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-------	---	------------	--	---	---	---------------	---------------------------------------

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 130. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 38498	3,376798 8	DINKESP2KB
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 2. Jumlah RS di kabupaten/kota = 2	100	DINKESP2KB
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 470. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 470	100	DINKESP2KB
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 484. Jumlah ibu bersalin di	100	DINKESP2KB



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
					kabupaten/kota = 484		
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 477. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 477	100	DINKESP2KB
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 2595. Jumlah balita di kabupaten/kota = 2595	100	DINKESP2KB

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 1768. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 1768	100	DINKESP2KB
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 10839. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 10839	100	DINKESP2KB
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 1851.	100	DINKESP2KB



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
					Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 1851		
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2994. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 2994	100	DINKESP2KB
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 1124. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 1124	100	DINKESP2KB







No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
					Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 1031		



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)</li> <li>2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)</li> <li>3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)</li> <li>4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)</li> <li>5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota</li> <li>6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota</li> <li>7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota</li> </ol>	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0	0	SURAT KETERANGAN (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota}} = 0$	0	SURAT KETERANGAN (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT)



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)</li> <li>2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)</li> <li>3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)</li> <li>4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM</li> <li>5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.</li> </ol>	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	0	





1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi</li><li>2. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting</li><li>3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)</li><li>4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)</li><li>5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan</li><li>6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota</li><li>7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota</li><li>8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat</li></ol>	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	0	
-------	---	---	---	----------------------------------	--	---	--









			<p>instansi pemerintah lainnya.</p> <p>11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis</p> <p>12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota</p> <p>13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota</p> <p>14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota</p> <p>19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota</p> <p>20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota</p> <p>21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota</p> <p>22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
---------	---	-----------------------------------	---	--	--	---	--



			<p>sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



			kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
--	--	--	---	--	--	--	--







1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0	
-------	---	---	---	---	--	---	--





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU</li> <li>2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum</li> <li>3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan</li> <li>4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)</li> <li>5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH</li> <li>6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU</li> <li>7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi</li> <li>8. Jumlah pengembang yang terregistrasi</li> <li>9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan</li> </ol>	&nbsp;Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Jumlah unit rumah kab/kota	0	



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani 2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 0. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 1	0	
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 1. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 8	12,5	



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 32728. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 32752	99,92672 2	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal</li> <li>2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal</li> <li>3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan</li> <li>4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan</li> <li>5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana</li> <li>6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan</li> </ol>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 60. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 60	100	



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 176. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 176	100	







No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	15	SATPOL PP



1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	<p>1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki 2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter 11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia 12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah 14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan 15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat</p>	<p>&amp;nbsp;Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)</p>	<p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis</p>	0	
-------	---	--------	---	--	---	---	--



			<p>kesejahteraan sosial16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan</li> <li>2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang</li> <li>3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki</li> <li>4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan</li> <li>5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial</li> <li>6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia</li> </ol>	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	0	



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. 2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. 3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	&nbsp;Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 0. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 0	0	Belum adanya kegiatan yang di rencanakan yang mengacu pad RTKD



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster 2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 4. Persentase LPK yang terakreditasi 5. Persentase LPK yang memiliki perizinan 6. Jumlah penganggur yang dilatih 7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 8. Persentase penyerapan lulusan 9. Lulusan bersertifikat kompetensi 10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan 11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	&nbsp;Persentase&nbsp; Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 5. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 3072	0,162760 4	Belum adanya tenaga kerja yang memiliki sertifikat



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 2. Data tingkat produktivitas total	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan). Jumlah tenaga kerja	0	



2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)</li><li>2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</li><li>3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan</li><li>4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.</li><li>5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan</li><li>6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih</li><li>7. Jumlah mogok kerja</li><li>8. Jumlah penutupan perusahaan</li><li>9. Jumlah perselisihan kepentingan</li><li>10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan</li><li>11. Jumlah perselisihan PHK</li><li>12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK</li><li>13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite</li><li>14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan</li><li>15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial</li></ol>	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 19. Jumlah Perusahaan = 19	100	
-------	---	--------------	--	---	--	-----	--







No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 400696100. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 17331711079	2,311924 6	
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal 3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	0	



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.g.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan. Jumlah penduduk perempuan	0	





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	0	



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</li> <li>2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</li> <li>3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.</li> <li>4. Dokumen Izin membuka tanah</li> <li>5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</li> </ol>	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; Jumlah penerima tanah obyek landreform	0	





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</li><li>2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</li><li>3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.</li><li>4. Dokumen Izin membuka tanah</li><li>5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</li></ol>	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	0	





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 4772.82. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 6538.11	72,99999 5	



2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota</li><li>2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota</li><li>3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota</li><li>4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat</li><li>5. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.</li></ol>	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 0. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 22	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
-------	---	------------------	---	---	---	---	------------------------

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan  &nbsp;	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 26234. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 26484	99,05603 4	
2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan  &nbsp;	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 6521. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 11027	59,13666 5	
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan  &nbsp;	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 11585. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 11710	98,93253 6	



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. Jumlah PD	0	



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan  &nbsp;	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 8	0	



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan  &nbsp;	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 32. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 34	94,11764 7	





No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,1	



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan  &nbsp;	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 1997. Jumlah Pasangan Usia Subur = 3787	52,73303 4	
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 935. Jumlah Pasangan Usia Subur = 3787	24,68972 8	



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota  &nbsp;	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,67	-



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C2. Terlaksananya pelayanan uji berkala3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota&nbsp;	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		815	-







			peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government&nbsp;				
--	--	--	---	--	--	--	--



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota &nbsp; &nbsp;	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 2985. Jumlah penduduk = 26810	11,13390 5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN





2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	<p>1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaranuntuk</p>	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas&nbsp;	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 0. Jumlah seluruh koperasi aktif = 0	0	Tidak Terdapat Data
-------	---	------------------------------------	---	---	---	---	---------------------



			<p>koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota&amp;nbsp;</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--





2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal 3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal 4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 5. Kegiatan pameran penanaman modal 6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 9. Laporan realisasi penanaman modal 10. Pembinaan aparaturnya penanaman modal tingkat kabupaten/kota 11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 179674315000. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 351334825000	51,14048	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-----	---	--------------------	--	--	---	----------	--















			permuseuman17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat				
--	--	--	--	--	--	--	--



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat 3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 5. Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat  &nbsp;  &nbsp;	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		51,14	



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya 2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)  &nbsp;	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		58,33	



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN&nbsp;	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)&nbsp;		28,38	-tidak pernah melakukan pendataan Arsip Statis- keterbatasan SDM dalam memahami aplikasi SIKN dan JIKN



2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK</li><li>2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK</li><li>3. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di kab/kota</li><li>4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab/kota yang sesuai NSPK</li><li>5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK</li><li>6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab/kota yang sesuai NSPK</li></ol> <p>&amp;nbsp;</p>	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		0	-Pemerintah Kab. Mahakam Ulu masih berusia sangat dini, sehingga belum pernah melakukan pemusnahan Arsip -Pemerintah Kab. Mahakam Ulu belum pernah melakukan pemusnahan Arsip -belum pernah dilakukan penyelamatan Arsip atas penggembungan dan pembubaran
-------	---	-----------	--	---	--	---	--





3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1) = 12$ $(\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1) = 8$	150	
-------	----------------	------------	---	--	--	-----	--





3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</li><li>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</li><li>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</li><li>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</li><li>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</li><li>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota</li><li>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri</li><li>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</li><li>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan</li><li>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat</li></ol> <p>&amp;nbsp;</p>	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota &nbsp; &nbsp;	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 314. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 4077	7,701741 5	
-------	----------------	------------	--	---	---	---------------	--



3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 403. Jumlah kamar yang tersedia = 124	325	
-------	----------------	------------	---	--------------------------	---	-----	--



3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</li><li>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</li><li>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</li><li>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</li><li>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</li><li>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota</li><li>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri</li><li>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</li><li>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan</li><li>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat</li></ol> <p>&amp;nbsp;</p>	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku  &nbsp;	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB. Total PDRB Berlaku	0	
-------	----------------	------------	--	--	--	---	--



3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata. Total realisasi PAD	0	
-------	----------------	------------	---	---	--	---	--

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota  n  &nbsp;	Produktivitas&nbsp; pertanian per hektar per tahunProduktivitas&nbsp; ; pertanian per tahun &nbsp;	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 5950. luas panen = 3484	170,7807 1	
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana  &nbsp;	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota  &nbsp;	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -171. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 325	- 52,61538	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN





3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pusat perbelanjaan</li><li>b. Toko swalayan</li></ol></li><li>2. Persentase penerbitan TDG</li><li>3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG</li><li>4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :</li><li>5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota</li><li>6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu</li><li>7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</li><li>8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu</li></ol> <p>&amp;nbsp;</p>	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)  &nbsp;	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 328. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 733	44,74761 3	
-------	----------------	-------------	--	--	--	---------------	--



No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan  &nbsp;	Persentase kinerja realisasi pupuk  &nbsp;	Realisasi = 0. RDKK = 0	0	
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku  &nbsp;  &nbsp;	Persentase alat &ndash; alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku  &nbsp;	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 0. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 0	0	



























No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
						Capaian	Keterangan
4.e.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) &nbsp; &nbsp;	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 167110229431. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 184930985210	90,36356 4	
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)&nbsp;&nbsp;p; &nbsp; &nbsp; &nbsp;	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 7. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12	58,33333 3	

Sumber: [https://elppd.kemendagri.go.id/trx\\_ikk](https://elppd.kemendagri.go.id/trx_ikk) Tahun 2023

Pemerintah  
Kabupaten Mahakam Ulu



# **AKINTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

**Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu  
Tahun 2023**





### 2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu fondasi utama dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Salah satu kewajiban instansi pemerintah adalah mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan yang termasuk dalam akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Komitmen pemerintah pusat terhadap kinerja dirumuskan dalam bentuk penerapan anggaran dan sekaligus manajemen berbasis kinerja. Hal tersebut mengandung makna bahwa capaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan tertuang pada dokumen perencanaan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara tegas dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah membandingkan antara indikator dan target strategis yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.





### 3.1 Pengukuran Kinerja 2023

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (realisasi positif), maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus 2 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (realiasi negatif), maka digunakan rumus sebagai berikut:



$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan diatas dapat ditarik kesimpulan atas tingkat efisiensi kinerja setiap sasaran strategis dengan skala interval sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja**

N o	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Kemudian pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Perhitungan Penyerapan Anggaran**

Keterangan	Rumus
<b>Penyerapan Anggaran</b>	Penyerapan Anggaran (PA) = $\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Alokasi Anggaran}} \times 100\%$

Sumber: Tim Penyusun, 2024



Penilaian capaian kinerja untuk setiap indicator kinerja sasaran menggunakan % (persentase) capaian kinerja. Sedangkan penilaian capaian kinerja sasaran untuk kelompok indikator (lebih dari satu indicator), maka kesimpulan capaian kinerja menggunakan metode composite (rata-rata capaian kinerja seluruh kelompok indikator). Hasil nilai composite ini dihitung dengan menambahkan hasil persentase (%) capaian kinerja setiap indikator (dalam kelompok indikator sasaran) dan dibagi dengan jumlah indikator yang ada di dalam kelompok tersebut.

Efisiensi merupakan tingkat kehematan dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam artian bahwa efisiensi berarti memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya. Rumus dalam penghitungan efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterangan	Rumus
Efisiensi	$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Capaian Anggaran}}$

Keterangan :

- Apabila nilai efisiensi kurang dari 1 maka tidak efisien
- Apabila nilai efisiensi 1 maka impas
- Apabila nilai efisiensi lebih dari 1 maka efisien





### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

#### Sasaran 1 Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kecamatan

**Tabel 3. 3 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kecamatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	5%	13,83%	276,6%	5%	5,98%	100%

Konektivitas antarwilayah memiliki peran penting dalam perkembangan suatu negara. Ini mengacu pada terhubungnya wilayah-wilayah dalam suatu negara melalui berbagai sarana transportasi dan infrastruktur. Di Indonesia, upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

1. Pembangunan Infrastruktur: Pemerintah membangun jalan, jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan angkutan masal seperti MRT untuk menghubungkan wilayah-wilayah. Ini membantu pemerataan pembangunan dan memfasilitasi mobilitas penduduk.
2. Peningkatan Aksesibilitas Wilayah: Konektivitas antarwilayah memudahkan akses dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Ini memungkinkan pengembangan wilayah demi kesejahteraan masyarakat.
3. Akses Sumber Daya: Konektivitas memudahkan akses sumber daya dan produk dari tempat asalnya ke wilayah lain. Misalnya, barang dan sumber daya dapat dikirim dari satu wilayah ke wilayah lain.
4. Peningkatan Pelayanan Umum: Konektivitas antarwilayah juga berdampak pada pelayanan umum. Ini termasuk pasokan air



bersih, aliran listrik, pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan, dan keamanan

Dengan meningkatkan konektivitas antarwilayah, kita dapat memperkuat ekonomi, meratakan pembangunan, dan memajukan kesejahteraan rakyat.

Kondisi baik ini penting untuk memastikan mobilitas dan aksesibilitas yang optimal bagi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota. Semoga upaya pemeliharaan dan perbaikan terus dilakukan untuk memastikan kondisi jalan tetap baik dan aman bagi pengguna. Berdasarkan dengan capaian diatas perbandingan kinerja antara tahun 2023 dengan 2022 adalah mengalami penurunan akan tetapi capaian masih berada di angka 100%. Pada tahun 2023 realisasi kinerja berada di angka 5,98% dengan target 5% sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, capaian kinerja mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2022 realisasi data berada di angka 13,83% dengan target 5% sehingga mengalami penurunan dari segi capaian.

**Tabel 3. 4 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kecamatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	5%	5,98%	100%	30%	19,93%

Capaian persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah 19,93% dengan target akhir RPJMD adalah 30% dan realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah 5,98% sehingga capaiannya berada di angka 19,93%.

**Tabel 3. 5 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kecamatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	5%	5,98%	100%	67,42%	9%

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 9% dengan melakukan perbandingan antara realisasi kerja kabupaten dengan realisasi nasional sehingga capaiannya adalah sebesar 9%.

**Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan		
1	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kecamatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	5%	5,98%	100%	<p>1. Intervensi anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan dapat membantu dalam pembangunan jalan karena kebutuhan pembangunan jalan diperlukan untuk konektivitas antar daerah, pembangunan jalan kabupaten difokuskan di daerah ibukota kabupaten untuk prioritas lima tahun ini.</p> <p>2. Pembangunan di Ibukota kabupaten difokuskan karena lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku dibandingkan dengan zona 1 atau zona 2</p> <p>3. Pembangunan jalan dan jembatan</p>			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan		
						juga diberikan bantuan oleh pusat melalui APBN dengan DAK Bankeu dengan pembangunan Zona 3 untuk kawasan prioritas nasional			



Tabel di atas menampilkan hasil analisis mengenai analisis keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam memperbaiki kinerja. Analisis keberhasilan untuk Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam) adalah

- a. Intervensi anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan dapat membantu dalam pembangunan jalan karena kebutuhan pembangunan jalan diperlukan untuk konektivitas antar daerah, pembangunan jalan kabupaten difokuskan di daerah ibukota kabupaten untuk prioritas lima tahun ini.
- b. Pembangunan di Ibukota kabupaten difokuskan karena lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku dibandingkan dengan zona 1 atau zona 2
- c. Pembangunan jalan dan jembatan juga diberikan bantuan oleh pusat melalui APBN dengan DAK Bankeu dengan pembangunan Zona 3 untuk kawasan prioritas nasional

**Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kecamatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	5%	5,98%	100%	MENUNJANG

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan. Berdasarkan dengan hasil analisis dapat diberikan kesimpulan bahwa Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik menunjang Sasaran Meningkatkan Konektivitas antar wilayah kecamatan. Adapun program-program yang menunjang indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:



1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Program pengelolaan Penerbangan

**Tabel 3. 8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah Kecamatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	1,35%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Indikator kinerja sasaran Persentase Jalan Kabupaten dalam Dalam kondisi baik efisien dalam penggunaan sumber dayanya dengan tingkat efisiensi sebesar 1,35%. Tingkat efisiensi dihitung berdasarkan capaian kinerja dikurangi dengan capaian anggaran sehingga diperoleh nilai efisiensi. Adapun capaian anggaran dalam indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 73,85%

**Sasaran 2 Meningkatkan Cakupan Rumah tangga uang teraliri aliran bersih**

**Tabel 3. 9 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Cakupan Rumah tangga uang teraliri aliran bersih	Persentase Capaian akses air minum layak	26%	9,43%	36,27%	27%	40,83%	151%

Meningkatnya cakupan rumah tangga dengan akses teraliri aliran bersih merupakan langkah positif dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Akses air minum merujuk pada air yang berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pergi-pulang (PP),



termasuk waktu antrean. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari Perusahaan Air Minum (PAM), mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan. Meskipun ada peningkatan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memastikan semua rumah tangga di Indonesia memiliki akses air minum yang layak dan aman.

Persentase capaian akses air minum layak di Indonesia mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap air minum yang memadai dan aman. Berdasarkan dengan data diatas. Realisasi kinerja Persentase Capaian akses air minum layak pada tahun 2023 dengan target 27% realisasinya adalah sebesar 40,83% dengan capaian sebesar 151%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, capaian pada indikator ini mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2022 capaian kinerja berada di angka 36,27% dengan rincian target sebesar 26% dengan realisasi mencapai 9,43%.

**Tabel 3. 10 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Cakupan Rumah tangga uang teraliri aliran bersih	Persentase Capaian akses air minum layak	27%	40,83%	151%	30%	136,1%

Persentase Capaian akses air minum layak tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 136,1% dengan target akhir RPJMD sebesar 30% dan realisasi pada tahun 2023 berada di angka 40,83%.





**Tabel 3. 11 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Cakupan Rumah tangga uang teraliri aliran bersih	Persentase Capaian akses air minum layak	27%	40,83%	151%	91,72 %	45%

Persentase Capaian akses air minum layak baik pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah 45%. Hal ini didapat dari realisasi nasional yang berada di angka 91,72% dibandingkan dengan realisasi kinerja di Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di angka 40,83%.

**Tabel 3. 12 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Meningkatnya Cakupan Rumah tangga uang teraliri aliran bersih	Persentase Capaian akses air minum layak	27%	40,83%	151%	<p>1. meningkatkan kapasitas air SPAM, perpipaan, non perpipaan.</p> <p>2. Membentuk UPT Air Minum untuk memudahkan koordinasi kegiatan air SPAM</p> <p>3. Mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan SPAM</p> <p>4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Hubung;</p>		



Tabel di atas menampilkan hasil analisis mengenai analisis keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam memperbaiki kinerja. Analisis untuk Persentase Capaian akses air minum layak adalah

1. Meningkatkan kapasitas air SPAM, perpipaan, non perpipaan.
2. Membentuk UPT Air Minum untuk memudahkan koordinasi kegiatan air SPAM
3. Mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan SPAM
4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Hubung;

Analisis diatas adalah berdasarkan dengan capaian kinerja yang berhasil meraih target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.13 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Cakupan Rumah tangga yang teraliri aliran bersih	Persentase Capaian akses air minum layak	27%	40,83%	151%	MENUNJANG

Tabel di atas bahwa Persentase Capaian Akses Air minum layak Menunjang sasaran meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri aliran bersih. Adapun program yang menunjang indikator kinerja sasaran adalah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.



**Tabel 3.14 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya Cakupan Rumah tangga uang teraliri aliran bersih	Persentase Capaian akses air minum layak	1,67%	EFISIEN

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Persentase Capaian akses air minum layak efisien dalam penggunaan sumber dayanya dengan tingkat efisiensi sebesar 1,67% yang didapat dari capaian kinerja dibagi dengan capaian anggaran dengan 90,30%.

### **Sasaran 3 Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik**

**Tabel 3.15 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase KK yang dialiri Listrik	95,88 %	60,64%	63,25%	95,93 %	23,57%	25%

Di era modern ini, fenomena meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik menjadi sebuah gambaran yang mencerminkan perkembangan sosial dan teknologi. Transformasi ini membawa dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dari segi kenyamanan namun juga pertanda terciptanya aksesibilitas energi yang lebih merata. Kehadiran listrik di rumah tangga memberikan manfaat yang tak terbantahkan. Seiring meningkatnya cakupan ini, kualitas hidup meningkat secara keseluruhan. Persentase Rumah Tangga yang Dialiri Listrik di Indonesia menggambarkan sejauh mana akses listrik telah menjangkau masyarakat. Pada tahun 2023 target kinerja berada di



angka 95,93% dengan realisasi kinerja berada di angka 23,57% sehingga capaiannya berada di angka 25%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja berada di angka 60,64% dengan target 95,88% dengan capaian sebesar 63,25%. Sehingga apabila dibandingkan capaian kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2022 mengalami penurunan kinerja.

**Tabel 3. 16 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase KK yang dialiri Listrik	95,93 %	23,57%	25%	96,16	24,51%

Capaian Persentase KK yang dialiri Listrik pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 24,51% dikarenakan target akhir RPJMD berada di angka 96,16% dan realisasi tahun 2023 berada di angka 23,57%.

**Tabel 3. 17 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase KK yang dialiri Listrik	95,93 %	23,57%	25%	99,78%	24%

Capaian Persentase KK yang dialiri Listrik pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 24% dengan angka nasional berada di angka 99,78% sedangkan realisasi kinerja Kabupaten Mahakam Ulu berada di angka 23,57%.

**Tabel 3. 18 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase KK yang dialiri Listrik	95,93%	23,57%	25%		Rumah yang teraliri listrik di Kabupaten Mahakam Ulu dibagi menjadi 3 yakni dari PLN, Kampung, komunal, dan mandiri. Penghitungan yang dimiliki oleh DPUPR untuk rumah tangga adalah yang bersumber dari PLN dan komunal sekitar 1.158 KK dan masih jauh apabila dibandingkan dengan jumlah KK di Mahakam Ulu sebanyak 12.519	Perlu dilakukan perhitungan ulang terkait dengan jumlah KK yang teraliri listrik baik yang bersumber dari PLN ataupun listrik mandiri sehingga dalam proses kedepannya, DPUPR dapat memetakan wilayah yang menjadi prioritas dalam penyaluran listrik kedepannya.



Tabel di atas menampilkan hasil mengenai keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam memperbaiki kinerja. Analisis kegagalan capaian kinerja untuk Persentase KK yang dialiri Listrik adalah

Rumah yang teraliri listrik di Kabupaten Mahakam Ulu dibagi menjadi 3 yakni dari PLN, Kampung, komunal, dan mandiri. Penghitungan yang dimiliki oleh DPUPR untuk rumah tangga adalah yang bersumber dari PLN dan komunal sekitar 1.158 KK dan masih jauh apabila dibandingkan dengan jumlah KK di Mahakam Ulu sebanyak 12.519. sehingga dari data yang dimiliki capaian kinerja dari rumah yang teraliri listrik menjadi sangat rendah. Adapun solusi yang dapat diberikan adalah diperlukan perhitungan ulang terkait dengan jumlah KK yang teraliri listrik baik yang bersumber dari PLN ataupun listrik mandiri sehingga dalam proses kedepannya, DPUPR dapat memetakan wilayah yang menjadi prioritas dalam penyaluran listrik kedepannya.

**Tabel 3.19 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase KK yang dialiri Listrik	95,93 %	23,57%	25%	TIDAK MENUNJANG

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase KK yang dialiri listrik tidak menunjang sasaran meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik dikarenakan capaian kinerja yang rendah. Adapun program yang menunjang persentase KK yang dialiri listrik adalah

1. Program Kawasan Pemukiman
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)



**Tabel 3. 20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase KK yang dialiri Listrik	0,25%	TIDAK EFISIEN

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Persentase KK yang dialiri Listrik tidak efisien dalam penggunaan sumber daya dikarenakan rendahnya capaian kinerja pada tahun 2023, adapun angka efisiensi penggunaan sumber daya berada di angka 0,25%.

#### **Sasaran 4 Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet**

**Tabel 3.21 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Targe t	Realisa si	Capaian (%)	Targe t	Realisa si	Capaian (%)
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet	Cakupan Layanan telekomunikasi	89	90,08	101,21 %	94%	94,64%	101%

Dalam era informasi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa jaringan telekomunikasi dan internet menjadi tulang punggung bagi kemajuan teknologi dan sosial. Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan ini mencerminkan pergeseran global menuju masyarakat yang terhubung secara digital. Transformasi ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari konektivitas yang lebih baik hingga perubahan pola pikir dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar. penggunaan internet di Indonesia telah meningkat hampir empat kali lipat dalam dekade terakhir, setengah dari populasi orang dewasa Indonesia masih belum dapat mengakses internet. Selain itu, hampir semua pengguna internet di Indonesia mengakses melalui perangkat seluler. Meskipun





internet seluler (3G atau 4G/LTE) menjadi layanan yang paling banyak digunakan di Indonesia, masih tidak setara dengan internet kabel, baik dalam hal kapasitas, kualitas layanan, kinerja bandwidth tinggi, dan efisiensi biaya sehingga cakupan layanan telekomunikasi menjadi instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia di era informasi digital.

Pada tahun 2023 target kinerja yang telah ditetapkan adalah 94% dengan realisasi kinerja adalah 94,64% dengan capaian sebesar 101%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya cenderung konsisten yakni pada tahun 2022 target kinerja berada di angka 89% dengan realisasi kinerja sebesar 90% sehingga capaian kinerja tahun 2022 juga berada di angka 101%.

**Tabel 3. 22 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet	Cakupan Layanan telekomunikasi	94%	94,64%	101%	100%	94,64%

Capaian Cakupan Layanan telekomunikasi pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 94,64%. Target akhir RPJMD adalah 100% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2023 berada di angka 94,64%.

**Tabel 3. 23 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet	Cakupan Layanan telekomunikasi	94%	94,64%	101%	78,19%	121%



Cakupan Layanan telekomunikasi pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah 121%, hal ini didapat dari realisasi nasional yang berada di angka 78,19% sedangkan realisasi kinerja Kabupaten Mahakam Ulu berada di angka 94,64%.

**Tabel 3. 24 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet	Cakupan Layanan telekomunikasi	94%	94,64 %	101%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pembangunan akses Tower Bakti Asih sejumlah 20 tower yang tersebar di mahakam ulu</li> <li>- Adanya koordinasi antara diskominfo dengan kemenkominfo dan bakti terkait dengan penyelenggaraan kerja sama dalam hal pemenuhan layanan telekomunikasi.</li> <li>- Penyediaan</li> </ul>		



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
						internet dan telekomunikasi terus ditingkatkan. - Ada pembangunan kabel optik yang melintasi beberapa kecamatan sehingga penerapannya maksimal.		



**Tabel 3.25 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet	Cakupan Layanan telekomunikasi	94%	94,64%	101%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan. Berdasarkan dengan uraian sebelumnya, cakupan layanan telekomunikasi menunjang sasaran Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet. Adapun program yang menunjang cakupan layanan telekomunikasi adalah

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika

**Tabel 3. 26 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Internet	Cakupan Layanan telekomunikasi	1,02%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Cakupan layanan telekomunikasi efisien dalam penggunaan sumber daya, dengan tingkat efisiensi berada di angka 1,02%.



## Sasaran 5 Meningkatnya Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni

**Tabel 3. 27 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	18,43 %	29,40%	159,52 %	20,43 %	29,40%	144%

Fenomena meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni adalah cerminan dari upaya masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan standar kualitas hunian. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan kesejahteraan material, namun juga kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat dan layak huni bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi. Di tengah upaya global untuk meningkatkan standar hidup, rumah layak huni menjadi pilar utama dalam memastikan kualitas hidup yang baik bagi setiap individu. Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi standar ini mencerminkan komitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat bagi keluarga. Rasio rumah layak huni mengacu pada perbandingan antara jumlah rumah layak huni yang ada dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Dalam konteks Indonesia, rumah layak huni memiliki kriteria yang harus dipenuhi, seperti:

1. Luas Bangunan: Setiap rumah layak huni harus memiliki luas minimal 7,2meter persegi per orang
2. Kualitas Fisik: Rumah layak huni harus memiliki struktur konstruksi yang kuat, serta jenis atap, dinding, dan lantai yang memenuhi standar.
3. Fasilitas: Fasilitas di rumah layak huni meliputi luas lantai per kapita, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).



4. Kesehatan dan Keamanan: Rumah layak huni harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuni.

Berdasarkan dengan tabel diatas pada tahun 2023 realisasi kinerja berada di angka 20,43% dengan realisasi kinerja berada di angka 29,40% dengan capaian kinerja adalah 144%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak terdapat penambahan kinerja, pada tahun 2022 realisasi kinerja berada di angka yang sama yakni 29,40% dengan target 20,43% dengan capaian 159,52% atau mengalami penurunan capaian kinerja.

**Tabel 3. 28 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	20,43 %	29,40%	144%	26,43%	111,24%

Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 111,24%. Hal ini dikarenakan target akhir RPJMD adalah sebesar 26,43% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 adalah 29,40%.

**Tabel 3. 29 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	20,43 %	29,40%	144%	63,15%	47%

Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 47% dengan



realisasi nasional berada di angka 63,15% sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 29,40% sehingga capaiannya adalah sebesar 47%



**Tabel 3. 30 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Meningkatnya Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	20,43%	29,40 %	144%		Penyebab rasio rumah layak huni mengalami kegagalan adalah dikarenakan adanya penghitungan ulang terkait dengan rumah layak huni. Penghitungan ini didasarkan kepada perbedaan pandangan mengenai definisi rumah layak huni antara kementerian dengan pemerintah daerah.	Perlu penghitungan ulang secara matang mengenai rasio rumah layak huni dengan memperhatikan definisi yang sesuai dengan pandangan kementerian terkait



Tabel di atas menampilkan hasil analisis mengenai keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam memperbaiki kinerja. Analisis untuk penyebab kegagalan Rasio Rumah Layak Huni adalah Penyebab rasio rumah layak huni mengalami kegagalan adalah dikarenakan adanya penghitungan ulang terkait dengan rumah layak huni. Penghitungan ini didasarkan kepada perbedaan pandangan mengenai defisini rumah layak huni antara kementrian dengan pemerintah daerah sehingga program kerja ini tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023. Adapun capaian kinerja didapatkan dari perhitungan tahun 2022 sehingga apabila diperhatikan maka tidak ada peningkatan realisasi kinerja pada tahun 2023. Rasio rumah layak huni akan dilakukan perhitungan ulang untuk tahun selanjutnya.

**Tabel 3.31 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	20,43%	29,40%	144%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio rumah layak huni menunjang sasaran Meningkatkan Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni dikarenakan pada tahun 2023 realisasi 29,40% sudah melebihi target 20,43%, adapun program yang menunjang adalah Program Pengembangan Perumahan

**Tabel 3. 32 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya Jumlah Rumah yang Memenuhi Persyaratan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	N/A	N/A



Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Rasio rumah layak huni tidak bisa dilakukan penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan indikator kinerja sasaran ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023.

### **Sasaran 6 Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara**

#### **Indikator 1 : Indeks Kualitas Air**

**Tabel 3. 33 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64,71	61,88	95,63%	64,81	61,28%	95%



Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air yang diukur. IKA digunakan untuk menilai tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diijinkan. Semakin tinggi nilai IKA, semakin buruk kualitas air di suatu wilayah. Oleh karena itu, pemantauan IKA penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan manusia.

Pada tahun 2023 capaian kinerja Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air adalah sebesar 95% dengan rincian target berada di angka 64,81 dengan realisasi adalah sebesar 61,28. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan meskipun tidak signifikan, pada tahun 2022 capaian berada di angka 95,63% dengan rincian target kinerja berada di angka 64,71 dengan realisasi berada di angka 61,88.

**Tabel 3. 34 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64,81	61,28	95%	65,11	94%



Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 94% dengan rincian realisasi kinerja pada tahun 2023 berada di angka 61,28 dengan target akhir RPJMD berada di angka 65,11 sehingga capainnya sebesar 94%.

**Tabel 3. 35 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64,81	61,28	95%	54,59	112%

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 112% hal ini didapat dari rincian angka Indeks Kualitas Air Nasional berada di angka 54,59 sedangkan realisasi kinerja mahakam ulu berada di angka 61,28 sehingga capainnya berada di angka 112%.

**Tabel 3. 36 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64,81	61,28%	95%		<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertambahnya jumlah penduduk yang masih menggunakan jamban disungai sehingga mempengaruhi indeks kualitas air.</li> <li>Adanya aktivitas Pembangunan pembukaan jalan maupun wilayah pemukiman baru yang menimbulkan timbulan sampah baru.</li> <li>Belum maksimalnya pengelolaan timbulan sampah tingkat kampung.</li> </ol>	Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pembangunan MCK sehingga akan mengurangi penduduk yang masih menggunakan jamban di sungai. Pembangunan Tempat pengelolaan sampah terpadu di setiap kampung untuk mengatasi permasalahan tersebut.



**Tabel 3.37 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64,81	61,28	95%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan bahwa Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air menunjang sasaran Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara pada tahun 2023 tidak terlaksana program kerja tersebut pada tahun 2023, adapun program yang menunjang adalah Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

**Tabel 3. 38 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	1,06	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air efisien penggunaan sumber daya dengan angka efisien berada di angka 1,06.



## Indikator 2: Indeks Kualitas Udara

**Tabel 3. 37 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	92,9	92,56	99,63%	93,01	94,43%	102%

**Indeks Kualitas Udara (IKU)** adalah ukuran yang digunakan untuk menilai **polusi udara**. Polusi udara yang meningkat akan meningkatkan nilai IKU. Semakin tinggi nilai IKU untuk suatu wilayah, udara di wilayah tersebut menjadi semakin berbahaya pula bagi kesehatan makhluk hidup. IKU dihitung berdasarkan pengukuran beberapa parameter kualitas udara. IKU digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara di suatu wilayah. Dengan mengetahui nilai IKU, kita dapat mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan kita, seperti mengurangi aktivitas di luar ruangan saat polusi udara tinggi atau menggunakan masker wajah.

Indeks kualitas Udara pada tahun 2023 capaian kinerja berada di angka 102% dengan rincian realisasi kinerja berada di angka 94,43% dengan target kinerja 93,01%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dengan capaian kinerja sebesar 99,63% dengan target kinerja sebesar 92,9 dengan realisasi 92,56 dengan capain kinerja 99,63%.

**Tabel 3. 38 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	93,01	94,43%	102%	93,34	101%





Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD capainnya sebesar 101% dengan rincian target akhir RPJMD adalah 93,34 dengan realisasi 94,43 sehingga capainnya adalah sebesar 101%.

**Tabel 3. 39 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	93,01	94,43%	102%	88,67%	106%

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 106% dengan rincian realisasi nasional berada di angka 88,67% dengan realisasi kinerja berada di angka 94,43% sehingga capaiannya berada di angka 102%.

**Tabel 3. 40 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	93,01	94,43 %	102%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya upaya pengendalian dari pelaku usaha yang memiliki industri dengan upaya pengendalian bertahap sesuai dengan parameter yang tercemar</li> <li>- Adanya penurunan pembukaan wilayah hutan yang mempengaruhi tingkat penyerapan karbon sehingga emisi yang dikeluarkan menjadi</li> </ul>		



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
						<p>berkurang dan kondisi kualitas udara semakin lebih baik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membuka lahan dengan tidak membakar</li><li>- Belum adanya kegiatan industri dan transportasi yang masih minim sehingga akumulasi emisi yang ditimbulkan tidak terlalu berdampak</li><li>- Meingkatkan peran masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara</li></ul>		

**Tabel 3.41 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian  
Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	93,01	94,43%	102%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan. Hasil pengukuran indeks Kualitas udara menunjang sasaran menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara. Adapun program yang menunjang adalah Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).

**Tabel 3. 42 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	1,08%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara efisien dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi berada di angka 1,08%.



### Indikator 3: Indeks Kualitas Lahan

**Tabel 3.43 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100	100	100%	100	100	100%

**Indeks Kualitas Lahan (IKL)** adalah nilai yang menggambarkan **kualitas lahan** dalam suatu wilayah. IKL terdiri dari dua komponen utama:

1. **Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL):** Mengukur kondisi tutupan lahan, termasuk hutan dan vegetasi non-hutan. IKTL memberikan informasi tentang keberlanjutan ekosistem dan fungsi lahan.
2. **Indeks Kualitas Ekosistem Gambut:** Khusus untuk lahan gambut, menggambarkan kondisi ekosistem gambut, termasuk tingkat degradasi dan kerentanannya terhadap perubahan iklim.

IKL digunakan untuk memahami dan mengelola kualitas lahan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perlindungan atau restorasi. Dengan memantau IKL, kita dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi lahan dan ekosistem.

Berdasarkan dengan tabel diatas, pada tahun 2023 capaian kinerja berada di angka 100% dengan realisasi dan target kinerja berada di angka 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja ini cenderung konsisten apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan capaian kinerja berada di angka 100% dengan target dan realisasi berada di angka 100.



**Tabel 3. 44 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100	100%	100%	100	100%	100%

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD capainnya adalah sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% dengan target akhir RPJMD adalah 100 dan realisasi kinerja pada tahun 2023 sudah mencapai angka 100.

**Tabel 3. 45 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100	100%	100%	61,79%	100%	162%

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 162% dengan rincian target berada di angka 61,79% dengan realisasi pada tahun 2023 adalah 100% sehingga capainnya sebesar 162%.

**Tabel 3. 46 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran instansi terkait dalam memberikan penyuluhan dan menjalankan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan</li> <li>- Luas kawasan termasuk Hutan mahulu termasuk kurang lebih 85% sama dengan 100%.</li> </ul>		



**Tabel 3.47 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100	100	100	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan bahwa Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan menunjang sasaran menurunnya tingkat pencemaran tanah, air, dan udara. Adapun program yang mendukung Indeks Kualitas Lahan adalah Program Pengelolaan Persampahan

**Tabel 3. 48 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	1,12%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan efisien dalam penggunaan sumber daya dengan angka efisiensi 1,12%.

**Sasaran 7 Meningkatnya Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan**

**Tabel 3. 49 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	75,49 %	74,53%	98,73%	75,65 %	73,56%	97%





Lapangan usaha pertanian memiliki kontribusi yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari memenuhi kebutuhan pangan hingga mendukung perekonomian nasional. Sebagai salah satu sektor utama dalam struktur ekonomi suatu negara, pertanian memiliki peran yang tidak bisa diremehkan dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 kontribusi lapangan usaha berada di angka 73,56% dengan target adalah 75,65% sehingga realisasi kinerjanya adalah 97%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja mengalami penurunan, pada tahun 2022 realisasi kinerja berada di angka 74,53% dengan target kinerja berada di angka 75,49% sehingga capaian kinerja berada di angka 98,73%.

**Tabel 3. 50 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	75,65 %	73,56%	97%	76,12 %	96,64%

Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%) pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 96,64% dengan rincian target akhir RPJMD adalah sebesar 76,12% dan realisasi sebesar 73,56% sehingga capaian kinerja antara tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 96,64%.

**Tabel 3. 51 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	75,65 %	73,56%	97%	12,53 %	587%

Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%) pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 587% dengan realisasi nasional berada di angka 12,53% sedangkan realisasi kinerja sebesar 73,56% sehingga apabila dibandingkan antara realisasi kinerja Mahakam Ulu dengan realisasi kinerja nasional capaian kinerjanya berada di angka 587%.

**Tabel 3. 52 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Meningkatnya Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	75,65%	73,56%	97%		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih minimnya hasil produksi tanaman pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;</li> <li>- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola modernisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;</li> <li>- Masyarakat masih menganut sistem pertanian tradisional;</li> <li>- Manajemen pengelolaan yang masih rendah pada usaha tanaman pertanian, perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan bantuan alsinta, saprodi dan modal usaha;</li> <li>- Pembagian lahan pertanian kepada kelompok tani;</li> <li>- Pengembangan kawasan pertanian;</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM</li> <li>- Revitalisasi kelompok tani</li> <li>- Optimalisasi peran dan fungsi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)</li> <li>- Menjalin kemitraan dengan</li> </ul>



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
							<p>peternakan dan perikanan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya jumlah partisipan dalam usaha tanaman pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;</li> <li>- Mahalnya biaya distribusi hasil pada usaha tanaman pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;</li> <li>- Masih minimnya penganeekaragaman bahan pangan di Mahakam Ulu;</li> <li>- Rendahnya kualitas SDM petani yang cenderung didominasi pendidikan SMP;</li> <li>- Pemasaran produk pertanian yang masih kurang;</li> </ul>	<p>perusahaan besar dan BUMN untuk menampung hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.</p>



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
							- Minimnya peran subsektor di luar kehutanan	



**Tabel 3.53 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	75,65 %	73,56%	97%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%) menunjang sasaran Meningkatkan Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan dalam pelaksanaan program kerjanya. Program yang menunjang kontribusi Lapangan Usaha Pertanian dalam arti luas adalah

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
5. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
6. Program Penyuluhan Pertanian

**Tabel 3. 54 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya Produktivitas Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	1,38%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%) efisien dalam penggunaan sumber dayanya dengan tingkat efisiensi sebesar 1,38%.



### Sasaran 8 Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam

**Tabel 3. 55 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	19,27	19,18	99,53%	20,21 %	26,44%	131%

Lapangan usaha perdagangan dan jasa memiliki peran yang sangat vital dalam ekonomi suatu negara. Sebagai sektor yang menghubungkan produsen dengan konsumen, serta menyediakan berbagai layanan penting bagi masyarakat, kontribusi dari sektor ini tidak dapat diabaikan. lapangan usaha perdagangan dan jasa merupakan tulang punggung ekonomi yang berperan penting dalam menyediakan layanan, memperkaya pilihan konsumen, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya yang beragam memastikan berlangsungnya aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang pada akhirnya membawa manfaat bagi masyarakat luas serta perkembangan negara secara keseluruhan.

Capaian kinerja pada tahun 2023 berada di angka 131% dengan rincian target kinerja berada di angka 20,21% dengan realisasi kinerja berada di angka 26,44%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja mengalami peningkatan, pada tahun 2022 capaian kinerja berada di angka 99,56% dengan rincian target kinerja berada di angka 19,27% sedangkan realisasi kinerja berada di angka 19,18%



**Tabel 3. 56 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	20,21 %	26,44%	131%	23,20%	113,97%

Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%) pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 113,97%. Angka ini didapatkan dari realisasi tahun 2023 yang berada di angka 26,44% dan apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD yang berada di angka 23,20% capaian kinerja berada di angka 113,97%.

**Tabel 3. 57 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	20,21 %	26,44%	131%	19,89%	133%

Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%) apabila dibandingkan dengan realisasi nasional capaian kinerja berada di angka 133%. Hal ini didapat dari angka realisasi nasional yang berada di angka 19,89% sedangkan realisasi Mahakam Ulu adalah 26,44%. Sehingga capaian yang didapat berada di angka 131%.



**Tabel 3. 58 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	20,21%	26,44%	131%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk baik secara online maupun offline</li> <li>-Melakukan upaya pembinaan kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam untuk melihat potensi peluang usaha ;</li> </ul>		



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
						- Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat / bimtek pendamping, mengikutsertakan beberapa pendamping dalam program/kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain misalnya pameran.		



**Tabel 3.59 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	20,21 %	26,44%	131%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan kontribusi lapangan usaha perdagangan dan jasa menunjang sasaran Meningkatkan Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam. Adapaun program yang menunjang adalah

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
2. Program Pengembangan UMKM
3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
4. Program Pemasaran Pariwisata
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

**Tabel 3. 60 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya Peran Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	2,91%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%) efisien dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi berada di angka 2,91%.



## Sasaran 9 Meningkatnya Investasi Daerah

**Tabel 3. 61 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar)	2.986,34	321	10,76%	3.075,94	531	17%

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dalam milyar adalah indikator yang penting dalam menggambarkan dinamika perekonomian suatu negara. Investasi dalam skala besar ini mencakup berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri, pertanian, infrastruktur, hingga jasa. jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dalam milyar adalah cermin dari kegiatan ekonomi yang berjalan di dalam suatu negara. Investasi dalam skala besar ini memiliki dampak yang luas, mulai dari pertumbuhan ekonomi, diversifikasi sektor, peningkatan infrastruktur, hingga kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan para pemangku kepentingan ekonomi perlu terus mendorong investasi yang berkualitas untuk memperkuat fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan.

Capaian kinerja pada tahun 2023 berada di angka 17%, dengan rincian target kinerja berada di angka 3.075 Milyar sedangkan realisasi kinerja berada di angka 531 Milyar. Capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 dimana pada tahun 2022 capaian kinerja berada di angka 10,76% dengan realisasi kinerja berada di angka 321 Milyar dengan target kinerja berada di angka 2.986 Milyar.

**Tabel 3. 62 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar)	3.075,94	531	17%	3.361.161	531	15,8%

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar) pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 15,8%. Angka ini didapat dari realisasi pada tahun 2023 yang berada di angka 531 Milyar dengan target akhir RPJMD adalah 3.361,16 Milyar. Sehingga diperlukan upaya lebih untuk mencapai target akhir RPJMD.

**Tabel 3. 63 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar)	3.075,94	531	17%	1.418.900	531	0%

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar) pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 0%. Hal ini dikarenakan realisasi nasional yang berada di angka 1.418.900 Milyar tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di angka 531 Milyar.

**Tabel 3. 64 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar)	3.075,94	531	17%		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah aparat yang menguasai teknis perizinan relatif masih sangat sedikit;</li> <li>- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;</li> <li>- Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan;</li> <li>- Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengirim aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis agar menguasai teknis perizinan;</li> <li>- Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas aparatur;</li> <li>- Optimalisasi penyelenggara</li> </ul>

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
							<p>arti penting perizinan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat terbatas disebabkan akses dan promosi belum optimal;</li> <li>- Kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar yang masih minim.</li> </ul>	<p>an pelayanan perizinan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi akses dan promosi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)</li> <li>- Optimalisasi Kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar</li> </ul>



**Tabel 3.65 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar)	3.075,94	531	17%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar) menunjang Meningkatkan Investasi Daerah. Adapun program yang menunjang Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) adalah

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Pelayanan Penanaman Modal

**Tabel 3. 66 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar)	0,18%	Tidak Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar) tidak efisien dalam penggunaan sumber daya dengan efisiensi berada di angka 0,18%..

### Sasaran 10 Berkurangnya Angka Kemiskinan

**Tabel 3. 67 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Berkurangnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,02	11,55	80%	9,9	11,38%	85%





Angka kemiskinan di Indonesia dapat diukur dengan berbagai metode, termasuk tingkat kemiskinan, yang mengacu pada persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin, yang menghitung jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan merupakan angka yang menggambarkan jumlah individu atau keluarga yang hidup di bawah garis ke miskinan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal layak, dan akses layanan kesehatan.

Pada tahun 2023 capaian kinerja berada di angka 85% dengan realisasi kinerja berada di angka 11,38% dengan target 9,9%. Capaian ini sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 target kinerja berada di angka 10,02 dan realisasi kinerja berada di angka 11,55 sehingga capaian kinerja berada di angka 80%.

**Tabel 3. 68 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Berkurangnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,9	11,38%	85%	9,68%	84,3%

Capaian Angka Kemiskinan pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 84,3%. Angka ini didapat dari realisasi kinerja pada tahun 2023 yang masih berada di angka 11,38% dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang berada di angka 9,68%.

**Tabel 3. 69 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Berkurangnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,9	11,38%	85%	9,36%	84,1%

Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah 84,1%. Hal ini didapat dari realisasi kinerja pada tahun 2023 yang berada di angka 11,38% dibandingkan dengan realisasi nasional yang berada di angka 9,36% sehingga capaian kinerja Mahakam Ulu masih belum mendekati angka standar nasional.

**Tabel 3. 70 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Berkurangnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,9	11,38%	85%		1. Rata-rata pengeluaran penduduk miskin jauh dari garis kemiskinan dan ada ketimpangan tinggi pengeluaran antara penduduk miskin. Hal ini terlihat dari Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan yang tinggi pada tahun 2021.	1. Menciptakan sumber-sumber penghasil ekonomi masyarakat; 2. Memberikan kesejahteraan kepada petani; 3. Mendirikan balai pelatihan para pencari kerja ; 4. Menciptakan lapangan pekerjaan diberbagai sector.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
							<p>2. Ekonomi biaya tinggi yang disebabkan oleh tingginya biaya transpor ke dan dari Mahakam Ulu, sehingga harga barang di Mahulu menjadi mahal dan barang dari Mahulu relatif rendah (bargaining position yang rendah);</p> <p>3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana public;</p>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
							<p>4. Belum optimalnya pengembangan usaha pada sektor produktif ;</p> <p>5. Pertanian dilakukan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah sehingga hasilnya minim untuk perdagangan</p> <p>6. Pola bercocok tanam yang cenderung masih tradisional (berpindah-pindah) dan</p>	



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
							tergantung pada hasil hutan; 7. Kurangnya balai pelatihan untuk melatih para pencari kerja guna meningkatkan SDM; 8. Terbatasnya Lapangan pekerjaan	



**Tabel 3.71 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Berkurangnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,9	11,38%	85%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan. Angka Kemiskinan menunjang sasaran berkurangnya angka kemiskinan. Adapun program yang menunjang adalah

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

**Tabel 3. 72 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Berkurangnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	1,60%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, di indikator angka kemiskinan, penggunaan sumber daya masuk dalam efisiensi penggunaan sumber daya dengan nilai efisiensi berada di angka 1,60%.



### Sasaran 11 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

**Tabel 3. 73 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,6	2,44	53,04%	3,5%	2,09%	140%

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dapat dirumuskan sebagai berikut:  $TPT = (\text{Pencari Kerja} / \text{Angkatan Kerja}) \times 100 \%$ . Pengangguran terbuka berbeda dengan pengangguran tertutup, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengacu pada persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Orang yang termasuk dalam kategori pengangguran terbuka adalah:

1. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan sebagai pengangguran terbuka apabila ia tidak memiliki pekerjaan, sedang





mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau belum mulai bekerja meski sudah memiliki pekerjaan.

Berdasarkan dengan tabel diatas pada tahun 2023, capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2023 capaian kinerja berada di angka 140% dengan rincian target kinerja berada di angka 3,53% sedangkan pada tahun 2022 capaian kinerja berada di angka 53,4% dengan rincian target kinerja berada di angka 4,6 sedangkan realisasi berada di angka 2,44.

**Tabel 3. 74 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5%	2,09%	140%	3,01	110%

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 110%. Angka ini didapatkan dari target akhir RPJMD yang berada di angka 3,01% sedangkan realisasi tahun 2023 berada di angka 2,09% sehingga capaian antara target akhir RPJMD dengan realisasi tahun 2023 sebesar 110%.

**Tabel 3. 75 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5%	2,09%	140%	5,45%	210%

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional capaiannya adalah sebesar 210%. Angka ini didapat dari realisasi nasional yang berada di angka



5,45% sedangkan realisasi Mahakam Ulu untuk tingkat pengangguran berada di angka 2,09% sehingga capaian kinerja berada di angka 210%.

**Tabel 3. 76 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5%	2,09%	140%	<p>1. Peningkatan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada upaya menciptakan lapangan kerja atau program pada karya, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha;</p> <p>2. Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong</p>		



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
						hubungan industrial yang harmonis, optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif; 3. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal; 4. Mendorong berkembangnya		



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
						usaha dan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal bagi masyarakat lokal. 5. Menciptakan lapangan pekerjaan diberbagai sector.		



**Tabel 3.77 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5%	2,09%	140%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka menunjang menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Adapun program yang mendukung Tingkat Pengangguran Terbuka adalah:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

**Tabel 3. 78 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,79%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Angka efisiensi tingkat pengangguran terbuka berada di angka 1,79%.

### Sasaran 12 Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat

**Tabel 3. 79 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,46	8,36	98,82%	8,66	8,49	98%

Rata-rata lama sekolah menggambarkan lamanya pendidikan formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur



tertentu di masa mendatang. Ini adalah indikator penting untuk memahami tingkat pendidikan dan akses pendidikan di suatu negara. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin baik kesempatan pendidikan bagi penduduk.

Pada tahun 2023 capaian kinerja berada di angka 98%, angka ini didapat dari target kinerja yang berada di angka 8,66 sedangkan realisasi kinerja berada di angka 8,49. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 realisasi kinerja berada di angka 8,36 sedangkan target kinerja berada di angka 8,46 sehingga capaian pada tahun 2022 berada di angka 98,82%.

**Tabel 3. 80 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,66	8,49	98%	9,29	91,39%

Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 91,39. Angka ini didapat dari target akhir RPJMD yang berada di angka 9,29 sedangkan realisasi kinerja berada di angka 8,49 sehingga capaian kinerja berada di angka 91,39%.

**Tabel 3. 81 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,66	8,49	98%	8,77	96%



Capaian Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah berada di angka 96%. Angka ini didapat dari realisasi standar nasional yang berada di angka 8,77, apabila dibandingkan dengan realisasi Mahakam Ulu yang berada di angka 8,49 maka capaian kinerjanya sebesar 96%.



**Tabel 3. 82 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,66	8,49	98%		<ul style="list-style-type: none"> <li>- adanya faktor SDM yang berhenti sekolah setelah menempuh pendidikan sekolah dasar,</li> <li>- dinas pendidikan belum memberikan perhitungan secara mandiri dikarenakan tidak ada program yang khusus dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperlukan analisis mendalam mengenai penyebab banyaknya angka putus sekolah setelah sekolah dasar</li> <li>- Perlu menambah fasilitas sekolah menengah pertama untuk mengakomodir lulusan Sekolah Dasar</li> </ul>



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
							melakukan perhitungan rata-rata lama sekolah - Kurangnya infrastruktur sekolah dan tidak imbangnya perbandingan antara sekolah dasar dengan sekolah menengah atas dengan rincian sekolah dasar berjumlah 38 dengan 50 kampung sehingga beberapa	



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
							kampung belum terakomodasi dan untuk SMP 15 sehingga kurang memberikan akomodasi dan jumlah 9 SMA dengan sebaran di setiap kecamatan.	



**Tabel 3.83 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,66	8,49	98%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan angka rata-rata lama sekolah menunjang meningkatnya taraf pendidikan masyarakat. Adapun program yang menunjang angka rata-rata lama sekolah adalah Program Pengelolaan Pendidikan.

**Tabel 3. 84 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	1,36%	EFISIEN

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Angka rata-rata lama sekolah efisien dalam penggunaan sumber daya dengan angka 1,36%.

### Indikator 2: Harapan Lama Sekolah

**Tabel 3. 85 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12,85	12,65	98,44%	12,97	12,63	97%

**Harapan Lama Sekolah (HLS)** mengacu pada lamanya pendidikan formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Ini adalah indikator penting



untuk memahami tingkat pendidikan dan akses pendidikan di suatu negara.

Pada tahun 2023 capaian kinerja berada di angka 97%, capaian kinerja ini didapat dari target kinerja yang berada di angka 12,97 sedangkan realisasinya adalah 12,63. Angka Harapan Lama Sekolah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 Angka Harapan Lama Sekolah berada di capaian 98,44% dengan rincian realisasi kinerja di angka 12,65 dengan target kinerja 12,85.

**Tabel 3. 86 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12,97	12,63	97%	13,34	94,68%

Capaian Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD adalah 94,68% dengan rincian target akhir RPJMD adalah 13,34 sedangkan realisasi pada tahun 2023 adalah 12,63.

**Tabel 3. 87 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12,97	12,63	97%	13,15	96%

Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah sebesar 96%. Angka ini didapat dari realisasi kinerja Kabupaten pada tahun 2023 yang berada di angka



12,63 sedangkan realisasi nasional berada di angka 13,15 sehingga capaian kinerja berada di angka 96%.

**Tabel 3. 88 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12,97	12,63	97%		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor ekonomi masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan sehingga anak usia sekolah harus ikut membantu orangtua bekerja setiap harinya di jam sekolah;</li> <li>- Kondisi geografis Mahakam ulu menjadi kendala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan akses dan mutu Pendidikan dengan Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dan memberikan bantuan biaya Pendidikan bagi</li> </ul>



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
							<p>masyarakat mengakses Pendidikan;</p> <p>- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan masih rendah;</p> <p>- Kompetensi dan kuantitas tenaga pendidik masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi;</p> <p>- Jangkauan wilayah penduduk dan lokasi sekolah yang berjauhan dan</p>	<p>masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi serta meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah dengan cara melakukan pembangunan</p> <p>- pembangunan serta rehab sekolah yang memang perlu untuk dibantu</p>



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
							<p>beberapa wilayah tidak terdapat transportasi darat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;</li> <li>- Tingginya biaya transportasi (akses dari rumah menuju sekolah);</li> <li>- Jangkauan sarana pendidikan yang masih terbatas; i. Ketersediaan akses masyarakat terhadap jenjang pendidikan tinggi, masih belum</li> </ul>	<p>untuk perbaikan dan penambahan Gedunggedung sekolah.</p>



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
							memadai; - Kemampuan penyediaan kualifikasi pendidikan terhadap kebutuhan keilmuan tertentu di daerah belum optimal.	



**Tabel 3.89 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12,97	12,63	97%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan Harapan Lama Sekolah menunjang sasaran meningkatnya taraf pendidikan masyarakat. Adapun program yang menunjang harapan lama sekolah adalah

1. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

**Tabel 3. 90 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya taraf pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	1,12%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Harapan Lama Sekolah efisien dalam penggunaan sumber daya, efisiensi penggunaan sumber daya berada di angka 1.12%.

### **Sasaran 13 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

**Tabel 3. 91 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,3	72,35	100,07%	72,40	73.44	102%



Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir mengacu pada rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Perpanjangan umur harapan hidup merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kualitas hidup suatu populasi. Semakin tinggi angka UHH, semakin baik kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2023, realisasi angka UHH meningkat sebanyak 0,89 dengan nilai 73.44. Sehingga, pada capaian pada tahun 2023 mencapai 102%.

**Tabel 3. 92 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,40	73.44	102%	72,80	100,88%

Umur Harapan Hidup pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD memiliki target sebesar 72,80 sedangkan realisasi pada tahun 2023 sebesar 73,44. Maka capaian dari target akhir RPJMD sebesar 100,88%.

**Tabel 3. 93 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,40	73.44	102%	73,93	99%

Umur Harapan Hidup pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional memiliki target sebesar 73,93 sedangkan



realisasinya pada tahun 2023 sebesar 73,44. Sehingga capaian Umur Harapan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu dibandingkan dengan Standar Nasional capaian kinerja adalah sebesar 99%.

**Tabel 3. 94 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,40	73,44	102%	<p>- Tersedianya teknologi vaksin dan farmasi yang mampu memproduksi massal dan lebih murah vaksin dan obat-obatan. Dan produk itu terbukti efektif mencegah dan mengobati penyakit menular.</p> <p>- Tersedianya obat malaria yang mampu membersihkan parasite malaria di pembuluh darah</p>		



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
						<ul style="list-style-type: none"><li>- Intervensi kesehatan ibu dan anak, layanan kesehatan, dan pembangunan ekonomi:</li><li>- Perbaikan dalam layanan kesehatan ibu dan anak, meliputi persalinan yang aman, perbaikan nutrisi, imunisasi dan perbaikan sanitasi rumah dan kesehatan lingkungan.</li><li>- Program keluarga berencana juga berkontribusi menurunkan angka kematian ibu. Dan urunnya kematian</li></ul>		



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
						<p>meningkatkan “ledakan” jumlah penduduk.</p> <p>- Ketersediaan Tenaga Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mahakam Ulu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dipenuhi dengan Program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan RI dan pemerintah menambah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Seperti Rumah Sakit, keberadaan</p>		





No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
						<p>Puskesmas yang semakin banyak, dan dekat dengan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap kecamatan setidaknya punya satu puskesmas dan setiap kampung mempunyai satu Puskesmas Pembantu serta Tenaga Kesehatan semakin bertambah.</li><li>- Tersedianya akses transportasi, informasi, Ekonomi, Dan Mobilitas Penduduk dengan Lingkungan yang tadinya rawan dengan nyamuk malaria</li></ul>		



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
						<p>menjadi tergusur dan digantikan dengan pemukiman. Keterlambatan penanganan kasus darurat dapat diminimalkan dengan adanya tenaga kesehatan yang ditempatkan di desa-desa yang jauh dari puskesmas sekaligus dengan tersedianya angkutan darurat untuk menjangkau masyarakat.</p> <p>- Dukungan dari Lintas Program dan Lintas Sektor terkait dalam Program Kesehatan</p>		



**Tabel 3.95 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,40	73,44	102%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan. Dari data di atas menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup menunjang Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, adapun program yang menunjang Umur Harapan Hidup adalah:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

**Tabel 3. 96 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	1,36%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Indikator kinerja tersebut yaitu UHH dengan nilai efisiensi sebesar 1,36. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah efisien.



## Sasaran 14 Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

**Tabel 3. 97 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,51	80,01	113,47%	70,51	77,42	109%

**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah suatu metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. IKM memberikan gambaran tentang sejauh mana masyarakat puas dengan pelayanan yang mereka terima.

Pada dasarnya, IKM melibatkan survei yang mengumpulkan pendapat masyarakat tentang berbagai aspek pelayanan. Pada tahun 2022, target dari IKM sendiri yaitu 70,81 dan direalisasikan sebanyak 80,01. Di tahun 2023, dengan target yang sama, Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2023 adalah sebesar 77,42. Capaian Kinerja pada tahun 2023 adalah 109%.

**Tabel 3. 98 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,51	77,42	109%	75,7	102,27%

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 75,5.



Realisasi pada tahun 2023 sebesar 77,42. Sehingga capaian dari target akhir RPJMD sebesar 102,27%.

**Tabel 3. 99 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,51	77,42	109%	83,25	92%

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 memiliki realisasi kinerja 77,42 apabila disandingkan dengan Standar Nasional yang memiliki realisasi 83,25 menunjukkan bahwa capaian yang berhasil dicapai adalah 92%.

**Tabel 3. 100 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,51	77,42	109%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan fasilitasi dan asistensi penyusunan SKM masing - masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.</li> <li>- Melakukan evaluasi/reviu SKM Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten</li> </ul>		



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
						<p>Mahakam Ulu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan pelatihan secara internal untuk surveyor perangkat daerah tentang tata cara pengambilan data dari responden.</li><li>- Memotivasi surveyor untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dari responden yang tepat</li><li>- Bekerjasama dengan instansi terkait pelayanan publik untuk</li></ul>		



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
						berkolaborasi dengan bagian Organisasi dalam pengumpulan data. - Memberikan masukan dan saran kepada instansi terkait pelayanan public tentang hal-hal apa yang perlu dilakukan atau dilengkapi untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik terhadap masyarakat		





**Tabel 3.101 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian  
Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,51	77,42	109%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan. Dari data di atas, ditunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat menunjang Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas. Adapun program yang menunjang adalah

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (Semua Kecamatan)

**Tabel 3. 102 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	1,19%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Indikator Kinerja Sasaran yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,19%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat efisien dalam penggunaan sumber dayanya.



## Sasaran 15 Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah

**Tabel 3. 103 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	WTP	100%	WTP	Belum Keluar	N/A

**Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada empat kriteria:

- 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan:** Menilai apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2. Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures):** Memastikan bahwa semua informasi yang relevan telah diungkapkan dengan memadai dalam laporan keuangan.
- 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan:** Menilai apakah entitas yang diperiksa mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan.
- 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern:** Mengukur efektivitas sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan beberapa jenis opini:

- 1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP):** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP):** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.
- 3. Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa auditor tidak memberikan pendapat atas laporan karena lingkup audit tidak cukup untuk membuat suatu opini.



4. **Tidak Wajar (TW):** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pada tahun 2023, Opini BPK belum keluar realisasi kinerjanya. Realisasi kinerja akan dirilis oleh BPK pada bulan April tahun 2023. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022, Opini BPK meraih predikat WTP.

**Tabel 3. 104 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	Belum Keluar	N/A	WTP	Belum Keluar	N/A

Opini BPK (WTP) pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD belum bisa disandingkan karena realisasi kinerja pada tahun 2023 karena penilaian masih belum dirilis. Hasil Penilaian tahun 2023 akan dirilis pada bulan April tahun 2024.

**Tabel 3. 105 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	Belum Keluar	N/A	WTP	N/A

Opini BPK (WTP) pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional adalah belum bisa disandingkan karena realisasi kinerja pada tahun 2023 belum keluar.

**Tabel 3. 106 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	Belum Keluar	N/A			



Tabel di atas menampilkan hasil analisis mengenai analisis keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam memperbaiki kinerja. Analisis untuk Opini BPK tidak bisa dilakukan karena penilaian tahun 2023 belum dirilis.

**Tabel 3.107 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah	Opini BPK (WTP)	WTP	Belum Keluar	N/A	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan yang menyatakan bahwa sasaran meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan asset daerah menunjang kinerja tujuan. Opini BPK menunjang sasaran meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah. Adapun program yang menunjang adalah

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
6. Program Penyelenggaraan Pengawasan
7. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi



**Tabel 3. 108 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah	Opini BPK (WTP)	N/A	N/A

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Indikator Opini BPK belum bisa diketahui tingkat efisiensinya dikarenakan tidak bisa dilakukan karena penilaian tahun 2023 belum dirilis.

**Sasaran 16 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik**

**Tabel 3.109 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Maju	7	7	100%	8	17	212,50%

- Desa Mandiri:** Desa Mandiri, juga dikenal sebagai Desa Sembada, adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat sebesar-besarnya. Desa Mandiri memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan
- Desa Maju:** Desa Maju, atau Desa Pra Sembada, memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Desa ini mampu mengelola potensi tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, dan mengatasi kemiskinan
- Desa Berkembang:** Desa Berkembang, atau Desa Madya, adalah desa yang potensial menjadi desa maju. Meskipun memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi,



desa ini belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan.

4. **Desa Tertinggal:** Desa Tertinggal, atau Desa Pra-Madya, memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang mengelolanya dengan baik. Akibatnya, desa ini mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Semakin banyak desa yang masuk dalam kategori maju dan mandiri, semakin baik untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan. Pada tahun 2023, realisasi jumlah desa maju sebanyak 17 desa dengan capaian sebesar 212,50%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami kenaikan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2022 jumlah desa maju sebanyak 7.

**Tabel 3. 110 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Maju	8	17	212,50%	9	17	188,89%

Jumlah Desa Maju pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD termasuk ke dalam sasaran dari terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik dengan indikator kinerja sasaran jumlah desa maju dan jumlah desa tertinggal. Pada target akhir indikator jumlah desa maju memiliki target 9 dengan realisasi 17, maka capaiannya sebanyak 188,89%.



**Tabel 3. 111 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Maju	8	17	212,50%	23.030	17	0%

Jumlah Desa Maju pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional yang dimuat dalam sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik dengan indikator jumlah desa maju dan jumlah desa tertinggal. Dari indikator jumlah desa maju memiliki target dari standar nasional sebesar 23.030, pada realisasinya sebesar 17, maka capaiannya sebanyak 0%.



**Tabel 3. 112 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Maju	8	17	212,50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Sinergitas Program, kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk lokasi Target IDM baik Desa Maju maupun desa tertinggal.</li> <li>- Bersinergi Program kegiatan antara OPD terkait dalam upaya pencapaian target RPJMD melalui terwujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang</li> </ul>		



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
						Baik berdasarkan rekomendasi yang telah disusun sesuai score agar kebijakan yang ditetapkan tepat sasaran. - Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian IDM kepada Pendamping Desa		
		Jumlah desa tertinggal	12	8	130%			



**Tabel 3.113 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Maju	8	17	212,50%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan yang dimuat dalam sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik dengan indikator jumlah desa maju dan jumlah desa tertinggal. Kedua indikator menunjang pencapaian pernyataan kinerja tujuan karena capaiannya berada pada angka 212,50% untuk indikator jumlah desa maju, dan angka 130% untuk indikator jumlah desa tertinggal. Jumlah desa maju menunjang sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik, adapun program yang menunjang indikator jumlah desa maju adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa.

**Tabel 3. 114 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Maju	2,25%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Pada indikator kinerja sasaran jumlah desa maju, efisiensi penggunaan sumber daya mencapai 2,25% sehingga dapat dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya.



**Tabel 3. 115 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Tertinggal	7	7	100%	12	8	130%

- 1. Desa Mandiri:** Desa Mandiri, juga dikenal sebagai Desa Sembada, adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat sebesar-besarnya. Desa Mandiri memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.
- 2. Desa Maju:** Desa Maju, atau Desa Pra Sembada, memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Desa ini mampu mengelola potensi tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, dan mengatasi kemiskinan
- 3. Desa Berkembang:** Desa Berkembang, atau Desa Madya, adalah desa yang potensial menjadi desa maju. Meskipun memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, desa ini belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan.
- 4. Desa Tertinggal:** Desa Tertinggal, atau Desa Pra-Madya, memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang mengelolanya dengan baik. Akibatnya, desa ini mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Semakin sedikit desa yang masuk dalam kategori tertinggal, semakin baik untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan. Pada tahun 2023, realisasi jumlah desa tertinggal sebanyak 8 desa dengan capaian sebesar 130%



dengan realisasi kinerja ada 8 desa yang masuk dalam kategori tertinggal dari target 12 desa sehingga capaian kinerja sangat tinggi, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja adalah sebesar 100% sehingga capainnya meningkat.

**Tabel 3. 116 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Target Akhir RPJMD		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Tertinggal	12	8	130%	9	8	135,00%

Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan target akhir RPJMD termasuk ke dalam sasaran dari terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik dengan indikator kinerja sasaran jumlah desa maju dan jumlah desa tertinggal. Pada target akhir indikator jumlah desa tertinggal memiliki target 9 dengan realisasi 8, maka capaiannya sebanyak 135,00%. Penghitungan ini menggunakan analisis minimal, sehingga semakin sedikit realisasi kinerja dari target yang telah ditetapkan maka semakin baik capaian yang telah ditetapkan.



**Tabel 3. 117 Perbandingan Antara Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Standar Nasional		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Tertinggal	12	8	130%	4.982	8	0%

Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan Standar Nasional yang dimuat dalam sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik dengan indikator jumlah desa maju dan jumlah desa tertinggal. Dari indikator jumlah desa maju memiliki target dari standar nasional sebesar 4.982, pada realisasinya sebesar 8, maka capaiannya sebanyak 0%.

**Tabel 3. 118 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan serta Solusi yang Dilakukan Kedepan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Tertinggal	12	8	130%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Sinergitas Program, kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk lokasi Target IDM baik Desa Maju maupun desa tertinggal.</li> <li>- Bersinergi Program kegiatan antara OPD terkait dalam upaya pencapaian target RPJMD melalui terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang</li> </ul>		



No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Analisis		Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Keberhasilan	Kegagalan	
						Baik berdasarkan rekomendasi yang telah disusun sesuai score agar kebijakan yang ditetapkan tepat sasaran. - Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian IDM kepada Pendamping Desa		





**Tabel 3.119 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tujuan (Menunjang/Tidak Menunjang)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2023			Menunjang/Tidak
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah desa tertinggal	12	8	130%	Menunjang

Tabel di atas menunjukkan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tujuan yang dimuat dalam sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik dengan indikator jumlah desa maju dan jumlah desa tertinggal. Kedua indikator menunjang pencapaian pernyataan kinerja tujuan karena capaiannya berada di angka 130% untuk indikator jumlah desa tertinggal. Adapun program yang menunjang adalah

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program yang diampu oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, adapun kecamatan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu adalah Kecamatan Apari, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Pahangai.

**Tabel 3. 120 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Efisiensi)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Efisien/Tidak Efisien
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik	Jumlah Desa Tertinggal	1,37%	Efisien

Tabel di atas menunjukkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Pada indikator kinerja sasaran jumlah desa tertinggal, efisiensi penggunaan sumber daya dapat dikatakan efisien dalam



penggunaan sumber daya dengan angka efisiensi berada di angka 1,37%.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 (sub bab)

Sasaran RPJMD	Program	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Anggaran Tahun 2023	
				Target	Realisasi
Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jarn)	DPUPR	496.362.514.853	366.570.959.972
Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri aliran bersih		Persentase capaian akses air minum layak	DPUPR	14.671.501.380	13.262.071.252
Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik		Presentase KK yang dialiri Listrik	DPUPR	43141700963%	42099299124%
Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet		Cakupan layanan telekomunikasi	DPUPR	28.476.396.304	28.292.818.083



Sasaran RPJMD	Program	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Anggaran Tahun 2023	
				Target	Realisasi
Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni		Rasio rumah layak huni	DPUPR	-	-
Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara		Hasil pengukuran indeks kualitas air	Dinas Lingkungan Hidup	1.530.407.800	1.374.960.534
		Hasil pengukuran indeks kualitas udara		-	-
		Hasil pengukuran indeks kualitas lahan		4.111.073.300	3.664.062.000
Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) (%)	Dinas Ketahanan Pangan	26.681.096.740	18.792.362.883

Sasaran RPJMD	Program	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Anggaran Tahun 2023	
				Target	Realisasi
Meningkatnya peran sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam		Kontribusi Lapangan Usaha Pedagangan dan Jasa (dalam arti luas) (%)	BPS	12.134.009.384,00	5.451.267.914,00
Meningkatnya investasi daerah		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDNI/PMA) (dalam milyar)	DPMPSTP	2.515.416.500.000	2.270.624.365.000
Berkurangnya angka kemiskinan		Angka kemiskinan	BPS	6.111.584.000,00	3.281.660.864,00
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPI)		Tingkat pengangguran terbuka (%)	BPS	562.479.000	442.479.000
Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat		Angka rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan	115.420.918.470	82.607.164.064
		Harapan lama sekolah		922.528.600	790.157.736



Sasaran RPJMD	Program	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Anggaran Tahun 2023	
				Target	Realisasi
Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat		Umur harapan hidup (tahun)	Dinas Kesehatan	76.727.346.855	57.496.355.286
Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		Indeks kepuasan masyarakat	BKPSDM	163.864.000	149.154.000
Meningkatnya kinerja tata Kelola keuangan dan asset daerah		Opini BPK (WTP)	BPKAD		
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan kampung yang baik		Jumlah desa maju	DPMK	187.696.549.800	176.319.083.679
		Jumlah desa teringgal			

### 3. Prestasi Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 (sub bab)



1. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memperoleh Panji Keberhasilan Pembangunan, Trofi dan Piagam Penghargaan Terbaik I Kategori Bidang Pengembangan IPTEK dan Inovasi;



2. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menerima Trofi dan Piagam Penghargaan Terbaik III Bidang penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kabupaten dan Kota;





3. Bupati Mahakam Ulu menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A.,Ph.D di Jakarta Selata, 14 Maret 2023;



4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah meraih Juara 3 sebagai Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2022, 16 Maret 2023;





5. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menerima Piala dan Piagam Penghargaan BerAKHLAK sebagai Juara I dengan Indeks Implementasi Kolaboratif tertinggi di tingkat Pemkab Se-Indonesia. Dengan presentase 81,9% artinya nilai kolaboratifnya sehat berdasarkan Survei tahun 2022 yang merupakan kerjasama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dengan ACT Consulting Internasional.
6. Pemerintah Kampung Lutan mewakili Provinsi Kalimantan Timur meraih Juara Harapan pada Lomba Cepat Tepat Nusantara dalam rangka Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara yang ke XXIV Tahun 2023 di Bandar Lampung, 06-10 Juni 2023;



7. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu meraih Piagam dan Penghargaan terbaik 1 dalam Implementasi Layanan Penetapan NIP/NIPPPK di wilayah kerja kantor regional VIII Badan Kepegawaian Negara dalam “Transformasi Layanan Kepegawaian ASN yang Smart, Agile dan Emphaty”, 14 Juni 2023;
8. Penghargaan kepada BUMK “Maju Bersama Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai yang telah meraih Piagam Penghargaan Stand Terbaik III dalam rangka Expo BUMDes tingkat Provinsi kaltim, 16-18 Juni 2023;



9. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menerima Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) atas pencatatan ciptaan Seni Motif dengan judul ciptaan Buaq Laraan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) dari Kementerian Hukum dan HAM RI, 20 Juli 2023;
10. Penghargaan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu atas Komitmen Kemitraan Tebraik tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur, pada Rapat Koordinasi Teknis “Kayuh Bebaya Tuntaskan Aksi Nyata” (Kabaya Sinta) yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Kaltim, 26-28 September 2023;
11. Piagam Penghargaan kepada BPBD Kabupaten Mahakam Ulu sebagai BPBD yang mengalokasikan Anggaran sebagai Hibah Bantuan Logistik dan Peralatan BNPB secara mandiri tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Barat, pada peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana Tahun 2023 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, 10-15 Oktober 2023;



12. Trofi dan Piagam Penghargaan sebagai pemenang Very Good Region in a Leading Profile Public Participation, Nominator Very Good Region in a Featured on Local Economics Empowerment, Nominator Very Good Region in A Featured Program on Economics Equality dan Pemenang kategori Excelent Region in a Leading Political pada Multy Award Mulawarman University Award I dalam rangka Dies natalis 61 Mulawarman, 28 Oktober 2023;
13. Piagam Penghargaan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu atas partisipasi aktif dalam kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh kantor Bahasa Prvinsi Kalimantan Timur pada Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi Kalimantan Timur; 14-17 November 2023;
14. Trofi dan Piagam Penghargaan diberikan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bengen Tawai Kabupaten Mahakam Ulu sebagai juara Harapan I, pada Jambore Pokdarwis Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur di Pulau Maratua Kabupaten Berau, pada 22-26 November 2023;

## **BAB III**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Mahakam Ulu**

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Penyelenggaraan tugas pembantuan bertujuan untuk pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, diperlukan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dengan APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang dibiayai dari APBD. Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya Sebagian anggaran Kementerian/ Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja-KL) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Selain itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan, memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasi dan diotonomikan, sekalipun kepada daerah.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan



pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah meliputi sebagian di antara tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

Pengaturan pendanaan kewenangan pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang – Undang tersebut dinyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, yang sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggung jawaban.

Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.





Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai oleh APBD. Kabupaten Mahakam Ulu pada Tahun 2023 tidak ada menerima dana tugas Pembantuan dari Kementrian. Sehingga tidak bisa dilaporkan terkait Target Kinerja dan Capaiannya pada Tahun 2023

### **3.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

- a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- g. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- j. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2014;



- k. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014;
- l. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
- n. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
- o. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.

### **3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

3.3.1 Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

#### 3.3.2 Target Kinerja

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tidak mendapatkan Tugas Pembantuan Pada Tahun 2023

#### 3.3.3 Realisasi

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tidak mendapatkan Tugas Pembantuan Pada Tahun 2023

#### 3.4 Permasalahan dan Kendala

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tidak mendapatkan Tugas Pembantuan Pada Tahun 2023





## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1 Urusan Pendidikan

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Sedangkan penerima Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 adalah:

- a. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.



- c. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun

Cakupan mutu pelayanan dasar SPM bidang Pendidikan merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Mutu pelayanan dasar yang dimaksud mencakup:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa
- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Tata cara pemenuhan standar

#### 4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Penyelenggaran pelayanan bidang Pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan kesetaraan, penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, mengingat ketersediaan tenaga serta sarana Pendidikan masih cenderung terbatas begitu pula akses ke tempat pelayanan Pendidikan juga masih sangat terbatas. Namun ditengah keterbatasan tersebut Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tetap menaruh harapan dan optimisme agar capaian dan kualitas layanan urusan Pendidikan bisa diberikan secara optimal kepada Masyarakat banyak. Sebagaimana tertera pada tabel Target dan pencapaian SPM bidang Pendidikan berikut:

Tabel 4.1

Target pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	Pendidikan Dasar Usia Dini						



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM 2023				Anggaran
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	
	Jumlah yang harus dilayani	Peserta Didik	1500	1500	100%	100%	Rp27.938.868.175
1	Angka partisipasi sekolah	%			90%	90%	
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%			30%	30%	
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%			50%	50%	
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%			10%	10%	
5	Kecukupan formasi guru ASN	%			-%	-%	
6	Indeks distribusi guru	%			-%	-%	
7	Proporsi PTK bersertifikat	%			10%	10%	
8	Proporsi PTK penggerak	%			10%	10%	
9	Pengalaman pelatihan guru	%			10%	10%	
2	<b>Pendidikan Dasar</b>						
	<b>SD</b>						



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM 2023				Anggaran
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	
	Jumlah yang harus dilayani	Peserta Didik	4000	4000			Rp48.353.990.220
1	Angka partisipasi kasar	%			100%	100%	
2	Angka partisipasi sekolah	%			100%	100%	
3	Angka partisipasi murni	%			100%	100%	
4	Kemampuan literasi	Nilai			100%	100%	
5	Kemampuan numerasi	Nilai			100%	100%	
6	Perbedaan Skor Literasi	Nilai			100%	100%	
7	Perbedaan Skor numerasi	Nilai			100%	100%	
8	Indeks iklim keamanan	Nilai			100%	100%	
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			100%	100%	
10	Kecukupan formasi guru ASN	%			100%	100%	
11	Indeks distribusi guru	%			100%	100%	
12	Proporsi PTK bersertifikat	%			100%	100%	
13	Proporsi PTK penggerak	%			100%	100%	



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM 2023				Anggaran
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	
14	Pengalaman pelatihan guru	%			100%	100%	
<b>SMP</b>							
	Jumlah yang harus dilayani	Peserta Didik	1800	1800			<b>Rp29.609.067.849</b>
1	Angka partisipasi kasar	%			100%	100%	
2	Angka partisipasi sekolah	%			100%	100%	
3	Angka partisipasi murni	%			100%	100%	
4	Kemampuan literasi	Nilai			100%	100%	
5	Kemampuan numerasi	Nilai			100%	100%	
6	Perbedaan skor literasi	Nilai			100%	100%	
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai			100%	100%	
8	Indeks iklim keamanan	Nilai			100%	100%	
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			100%	100%	
10	Kecukupan formasi guru ASN	%			100%	100%	
11	Indeks distribusi guru	%			100%	100%	



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM 2023				Anggaran
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	
12	Proporsi PTK bersertifikat	%			100%	100%	
13	Proporsi PTK penggerak	%			100%	100%	
14	Pengalaman pelatihan guru	%			100%	100%	
	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>						
1	Jumlah yang harus dilayani	Peserta Didik	250	250			<b>Rp3.922.447.275</b>
2	Angka partisipasi kasar	%			100%	100%	
3	Angka partisipasi sekolah	%			100%	100%	
4	Angka partisipasi murni	%			100%	100%	
5	Kemampuan literasi	Nilai			100%	100%	
6	Kemampuan numerasi	Nilai			100%	100%	
7	Perbedaan skor literasi	Nilai			100%	100%	
8	Perbedaan skor numerasi	Nilai			100%	100%	



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM 2023				Anggaran
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	
9	Indeks iklim keamanan	Nilai			100%	100%	
10	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			100%	100%	
11	Kecukupan formasi guru ASN	%			100%	100%	
12	Indeks distribusi guru	%			100%	100%	
13	Proporsi PTK bersertifikat	%			100%	100%	
14	Proporsi PTK penggerak	%			100%	100%	
15	Pengalaman pelatihan guru	%			100%	100%	

#### 4.1.3 Realisasi

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut ;

Tabel 4.2  
Indikator dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada  
Urusan Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATU AN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATU AN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					71.97 %
<b>1 .</b>	<b>Pendidikan Dasar Usia Dini</b>					95.45 %
			<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>					<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		1342	1371	-29	<b>100.00 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>15.45 %</b>
			<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>					<b>77.27 %</b>
	<b>1 . Angka partisipasi sekolah</b>	%	80.35	80.35	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B</b>	%	2	1	<b>1</b>	<b>50.00 %</b>
	<b>3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV</b>	%	30	27.27	<b>2.73</b>	<b>90.90 %</b>
	<b>4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD</b>	%	1	1	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>5 . Kecukupan formasi guru ASN</b>	%	2	2	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>6 . Indeks distribusi guru</b>	%	1	1	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>7 . Proporsi PTK bersertifikat</b>	%	1	0	<b>1</b>	<b>0.00 %</b>
	<b>8 . Proporsi PTK penggerak</b>	%	1	0	<b>1</b>	<b>0.00 %</b>
	<b>9 . Pengalaman pelatihan guru</b>	%	1	0	<b>1</b>	<b>0.00 %</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>119</b>	<b>113</b>	<b>7</b>	<b>540.90 %</b>	
<b>2 .</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>					93.22 %
			<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>					<b>76.86 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		5930	5697	<b>233</b>	<b>96.07 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>16.36 %</b>
			<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>					<b>81.81 %</b>
	<b>SD</b>					
	<b>1 . Angka partisipasi kasar</b>	%	100.60	100.60	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>2 . Angka partisipasi sekolah</b>	%	100	99.69	<b>0.31</b>	<b>99.69 %</b>
	<b>3 . Angka partisipasi murni</b>	%	80.73	80.73	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>4 . Kemampuan literasi</b>	Nilai	45.99	39.85	<b>6.14</b>	<b>86.65 %</b>
	<b>5 . Kemampuan numerasi</b>	Nilai	32.92	31.65	<b>1.27</b>	<b>96.14 %</b>
	<b>6 . Perbedaan Skor Literasi</b>	Nilai	2	2	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>7 . Perbedaan Skor numerasi</b>	Nilai	1	1	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	68.31	64.77	3.54	94.82 %
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	62.63	59.83	2.8	95.53 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	60	50	10	83.33 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	1	0.70	0.3	70.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	80	72.20	7.8	90.25 %
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	1	0.02	0.98	2.00 %
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	25	20.30	4.7	81.20 %
	<b>SMP</b>					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	90	84.32	5.68	93.69 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	98.82	1.18	98.82 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	71.30	64.57	6.73	90.56 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	61.53	53.76	7.77	87.37 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	60.94	29.57	31.37	48.52 %
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4	4	0	100.00 %
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	2	2	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	65.13	61.79	3.34	94.87 %
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	61.84	32.97	28.87	53.32 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	60	50	10	83.33 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	1	0.33	0.67	33.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	80	78.50	1.5	98.13 %
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	1	0.12	0.88	12.00 %
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	20	19.50	0.5	97.50 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,34</b>	<b>1,204</b>	<b>136</b>	<b>2,290.72 %</b>	
<b>3 .</b>	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>					27.22 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>12.52 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		262	41	221	15.65 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>14.70 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>73.52 %</b>
	1 . Angka partisipasi kasar	%	10	10	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	2.53	0.52	2.01	20.55 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	10	10	0	100.00 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	1	0	1	0.00 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	1	0	1	0.00 %
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	1	0	1	0.00 %
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1	0	1	0.00 %
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	1	0	1	0.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	1	0	1	0.00 %
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	1	0	1	0.00 %
11	Indeks distribusi guru	%	1	0	1	0.00 %
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	1	0	1	0.00 %
13	Proporsi PTK penggerak	%	1	0	1	0.00 %
14	Pengalaman pelatihan guru	%	1	0	1	0.00 %
<b>JUMLAH</b>		<b>34</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>220.55</b>	

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan selama tahun 2023 telah dialokasikan dana Belanja Operasi sebesar Rp.173.167.015.370 dengan realisasi sebesar Rp.129.812.960.872 dan Belanja Modal sebesar Rp.29.274.983.270 dengan realisasi sebesar Rp.27.980.569.392.

#### 4.1.5 Dukungan Personil

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 3	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	2
Eselon 4	9	-	-	-	1	-	-	-	8	2	-	-	-	10	1
Staf PNS	10	-	-	-	4	-	-	2	5	-	-	-	5	4	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2</b>			<b>5</b>	<b>15</b>	<b>4</b>

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

##### a) Permasalahan:

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama



Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Permasalahan Urusan Pendidikan

No	Uraian	Permasalahan
1	Kebijakan:	1. Terjadinya perubahan Indikator SPM Pendidikan pada TW 2 Tahun 2023. Sehingga rencana dan penganggaran yang telah disusun pada tahun sebelumnya, tidak dapat di realisasikan dan membutuhkan perencanaan ulang dalam rangka meningkat Nilai SPM pada Bidang Pendidikan berdasarkan Indikator yang terbaru.
		2. Perubahan Nomenklatur untuk kegiatan penunjang kegiatan SPM baru terdapat pada Anggaran Perubahan yaitu pada masa periode akhir tahun 2023. Sehingga penganggaran yang signifikan untuk meningkatkan Nilai SPM pendidikan baru dapat dilakukan pada periode anggaran pergeseran TA.2024
2	Sumber daya:	1. Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan SPM harusnya pada bidang-bidang yang menangani, yaitu pada Bidang Dikdasmen. Dimana para pemangku Jabatan pada sub bidang tersebut belum sepenuhnya memahami cara dan metode untuk meningkatkan angka/nilai SPM Pendidikan. Bahkan Urgensi Penerapan dan Peningkatan SPM itu sendiri.
3	Koordinasi:	1. Minimnya koordinasi. Bahkan kurang tanggapnya para pelaksana penerapan SPM dalam merespon agenda/maupun pelaporan SPM.
4	Manajemen Kerja:	1. Tidak adanya TIM peningkatan kerja SPM
5	Pendanaan:	1. Minimnya pemahaman para pemangku Jabatan pada sub bidang Dikdasmen, pada Kegiatan dan Sub Kegiatan apa saja yang dapat menunjang Peningkatan SPM

#### b) Solusi

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan seperti pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru,



- pembangunan Sekolah satu atap atau Sekolah terpadu untuk mengatasi kendala geografis yang menghambat masyarakat terhadap pendidikan;
2. Perluasan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi melalui pemberian beasiswa pendidikan, pendidikan di luar domisili, pendidikan jarak jauh (PJJ), dsb;
  3. Melaksanakan sosialisasi dan kerjasama kepada pihak Diskominfo, sehingga sarana Pendidikan semakin lebih baik pada sekolah.
  4. Melakukan pembinaan dan mensinkronisasi data agar lebih baik kedepannya melalui Dapodik.
  5. Pengiriman Naskah Soal Melalui Aplikasi Whatsapp atau email
  6. Pembuatan Naskah soal harus melalui MGMP, sehingga lebih efektif dan efisien.
  7. Dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada dan berkomunikasi via telepon dan whatsapp.
  8. Pembuatan Agenda Program Kerja Sekolah melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.
  9. Pengusulan dana transportasi dan akomodasi untuk kegiatan seleksi tingkat kabupaten
  10. Memberikan bimbingan dan pengarahan melalui telepon dan Whatsapp sehingga persiapan pelaksanaan UN/US terlaksana dengan baik.
  11. Dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan duduk bersama dengan OPD yang terkait untuk membahas dana desa, apakah bisa digunakan untuk operasional dan lainnya, karena PAUD itu juga sebagai tanggung jawab petinggi dikampung.
  12. Yayasan yang mendirikan PAUD di desa banyak kerjasama dengan petinggi kampung agar tidak ada salah paham.
  13. Sebaiknya Yayasan itu mendirikan gedung sekolah atau kampung yang mendirikan sekolah PAUD yang ada di kampungnya.



14. Guru yang sudah PTT pada PG dan TK diharapkan untuk kuliah mengambil S1 PAUD pada Universitas Terbuka (UT) dan diberikan beasiswa.
15. Supaya bisa dianggarkan dana untuk mendatangkan guru dan kepala sekolah agar bisa disosialisasikan di Kabupaten atau lembaganya masing-masing.
16. Memberikan Pelatihan bagi Kepala Sekolah dalam penyusunan SKP Guru- guru.
17. Menggunakan jaringan Data Seluler Pribadi.
18. Mengintensifkan komunikasi operator sekolah dan operator dinas Pendidikan.
19. Alokasi Anggaran Program Kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, indikator dan hasil yang jelas.

## **4.2 Bidang Urusan Kesehatan**

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

### **4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (kelas 1 dan 7)
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (usia 15 - 59 Tahun)
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 tahun Ke Atas)
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meletus (DM)
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
- k. Pelayanan Kesehatan TB



1. Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.4  
Target Pencapaian Indikator SPM  
Urusan Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
<b>1</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>						
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	578	414			<b>443.981.500</b>
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			578	414	
2	Tablet tambah darah	Tablet			52020	52020	
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket			578	414	
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket			578	414	
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket			578	414	
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket			578	414	
7	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket			578	414	
8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			578	414	
9	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang			6	6	
10	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			6	6	
11	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			6	6	
12	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua,	Orang			578	414	



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Dua kali pada trimester ketiga)						
<b>2</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>						
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	551	430			<b>91.840.000</b>
1	Formulir Partograf	Formulir			551	430	
2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket			551	430	
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			551	430	
4	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang			6	6	
5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			6	6	
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			6	6	
<b>3</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>						
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	525	332			<b>109.435.500</b>
1	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin			525	332	
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul			525	332	
3	Salep/tetes mata antibiotik	Orang			525	332	
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir			525	332	
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang			525	332	
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			525	332	
7	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang			6	6	
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			6	6	
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			6	6	



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
4	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>						
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	3463	1723			<b>220.354.000</b>
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen			3463	1723	
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir			3463	1723	
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku			3463	1723	
4	Vitamin A Biru	Kapsul			6926	3446	
5	Vitamin A Merah	Kapsul			6926	3446	
6	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin			3463	1723	
7	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin			3463	1723	
8	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Vaksin			3463	1723	
9	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin			3463	1723	
10	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin			3463	1723	
11	Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin			3463	1723	
12	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin			3463	1723	
13	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin			3463	1723	
14	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin			3463	1723	
15	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin			3463	1723	
16	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			3463	1723	
17	Peralatan Anafilaktik	Paket			3463	1723	
18	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			6	6	





No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
19	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			6	6	
20	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			6	6	
21	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			6	6	
22	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			250	250	
23	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang			20	20	
<b>5</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>						
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2550	1753			<b>170.580.000</b>
1	Buku raport kehatanku	Buku			2550	1753	
2	Buku pemantauan kehatan	Buku			2550	1753	
3	Kuesioner skrining kehatan	Dokumen			2550	1753	
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen			2550	1753	
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir			2550	1753	
6	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang			6	6	
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			6	6	
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			6	6	
9	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			6	6	
10	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang			6	6	
11	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			50	50	
12	Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang			20	20	



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
<b>6</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>						
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	11030	9714			<b>82.560.000</b>
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			11030	9714	
2	Alat ukur berat badan	Unit			36	36	
3	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit			36	36	
4	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit			36	36	
5	Alat : Tensimeter	Unit			36	36	
6	Alat : Glukometer	Unit			36	36	
7	Alat : Tes strip gula darah	Unit			11030	9714	
8	Alat : Lancet	Unit			11030	9714	
9	Alat : Kapas alkohol	Unit			11030	9714	
10	Alat : KIT IVA Tes	Unit			11030	9714	
11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			36	36	
12	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			6	6	
13	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			6	6	
14	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			6	6	
15	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			6	6	
16	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			6	6	
17	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang			50	50	
<b>7</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>						



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2429	1481			<b>156.931.000</b>
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket			2429	1481	
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket			2429	1481	
3	Buku kesehatan lansia	Buku			2429	1481	
4	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			6	6	
5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			6	6	
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			6	6	
7	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			6	6	
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			6	6	
9	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang			50	50	
<b>8</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>						
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	3384	3085			
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			360	360	
2	Tensimeter	Unit			36	36	
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			3384	3085	



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
4	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			6	6	
5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			6	6	
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			6	6	
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			6	6	
8	Obat Hipertensi	Paket			3384	3085	
<b>9</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>						
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	1058	1058			<b>17.388.000</b>
1	Alat : Glukometer	Unit			36	36	
2	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit			1058	1058	
3	Alat : Kapas Alkohol	Unit			1058	1058	
4	Alat : Lancet	Unit			1058	1058	
5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang			1058	1058	
6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			360	360	
7	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			6	6	
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			6	6	
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			6	6	
10	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			6	6	
11	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			6	6	
12	Obat Diabetes Melitus	Paket			1058	1058	
<b>10</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan</b>						



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	<b>Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>						
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	146	98			<b>167.696.000</b>
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku			146	98	
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket			146	98	
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang			146	98	
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media			360	360	
5	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			6	6	
6	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang			6	6	
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang			6	6	
<b>11</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>						
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	513	325			<b>96.822.400</b>
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media			513	325	
2	Reagen Zn TB	Paket			513	325	
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket			513	325	
4	Pot dahak	Paket			513	325	
	Kaca Slide	Paket			513	325	



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Bahan Habis Pakai Oil Emersi	Paket			513	325	
	Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen	Paket			6	6	
	Ose/Lidi	Paket			513	325	
	Rak pengering	Paket			513	325	
5	Catridge tes cepat molekuler	Paket			513	325	
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen			513	325	
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen			72	72	
8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang			6	6	
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			6	6	
10	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			6	6	
11	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang			6	6	
12	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang			6	6	
13	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang			6	6	
12	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>						
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	1695	851			<b>67.458.200</b>
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media			360	360	



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket			1695	851	
3	Handschoen	Paket			1695	851	
	Alkohol Swab	Paket			1695	851	
	Plester	Paket			1695	851	
	Lancet/Jarum Steril	Paket			1695	851	
	Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket			1695	851	
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket			1695	851	
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang			6	6	
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			6	6	
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			6	6	
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Labororium Medis (ATLM)	Orang			6	6	
9	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang			6	6	
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			50	50	

#### 4.2.3 Realisasi

Realisasi kegiatan Penyelenggara Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:



Tabel. 4.5  
Realisasi Capaian Target Standar Pelayanan Minimal  
Urusan Kesehatan Kab. Mahakam Ulu Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>		TUNTAS MADYA			80.53 %
<b>1 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>					82.25 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>65.05 %</b>
	<b>• Jumlah yang Harus Dilayani :</b>	Orang	578	470	108	<b>81%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>17.20 %</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
			<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	85.99 %
	<b>1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)</b>	Ampul	578	470	<b>108</b>	<b>81.31 %</b>
	<b>2 . Tablet tambah darah</b>	Tablet	52,02	42,3	<b>9,72</b>	<b>81.31 %</b>
	<b>3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan</b>	Paket	578	470	<b>108</b>	<b>81.31 %</b>
	<b>4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB</b>	Paket	578	470	<b>108</b>	<b>81.31 %</b>
	<b>5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah</b>	Paket	578	470	<b>108</b>	<b>81.31 %</b>
	<b>6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin</b>	Paket	578	470	<b>108</b>	<b>81.31 %</b>
	<b>7 . Kartu ibu/rekam medis ibu</b>	Paket	578	470	<b>108</b>	<b>81.31 %</b>
	<b>8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)</b>	Buku	578	470	<b>108</b>	<b>81.31 %</b>
	<b>9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan</b>	Orang	6	6	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>10 . Tenaga kesehatan : Bidan</b>	Orang	6	6	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>11 . Tenaga kesehatan : Perawat</b>	Orang	6	6	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)</b>	Orang	578	470	<b>108</b>	<b>81.31 %</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>56,662</b>	<b>46,078</b>	<b>10,584</b>	<b>1,031.79 %</b>	
<b>2 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>					89.06 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>70.27 %</b>





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	551	484	67	88%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>18.78 %</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
			<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	93.92 %
	1 . Formulir Partograf	Formulir	551	484	67	87.84 %
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	551	484	67	87.84 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	551	484	67	87.84 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	6	6	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	6	6	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	6	6	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,671</b>	<b>1,47</b>	<b>201</b>	<b>563.52 %</b>	
3 .	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>					91.47 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>72.69 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	525	477	48	91%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>18.78 %</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
			<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	93.90 %
	1 . Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	525	477	48	90.86 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	525	477	48	90.86 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	525	477	48	90.86 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	525	477	48	90.86 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	525	477	48	90.86 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	525	477	48	90.86 %
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	6	6	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	6	6	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	6	6	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,168</b>	<b>2,88</b>	<b>288</b>	<b>845.16 %</b>	
4 .	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>					76.24 %
			<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	<b>59.95 %</b>



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>					
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3,463	2,595	868	75%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>16.29 %</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b> -1	<b>Jumlah yang terlayani</b> -2	<b>Jumlah yang belum terlayani</b> -3	81.47 %
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	3,463	2,595	868	74.94 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	3,463	2,595	868	74.94 %
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3,463	2,595	868	74.94 %
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	3,463	2,595	868	74.94 %
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	6,926	5,19	1,736	74.94 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	3,463	2,595	868	74.94 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	3,463	2,595	868	74.94 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	3,463	2,595	868	74.94 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	3,463	2,595	868	74.94 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	10,389	7,785	2,604	74.94 %
	11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	10,389	7,785	2,604	74.94 %
	12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	10,389	7,785	2,604	74.94 %
	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib	Vaksin	10,389	7,785	2,604	74.94 %
	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	10,389	7,785	2,604	74.94 %
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	10,389	7,785	2,604	74.94 %
	16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	3,463	2,595	868	74.94 %
	17 . Peralatan Anafilaktik	Paket	3,463	2,595	868	74.94 %
	18 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	6	6	0	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	6	6	0	100.00 %
	20 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	6	6	0	100.00 %
	21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	2	2	0	100.00 %
	22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	30	30	0	100.00 %
	23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	10	10	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>103,95</b>	<b>77,91</b>	<b>26,04</b>	<b>1,873.98 %</b>	
5 .	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>					72.39 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>					<b>55.00 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	2,55	1,753	797	<b>69%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>17.40 %</b>
			Jumlah yang harus dilayani <b>-1</b>	Jumlah yang terlayani <b>-2</b>	Jumlah yang belum terlayani <b>-3</b>	86.98 %
	1 . Buku raport kesehatanku	Buku	2,55	1,753	797	<b>68.75 %</b>
	2 . Buku pemantauan kesehatan	Buku	2,55	1,753	797	<b>68.75 %</b>
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	2,55	1,753	797	<b>68.75 %</b>
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	2,55	1,753	797	<b>68.75 %</b>
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	2,55	1,753	797	<b>68.75 %</b>
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	6	6	0	<b>100.00 %</b>
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	6	6	0	<b>100.00 %</b>
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	6	6	0	<b>100.00 %</b>
	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	2	2	0	<b>100.00 %</b>
	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	6	6	0	<b>100.00 %</b>
	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	30	30	0	<b>100.00 %</b>
	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	6	6	0	<b>100.00 %</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>12,812</b>	<b>8,827</b>	<b>3,985</b>	<b>1,043.75 %</b>	
<b>6 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>					<b>98.35 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>					<b>78.58 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	11,03	10,834	196	<b>98%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>19.77 %</b>
			Jumlah yang harus dilayani <b>-1</b>	Jumlah yang terlayani <b>-2</b>	Jumlah yang belum terlayani <b>-3</b>	98.85 %
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	11,03	10,834	196	<b>98.22 %</b>
	2 . Alat ukur berat badan	Unit	11,03	10,834	196	<b>98.22 %</b>



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	11,03	10,834	196	98.22 %
	4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	11,03	10,834	196	98.22 %
	5 . Alat : Tensimeter	Unit	11,03	10,834	196	98.22 %
	6 . Alat : Glukometer	Unit	11,03	10,834	196	98.22 %
	7 . Alat : Tes strip gula darah	Unit	11,03	10,834	196	98.22 %
	8 . Alat : Lancet	Unit	11,03	10,834	196	98.22 %
	9 . Alat : Kapas alkohol	Unit	11,03	10,834	196	98.22 %
	10 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	11,03	10,834	196	98.22 %
	11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	11,03	10,834	196	98.22 %
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	6	6	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	6	6	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	6	6	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	2	2	0	100.00 %
	16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	6	6	0	100.00 %
	17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	30	30	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>121,386</b>	<b>119,23</b>	<b>2,156</b>	<b>1,680.42 %</b>	
7 .	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>					79.38 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>60.96 %</b>
	<b>• Jumlah yang Harus Dilayani :</b>	Orang	2,429	1,851	578	76%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					18.41 %
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	92.07 %
			<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	2,429	1,851	578	76.20 %
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	2,429	1,851	578	76.20 %
	3 . Buku kesehatan lansia	Buku	2,429	1,851	578	76.20 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	6	6	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	6	6	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	6	6	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	2	2	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	6	6	0	100.00 %
	9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	30	30	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>7,343</b>	<b>5,609</b>	<b>1,734</b>	<b>828.60 %</b>	
<b>8 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>					18.78 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>0.00 %</b>
	<b>• Jumlah yang Harus Dilayani :</b>	Orang	3,384	0	3,384	<b>0%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>18.78 %</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
			<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	93.91 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	3,384	2,972	412	87.83 %
	2 . Tensimeter	Unit	3,384	2,972	412	87.83 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	3,384	2,972	412	87.83 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	6	6	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	6	6	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	6	6	0	100.00 %
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	6	6	0	100.00 %
	8 . Obat Hipertensi	Paket	3,384	2,972	412	87.83 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>13,56</b>	<b>11,912</b>	<b>1,648</b>	<b>751.32 %</b>	
<b>9 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>					100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>• Jumlah yang Harus Dilayani :</b>	Orang	1,058	1,058	0	<b>100%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00 %</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	
			<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	100.00 %
	1 . Alat : Glukometer	Unit	1,058	1,058	0	100.00 %
	2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	1,058	1,058	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3 . Alat : Kapas Alkohol	Unit	1,058	1,058	0	100.00 %
	4 . Alat : Lancet	Unit	1,058	1,058	0	100.00 %
	5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1,058	1,058	0	100.00 %
	6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	1,058	1,058	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	6	6	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	6	6	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	6	6	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	6	6	0	100.00 %
	11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	6	6	0	100.00 %
	12 . Obat Diabetes Melitus	Paket	1,058	1,058	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>7,436</b>	<b>7,436</b>	<b>0</b>	<b>1,200.00 %</b>	
10 .	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>					100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	146	146	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00 %</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	100.00 %
			<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	146	146	0	100.00 %
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	146	146	0	100.00 %
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	146	146	0	100.00 %
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	146	146	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	6	6	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	6	6	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	6	6	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>700.00 %</b>	
11 .	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>					92.57 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>					<b>73.45 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	513	471	42	<b>92%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>19.12 %</b>
			Jumlah yang harus dilayani <b>-1</b>	Jumlah yang terlayani <b>-2</b>	Jumlah yang belum terlayani <b>-3</b>	95.59 %
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	513	471	42	<b>91.81 %</b>
	2 . Reagen Zn TB	Paket	513	471	42	<b>91.81 %</b>
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	513	471	42	<b>91.81 %</b>
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	513	471	42	<b>91.81 %</b>
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	513	471	42	<b>91.81 %</b>
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	513	471	42	<b>91.81 %</b>
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	513	471	42	<b>91.81 %</b>
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	6	6	0	<b>100.00 %</b>
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	6	6	0	<b>100.00 %</b>
	10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	6	6	0	<b>100.00 %</b>
	11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	6	6	0	<b>100.00 %</b>
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	6	6	0	<b>100.00 %</b>
	13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	18	18	0	<b>100.00 %</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,639</b>	<b>3,345</b>	<b>294</b>	<b>1,242.67 %</b>	
12 .	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>					65.84 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>					<b>48.94 %</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1,695	1,037	658	<b>61%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>16.89 %</b>



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	
						84.47 %
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	1,695	1,037	658	61.18 %
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	1,695	1,037	658	61.18 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	1,695	1,037	658	61.18 %
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	1,695	1,037	658	61.18 %
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	5	5	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	6	6	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	6	6	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	6	6	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	6	6	0	100.00 %
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	6	6	0	100.00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>6,815</b>	<b>4,183</b>	<b>2,632</b>	<b>844.72</b>	

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Urusan Kesehatan selama tahun 2022 telah dialokasikan dana Belanja Operasi sebesar Rp.130.476.939.076 dengan realisasi sebesar Rp. 112.248.387.697 dan dana Belanja Modal sebesar Rp.25.942.216.052 dengan realisasi sebesar Rp.20.470.328.947

#### 4.2.4 Dukungan Personil

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN / PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV





Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 3	4	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4
Eselon 4	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-
Staf PNS	12	-	-	-	2	-	-	8	2	-	-	-	4	7	1
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>24</b>	-	-	-	<b>3</b>	-	-	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	-	-	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>6</b>

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

##### a) Permasalahan:

Tabel 4.6

##### Permasalahan Urusan Kesehatan

No	Uraian	Permasalahan
1	Kebijakan:	1. Masalah pelaksanaan kebijakan yang belum optimal, 2. Adanya pergantian Pejabat, perpindahan posisi Pejabat Struktural di Lingkungan OPD Dinkes.
2	Sumber daya:	1. Penanggung jawab(PJ) SPM di PKM Sering Berganti, 2. Penanggung jawab(PJ) SPM di PKM memiliki Tupoksi ganda
3	Koordinasi:	1. Masih kurangnya koordinasi antara penanggung jawab program 2. Masih kurangnya koordinasi antara antara lintas sektoral
4	Manajemen Kerja:	1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas /bimtek bagi penanggung jawab SPM di PKM 2. pelaksanaan kegiatan yang tidak terintegrasi antara pemegang program sehingga berpengaruh dan hasil pencatan dan pelaporan hasil kegiatan, Penetapan target sasaran yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai
5	Pendanaan:	1. Adanya pemilihan paket layanan kegiatan yang tidak mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan SPM ( Penentuan target dan penetapan pagu anggaran yang tidak relevan) terjadi pemborosan anggaran 2. Adanya duplikasi anggaran sehingga tidak tetap sasaran dan mempengaruhi capaian SPM.



**b) Solusi:**

- (1) Maksimalkan pada sistem pelaporan dan pencatatan
- (2) Meningkatkan program MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) di Puskesmas dan menyediakan dan menyediakan SOP pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar
- (3) Memaksimalkan pada sistem pelaporan
- (4) Peningkatan pelatihan kapasitas petugas tentang sistem informasi PTM
- (5) Menyusun rencana dan kebutuhan terkait program PTM Tahun 2023
- (6) Melakukan monitoring dan evaluasi dan pembinaan
- (7) Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan khusus usia lanjut
- (8) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat dan lanjut usia dalam upaya meningkatkan Kesehatan lanjut usia

**4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:

**4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman terdiri dari :

- a. Perlindungan atas kawasan pemukiman rawan banjir;
- b. Perlindungan atas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi;
- c. Pelayanan jaringan irigasi;
- d. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- e. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- f. Pemenuhan kepatuhan IMB;
- g. Pemenuhan kemantapan jalan;



- h. Pemenuhan tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi;
- i. Pemenuhan proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.

#### 4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.7

##### Target Pencapaian Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				Anggaran
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari						
	Jumlah yang harus dilayani		2460	2460			Rp10.883.516.000
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/ SR			352	352	Rp6.253.516.000
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau)	SR					
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas	Rumah Tangga					



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				Anggaran
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	
	(kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)						
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga			140	140	Rp4.630.000.000
2	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik</b>						
	Jumlah yang harus dilayani		250	250			Rp1.072.110.000
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga			50	50	Rp1.072.110.000
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga					
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	Rumah Tangga					



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				Anggaran
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	
	/ SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)						
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga					
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga					



### 4.3.3 Realisasi

Realisasi urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					79.28 %
1.	<b>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>					58.56 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>46.85 %</b>
	<b>• Jumlah yang Harus Dilayani :</b>	Orang	2,22	1,3	920	59%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>11.71 %</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	58.56 %
			<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	2,22	1,3	920	58.56 %
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	2,22	1,3	920	58.56 %
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	1	0	1	0%
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	1	0	1	0%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,442</b>	<b>2,6</b>	<b>1,842</b>	<b>117.12 %</b>	
2.	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik</b>					100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>• Jumlah yang Harus Dilayani :</b>	Orang	<i>1</i>	<i>1</i>	<b>0</b>	<b>100%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00 %</b>
			<b>Jumlah yang harus dilayani</b>	<b>Jumlah yang terlayani</b>	<b>Jumlah yang belum terlayani</b>	100.00 %
			<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	
	<b>1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)</b>	Rumah Tangga	1	1	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk &lt;25 jiwa / hektar)</b>	Rumah Tangga	1	1	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk &gt;25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)</b>	Rumah Tangga	1	1	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)</b>	Rumah Tangga	1	1	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	<b>5 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk &gt;25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)</b>	Rumah Tangga	1	1	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian
	<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>500.00 %</b>		

Sumber data e-SPM Urusan Pekerjaan Umum 2023

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Adapun Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2023 telah dialokasikan dana belanja operasi sebesar Rp.3.236.243.600 dengan realisasi sebesar Rp.1.360.632.950 dan belanja modal sebesar Rp.3.174.625.000 dengan realisasi sebesar Rp.3.167.355.000

#### 4.4.5 Dukungan Personil

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 3	4	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	2	2
Eselon 4	13	-	-	-	-	-	-	1	10	2	-	-	-	12	1
Staf PNS	15	-	-	-	4	-	-	1	10	-	-	-	4	11	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>4</b>

#### 4.3.5 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi terhadap setiap jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

##### a) Permasalahan

Tabel 4.9

Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum





No	Uraian	Permasalahan
1	Kebijakan:	1. Belum Lengkap dan Terbaharukannya perangkat peraturan yang mendukung Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak 2. Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak
2	Sumber daya:	1. Masih banyaknya rumah tangga yang menggunakan sumber air minum non-perpipaan, ditambah lagi sistem sanitasi <i>on-site</i> yang ada, juga belum disertai dengan investasi dalam infrastruktur penampungan, pengolahan, dan pembuangan limbah tinja sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air baku.
3	Koordinasi:	1. Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program
4	Manajemen Kerja:	1. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi perlu lebih jelas.
5	Pendanaan:	1. Alokasi Anggaran untuk Air minum dan Sanitasi masih terbatas

#### b) Solusi

1. Meningkatkan akses jalan dan jembatan yang memadai untuk menghubungkan antar wilayah,
2. Meningkatkan jalan Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat sangat tinggi,
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik, di mana baru terdapat 2 kampung dengan aliran listrik stabil selama 24 jam, selebihnya maksimal selama 12 jam,
4. Meningkatkan ketersediaan alat pendukung pelaksanaan pekerjaan dan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang



memadai untuk pelaksanaan pekerjaan percepatan perbaikan infrastruktur jalan,

5. Meningkatkan pengendalian internal sehingga kualitas pengerjaan juga menjadi persoalan yang perlu dicermati.

#### **4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat**

Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:

##### **4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman terdiri dari :

- a. Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Korban Bencana
- b. Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah
- c. Cakupan kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani
- d. Cakupan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
- e. Cakupan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

##### **4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Berikut target pencapaian pelayanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Tabel 4.10

Target Pencapaian SPM urusan Perumahan Rakyat



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				Anggaran
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	
1	<b>Penyediaan &amp; rehatiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota</b>						
	Jumlah yang harus dilayani						
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jml					
	<b>Penyediaan &amp; Rehatiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>						
	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah			5	0	Rp50.000.000
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah			10	0	Rp730.000.000
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah			10	0	Rp2.000.000.000
	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah			30	0	Rp6.000.000.000
2	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						
	Jumlah yang harus dilayani		6	0			Rp630.000.000
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah			3	0	Rp0



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
2	Subsidi uang sewa	Rumah			3	0	Rp30.000.000
3	Penyediaan rumah layak huni	Rumah			3		Rp600.000.000

Rencana tindak untuk SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di atas disajikan sebagai berikut:

a. Rumah Layak Huni

- Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
- Melakukan pendataan dan pemutahiran data rumah layak huni secara berkala;
- Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau;
- Perizinan pembangunan dibidang perumahan;
- Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi.

b. Rumah Layak Huni dan Terjangkau

- Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan;
- Melakukan pelatihan kepada para staf di dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat;



- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakeholders terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat;
  - Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk kategori berpenghasilan rendah). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan survey lapangan atau dapat diperoleh dari kantor statistik, pengembang, dll;
  - Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundangundangan dapat berupa:
    - penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni.
    - pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni.
    - pemberian bantuan sebagian pembiayaan pemilikan rumah layak huni.
    - pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan rumah layak huni.
    - pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni
  - Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran;
  - Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran;
  - Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 laporan dalam satu tahun anggaran
- b. Lingkungan yang Sehat dan Aman yang di Dukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum



- Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
- Melakukan pendataan dan pemutahiran data lingkungan perumahan secara berkala;
- Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- Perizinan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi.

#### 4.4.3 Realisasi

Realisasi urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					99.29 %
<b>1 .</b>	<b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>					98.57 %
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)						
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		1	0	1	<b>100%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>18.57 %</b>



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>					92.86 %
	1 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0	0	0	0.00 % 0
	<b>UPLOAD FILE PENDUKUNG</b>					
	<b>PENDATAAN</b>					
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	100%				
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	100%				
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	100%				
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	100%				
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA	100%				



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)	100%				
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	100%				
	<b>PENGHITUNGAN KEBUTUHAN</b>					
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	100%				
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :	100%				
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :	100%				
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	100%				
	<b>PERENCANAAN</b>					
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :		100%			





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :	100%				
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :	100%				
	<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,300.00 %</b>
<b>2 .</b>	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		1	0	1	<b>100%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	100.00 %
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0	0	0	<b>0.00 % 0</b>
	2 . Subsidi uang sewa	Rumah	1	0	1	<b>0.00 % 0</b>
	3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah	1	0	1	<b>0.00 % 0</b>
	<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0.00 %</b>

Sumber data e-SPM PUPR Kab. Mahakam Ulu Tahun 2023

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Adapun Anggaran Urusan Perumahan Rakyat selama tahun telah dialokasikan dana Belanja langsung tergabung dengan Dinas PUPRR

#### 4.4.5 Dukungan Personil

	STATUS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)	GOLONGAN/ PANGKAT



NAMA JABATAN	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon 3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Eselon 4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-
Staf PNS	6	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	2	4	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

##### 1) Permasalahan

Tabel 4.12

Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat

No	Uraian	Permasalahan
1	Kebijakan:	1. Belum dilakukan Pendataan Terhadap Korban Bencana sebelumnya
		2. Pembagian Kewenangan Penanganan Korban Bencana ( Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah )
2	Sumber daya:	1. Terbatas nya SDM dalam Pendataan
		2. SDM Yang melakukan pendataan kurang memahami kondisi lapangan dalam pendataan karena kurangnya informasi yang akurat
3	Koordinasi:	1. Perlu dilakukan koordinasi Lintas OPD dalam penanganan Korban Bencana serta mitigasi pada daerah rawan bencana
		2. Perlu dilakukan Koordinasi bersama Pihak Pemerintah Kampung dan Kecamatan dalam Mendata jumlah korban bencana yang belum tertangani
4	Manajemen Kerja:	1. Perlunya bimbingan manajemen pendataan dan rencana relokasi.
5	Pendanaan:	1. Belum dialokasikannya dana Penanganan Korban Bencana untuk tahun berjalan



		2. ada beberapa OPD yang masih menangani pendanaan Pembangunan rumah bagi korban bencana ( DPUPR, Dinsos, Kesra dan BPBD )
--	--	--

## 2) Solusi

- a. Melakukan Meningkatkan penyediaan sumber air bersih bagi Rumah Tangga,
- b. Meningkatkan jaringan air bersih ke rumah-rumah warga,
- c. Meningkatkan utilitas prasarana sarana umum.
- d. Meningkatkan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

### 4.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 pada Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

#### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a) Pelayanan Gangguan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan.
- b) Pelayanan penegakkan Perda dan Perkada
- c) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

#### 4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu pada tiap jenis pelayanan dasar dapat terlihat pada tabel berikut:



Tabel 4.13  
Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal  
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				Anggaran
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	
<b>1</b>	<b>Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum (Trantibum)</b>						
	Jumlah yang harus dilayani		9073	9073			1.290.824.500
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Unit			20	5	540.000.000
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen			7	5	200.000.000
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang			25	5	538.624.500
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen			1	0	5.000.000
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang			1	0	3.600.000
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan	Orang			1	0	3.600.000



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)						
<b>2</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>						
	Jumlah yang harus dilayani		250	250			Rp5.136.000.000
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen			1	1	Rp750.000.000
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang			250	250	Rp500.000.000
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang			250	250	Rp3.586.000.000
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit			150	150	Rp300.000.000
<b>3</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)</b>						
	Jumlah yang harus dilayani		35	35			Rp5.940.000.000
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum,	Unit			10	10	Rp3.000.000.000



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)						
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang			35	35	Rp2.940.000.000
<b>4</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)</b>						
	Jumlah yang harus dilayani		20	20			Rp1.600.000.000
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko			0	0	Rp0
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang			20	20	Rp500.000.000
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen			10	10	Rp100.000.000
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan			0	0	Rp0
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan			20	20	Rp1.000.000.000
<b>5</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>						
	Jumlah yang harus dilayani		15.695	9.820			Rp1.541.992.780
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit	Layanan			100	100	Rp100.000.000



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)						
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen			100	100	Rp100.000.000
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit			100	100	Rp3.689.500.000,00
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang			100	100	Rp336.800.000,00
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan			100	100	Rp280.231.600
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan			100	100	Rp60.795.000

Sumber e-SPM Kabupaten Mahakam Ulu 2023



### 4.5.3 Realisasi

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu pada tiap jenis pelayanan dasar dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14  
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM</b>			TUNTAS UTAMA			93.57 %
<b>1 .</b>	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)</b>					93.57 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		2,5	2,8	-300	<b>100.00 %</b>
			<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>			<b>13.57 %</b>
			<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	67.86 %
	<b>1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)</b>	unit	20	10	<b>10</b>	<b>50.00 %</b>
	<b>2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)</b>	Dokumen	7	5	<b>2</b>	<b>71.43 %</b>
	<b>3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)</b>	orang	70	35	<b>35</b>	<b>50.00 %</b>





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	1	0	1	0%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	1	0	1	0%
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN</b>						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN</b>			TUNTAS UTAMA			97.77 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					97.30 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>77.44 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		250	242	8	<b>96.80 %</b>
			<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>			<b>19.86 %</b>
			<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	99.30 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	250	250	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	250	243	7	97.20 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	151	151	0	100.00 %
2 .	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)</b>					100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		75	75	0	100.00 %
			<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>			<b>20.00 %</b>
			<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit	28	28	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	75	75	0	100.00 %
3 .	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)</b>					96.00 %
	ya		Ya Terjadi Bencana			
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		20	20	0	100.00 %
			<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>			<b>16.00 %</b>



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
						80.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	0	1	0%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	20	20	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	1	1	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	20	20	0	100.00 %
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>						
TUNTAS PARIPURNA						
100.00 %						
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		35,58	35,58	0	100.00 %
			<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>			<b>20.00 %</b>
			<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	15	16	-1	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	3	3	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	120	120	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	25	25	0	100.00 %
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	10	10	0	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	5	5	0	100.0

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama tahun 2023 telah dialokasikan dana Belanja Operasi sebesar Rp. 33.611.285.866 dengan realisasi sebesar Rp.27.469.809.406 dan dana Belanja Modal sebesar Rp. 11.153.025.168 dengan realisasi sebesar Rp.10.435.775.900



#### 4.5.5 Dukungan Personil

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Eselon 3	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1
Eselon 4	6	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	-	6	-
Staf PNS	4	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	-	-	<b>4</b>	-	-	-	<b>8</b>	<b>1</b>	-	-	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

##### a) Permasalahan

##### Satpol PP

Tabel 4.15

Permasalahan Satpol PP

No	Uraian	Permasalahan
1	Kebijakan:	1. Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi dan Pelaksanaan Penertiban yang Bersifat Persuasif Humanis dengan Didahului Sosialisasi kepada Masyarakat, masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan sarana dan prasarana yang belum cukup memadai dan dukungan anggaran yang belum maksimal.
		2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur masih dalam proses pelaksanaan pelatihan dikarenakan dalam pelaksanaannya masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri.
2	Sumber daya:	1. Masih kurangnya Personil anggota Satpol PP
		2. Mobilitas Operasional Satpol PP masih sangat minim dalam melakukan pelayanan kepada Masyarakat yang tidak dapat dijangkau melalui jalan darat dikarenakan kondisi jalan yang belum memadai
		3. Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih dalam proses diklat
3	Koordinasi:	1. Masih perlu banyak koordinasi terkait pembahasan SPM ke semua sektor OPD terkait penegakan PERDA



No	Uraian	Permasalahan
4	Manajemen Kerja:	1. Perlu melaksanakan Bimtek-bimtek terkait Penegakan PERDA
		2. Masih banyak anggota yang perlu mengikuti pelatihan dasar Satpol PP
5	Pendanaan:	1. Anggaran didukung tetapi masih minim terutama untuk melakukan Pelatihan-pelatihan

### Damkar

Tabel 4.16

#### Permasalahan Pemadam Kebakaran

No	Uraian	Permasalahan
1	Kebijakan:	Belum ada kebijakan untuk pembentukan pos-pos Pemadam Kebakaran di tiap-tiap kecamatan
		Kurangnya personil damkar, karena tidak bisa menerima / mengangkat TNP baru
2	Sumber daya:	kurangnya personil anggota Damkar sehingga menghambat kinerja dilapangan
		2 unit mobil pemadam kebakaran terdiri dari kepala regu dan pengemudi. Idealnya, pada setiap regu terdapat satu unit kendaraan operasional yang terdiri dari enam orang, yaitu kepala regu, sopir, serta empat anggota. jumlah anggota dalam satu regu ini sudah disesuaikan dengan fungsinya masing-masing., sehingga dengan adanya 2 unit mobil damkar idealnya terdiri dari 3 regu dimana dibagi dalam shif jaga 2 regu dan ada yang off.
3	Koordinasi:	masih perlu banyak koordinasi tentang jaminan keselamatan petugas pemadam kebakaran dilapangan, peralatan yang standar
4	Manajemen Kerja:	kurangnya personil anggota damkar sehingga tidak bisa membentuk regu dalam 1 pelton dilapangan
5	Pendanaan:	minimnya anggaran untuk peningkatan SDM damkar dan redkar yang terlatih, serta peralatan yang memadai



**BPBD**

Tabel 4.17

Permasalahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Uraian	Permasalahan
1	Kebijakan:	1. BPBD Kabupaten Mahakam Ulu baru terbentuk dan masih banyak Regulasi atau Kebijakan yang akan dibuat.
		2. Adanya pergeseran pejabat struktural pengampu SPM pada BPBD
2	Sumber daya:	1. Sumber Daya Aparatur pada BPBD masih kurang
3	Koordinasi:	1. Dalam melaksanakan koordinasi perlu adanya FGD dalam membahas SPM BPBD karena keterkaitan dengan beberapa OPD
4	Manajemen Kerja:	1. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis spesifik dalam manajemen kinerja pada BPBD
5	Pendanaan:	1. Anggaran SPM pada BPBD sudah diakomodir tetapi masih minim

**b) Solusi**

1. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah
2. Pemantapan Pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima
3. Pemantapan struktur organisasi membangun dan mengembangkan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan Bencana
4. Adanya Pendukung untuk melaksanakan patroli
5. Mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana dan bencana dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar



terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

6. Pengembangan kapasitas pelayanan trantib terkait penguatan regulasi

#### 4.6 Bidang Urusan Sosial

Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

##### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti.
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

##### 4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.18  
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023			
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi

1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti						
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	375	375			Rp1.365.000.000
1	Layanan data dan pengaduan	Orang			4	4	Rp60.000.000





No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang			6	6	Rp60.000.000
3	Penyediaan permakanan	Orang			375	375	Rp375.000.000
4	Penyediaan sandang	Orang			375	375	Rp375.000.000
5	Penyediaan alat bantu	Orang			6	6	Rp60.000.000
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang			375	375	Rp60.000.000
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			375	375	Rp60.000.000
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang			375	375	Rp15.000.000
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang			375	375	Rp60.000.000
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang			15	15	Rp60.000.000
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang			375	375	Rp60.000.000
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang			100	100	Rp60.000.000
13	Layanan rujukan	Orang			5	5	Rp60.000.000



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
2	<b>Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti</b>						
	Jumlah yang harus dilayani		6	0			Rp60.000.000
1	Layanan data dan pengaduan	Orang			6	0	Rp60.000.000
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang			6	0	Rp60.000.000
3	Penyediaan permakanan	Orang			6	0	Rp60.000.000
4	Penyediaan sandang	Orang			6	0	Rp60.000.000
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang			6	0	Rp60.000.000
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			6	0	Rp60.000.000
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang			6	0	Rp60.000.000
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang			6	0	Rp60.000.000
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang			6	0	Rp60.000.000
10	Pemberian pelayanan	Orang			6	0	Rp60.000.000



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	penelusuran keluarga						
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang			6	0	Rp60.000.000
12	Layanan rujukan	Orang			6	0	Rp60.000.000
<b>3</b>	<b>Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti</b>					0	
	Jumlah yang harus dilayani		1039	0			Rp1.039.000.000
1	Layanan data dan pengaduan	Orang			6	0	Rp60.000.000
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang			6	0	Rp60.000.000
3	Penyediaan permakanan	Orang			1039	0	Rp1.039.000.000
4	Penyediaan sandang	Orang			1039	0	Rp1.039.000.000
5	Penyediaan alat bantu	Orang			6	0	Rp60.000.000
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang			6	0	Rp60.000.000
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			6	0	Rp60.000.000
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang			1039	0	Rp1.039.000.000
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang			6	0	Rp60.000.000



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang			6	0	Rp60.000.000
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang			6	0	Rp60.000.000
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang			6	0	Rp60.000.000
13	Layanan rujukan	Orang			6	0	Rp60.000.000
<b>4</b>	<b>Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti</b>						
	Jumlah yang harus dilayani		6	0			Rp60.000.000
1	Layanan data dan pengaduan	Orang			6	0	Rp60.000.000
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang			6	0	Rp60.000.000
3	Penyediaan permakanan	Orang			6	0	Rp60.000.000
4	Penyediaan sandang	Orang			6	0	Rp60.000.000
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang			6	0	Rp60.000.000
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			6	0	Rp60.000.000
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang			6	0	Rp60.000.000
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda	Orang			6	0	Rp60.000.000



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2023				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
	Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan						
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang			6	0	Rp60.000.000
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang			6	0	Rp60.000.000
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang			6	0	Rp60.000.000
12	Layanan rujukan	Orang			6	0	Rp60.000.000
<b>5</b>	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>						
	Jumlah yang harus dilayani		15	0			Rp2.000.000.000
1	Penyediaan permakanan	Orang			15	0	Rp900.000.000
2	Penyediaan sandang	Orang			15	0	Rp900.000.000
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit			1	0	Rp70.000.000
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang			1	0	Rp60.000.000
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang			1	0	Rp70.000.000

#### 4.6.3 Realisasi



Realisasi urusan sosial yang dilaksanakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel. 4.19  
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>		TUNTAS UTAMA			93.59 %
1.	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti</b>					94.29 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>74.60 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		400	373	27	<b>93.25 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>19.69 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	98.44 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	4	4	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	4	4	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	400	373	27	93.25 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	400	373	27	93.25 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	2	2	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	4	4	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	4	4	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	400	373	27	93.25 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	4	4	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	4	4	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	4	4	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4	4	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	4	4	0	100.00 %
2 .	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti</b>					100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		4	4	0	100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	4	4	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	4	4	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	4	4	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	4	4	0	100.00 %
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	4	4	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	4	4	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	4	4	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	4	4	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	4	4	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	4	4	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4	4	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	4	4	0	100.00 %
3 .	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</b>					73.66 %
			<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	<b>55.09 %</b>



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>					
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		1500	1033	<b>467</b>	<b>68.87 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>18.56 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	92.82 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	4	4	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	4	4	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1500	1033	<b>467</b>	<b>68.87 %</b>
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1500	1033	<b>467</b>	<b>68.87 %</b>
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	4	4	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	4	4	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	4	4	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	1500	1033	<b>467</b>	<b>68.87 %</b>
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	4	4	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	4	4	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	4	4	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4	4	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
	13 . Layanan rujukan	Orang	4	4	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>
<b>4 .</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</b>					100.00 %
download SK yang telah di upload <a href="#">6411-20240119110801dummies.pdf</a> DIKEMBALIKAN						
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		4	4	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>20.00 %</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	4	4	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	4	4	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	4	4	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	4	4	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	4	4	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	4	4	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	4	4	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	4	4	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	4	4	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	4	4	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4	4	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	4	4	0	100.00 %
5 .	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>					100.00 %
	Ya Terjadi Bencana <input type="checkbox"/>					
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		15	15	0	100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>20.00 %</b>	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>					100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	15	15	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	4	4	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	4	4	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	4	4	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	4	4	0	100.0

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Urusan Sosial Kabupaten Mahakam Ulu selama tahun 2023 telah dialokasikan dana Belanja Operasi sebesar Rp.17.172.606.079 dengan realisasi sebesar Rp8.911.863.348 dan dana Belanja Modal sebesar Rp.159.105.000 dengan realisasi sebesar Rp.159.045.000

#### 4.6.5 Dukungan Personil

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT			
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Eselon 3	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Eselon 4	5	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	5	-
Staf PNS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
TNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

##### a) Permasalahan



Tabel 4.20  
Permasalahan Urusan Sosial

No	Uraian	Permasalahan
1	Kebijakan:	1. Belum adanya regulasi yang mengakomodasi tentang penentuan kriteria yang secara spesifik untuk wilayah Kab. Mahakam Ulu
		2..... dst
2	Sumber daya:	1. Belum adanya kegiatan Peningkatan Sumberdaya Manusia untuk Pendamping TKSK, TKSM dan PSM yang secara rutin dan berkala dilakukan.
		2. Kurangnya tenaga Pendamping TKSK, TKSM dan PSM di setiap Kecamatan untuk mengantisipasi kondisi geografis wilayah Kab. Mahakam Ulu
3	Koordinasi:	1. Belum efektifnya sumberdaya manusia (TKSK, TKSM, PSM dan Pendamping Sosial lainnya) dalam memanfaatkan teknologi informasi berbasis aplikasi pengelola data bantuan sosial
		2..... dst
4	Manajemen Kerja:	1. Penyusunan agenda kegiatan dan aksi belum tepat dan efektif dan perlu koordinasi dan pemetaan agenda yang lebih spesifik menyesuaikan aliran kas anggaran
		2..... dst
5	Pendanaan:	1. Belum adanya koordinasi yang lebih jauh dalam penyusunan anggaran yang menyesuaikan antara anggaran dengan kriteria penerima bantuan sosial yang lebih tepat
		2..... dst

**b) Solusi**

- 1) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak telah mengajukan permohonan Penambahan dana pada Akhir tahun 2021, mengingat Defisitnya anggaran Kabupaten Mahakam Ulu, maka akan diusulkan pada APBD-P 2022, karena dianggap pentingnya kegiatan Santunan tersebut bagi Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu;



- 2) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Kabupaten Mahakam Ulu selalu melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti, Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu, Dinas Sosial Provinsi, Guna mendapatkan Fasilitas Dan Sarana Pendukung dalam urusan Rehabilitasi Sosial
- 3) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Kabupaten Mahakam Ulu juga mengajukan Pengadaan Fasilitas Tanggap bencana dan disisi lain
- 4) Melakukan kerjasama dengan Tim SAR, Lembaga-lembaga yang terkait dalam hal Penanganan Bencana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Begitu banyak aksi dan upaya yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan selama tahun 2023 dengan berbagai prestasi dan kekurangan yang ada telah dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023 ini. Dengan harapan laporan ini akan menjadi awal kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang perbaikan-perbaikan ke depan, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dengan penetapan perencanaan dan pengawasan sebagai bahan evaluasi dan kebijakan yang akan diambil di masa mendatang.

Sebagai Kabupaten baru yang berada di daerah perbatasan, tantangan terbesar adalah menyiapkan Kabupaten Mahakam Ulu agar tidak terpinggirkan dan dapat memperoleh manfaat dari proses globalisasi serta dapat berkembang secara berkelanjutan menuju ke Visi Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 “Membangun Mahulu Untuk Semua Sejahtera Berkeadilan” yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten telah mencoba memenuhi komitmen bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat sehingga harus segera menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis tersebut agar tidak tertinggal oleh arus perubahan yang sangat tinggi.

Kendala dan permasalahan yang juga dirasakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah minimnya sarana prasarana dan infrastruktur yang masih sangat terbatas seperti akses transportasi yang menghubungkan Kabupaten Mahakam Ulu dengan daerah di sekitarnya, karena minimnya sarana dan infrastruktur tersebut membuat proses pembangunan di Mahakam Ulu harus dilakukan secara bertahap. Namun demikian Pemerintah Kabupaten selalu berupaya untuk terus memantapkan komitmen yang telah



ditetapkan pada masa sebelumnya, menggali potensi-potensi yang ada, memanfaatkan peluang dan tantangan serta mengurangi kemungkinan ancaman yang muncul.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu di berbagai sektor dan lini, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi. Pada akhirnya, penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023 ini disampaikan sepenuhnya kepada Pemerintah melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.